



## BAB I PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 mengamanatkan Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta merupakan salah satu bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintah Daerah guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Ruang lingkup laporan meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan memperhatikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, capaian pelayanan dasar dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Penulisan LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mengacu pada sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, yang memuat Penjelasan Umum, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum.
2. **Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, yang memuat Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.



3. **Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**, yang memuat dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan, gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.
4. **Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum**, yang memuat urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Sosial; dan Program & Kegiatan.
5. **Bab V Penutup**.

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau secara resmi dimulai pada Tanggal 1 Juli 2004;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Standar Minimal (SPM);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4).



8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 723);
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120.04/6976/OTDA Tanggal 31 Desember Tahun 2019 Perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019.

## 1.1 Penjelasan Umum

### a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia, mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau secara resmi dimulai pada tanggal 1 Juli 2004 yang dipusatkan di Kota Batam dan kemudian setahun kemudian berangsur pindah ke Ibukota Provinsi di Kota Tanjungpinang. Saat ini Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau berada di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.

### b. Data Geografis Wilayah

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Provinsi di Indonesia secara Geografis terletak pada posisi yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas daratan sebesar 8.201,72 km<sup>2</sup>, terletak pada 0°29'LS - 4°40'LU dan 103°22'BT - 109°40'BT.

**Tabel 1.1 Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau  
Menurut Permendagri Nomor 72 Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km <sup>2</sup> )
1.	Kabupaten Karimun	912,75
2.	Kabupaten Bintan	1.318,21

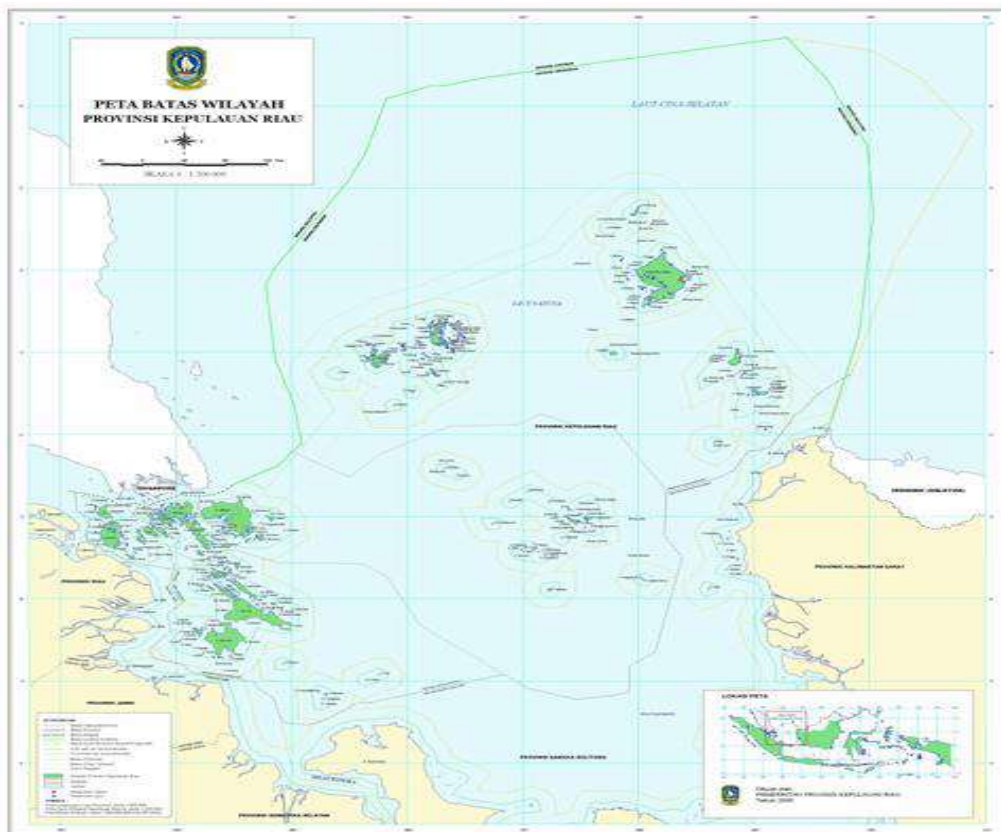
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14
6.	Kota Batam	960,25
7.	Kota Tanjungpinang	144,56
<b>Total</b>		<b>8.201,72</b>

Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

**Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau**





Luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km<sup>2</sup>. Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

**Tabel 1.2 Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan**

**Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007**

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km <sup>2</sup> )
1	Kabupaten Karimun	4.698,09
2	Kabupaten Bintan	102.964,08
3	Kabupaten Natuna	216.113,42
4	Kabupaten Lingga	43.339,00
5	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00
6	Kota Batam	3.675,25
7	Kota Tanjungpinang	149,13
	<b>Total</b>	<b>417.012,97</b>

*Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007*

Setelah terbitnya Undang–Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk mengidentifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian “Pulau” menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi



air dan selalu berada diatas air pada saat air pasang. Hasil verifikasi Tim Nasional setelah ditambah Pulau Berhala terdapat 1.796 pulau yang sudah bernama, hal ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, dengan perincian terlihat pada Tabel berikut.

**Tabel 1.3 Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
1	Kota Batam	371	133
2	Kota Tanjungpinang	9	2
3	Kabupaten Bintan	241	48
4	Kabupaten Karimun	251	73
5	Kabupaten Natuna	392	62
6	Kabupaten Lingga	532	76
	Jumlah	1.796	394

*Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna*

**Tabel 1.4 Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun
2	Kabupaten Karimun	2	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak
3	Kabupaten Natuna	7	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar,
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar,
5	Kota Batam	4	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak
	Jumlah	22	

*Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016*



Perkembangan terakhir pulau di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 125.1/4275/BAK, tanggal 12 Oktober 2015 perihal penyampaian data pulau, ada penambahan pulau di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 122 pulau. Di samping itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau-pulau kecil terluar.

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

#### **1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera**

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

#### **2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh**

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

#### **3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep**

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

#### **4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang**

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.



### c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan database Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan Pencatatan Sipil per-Juni Tahun 2022 sebanyak 2.101.215 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.068.834 atau 51% dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.032.381 jiwa atau 49%.

Pada tahun 2022, rasio jenis kelamin penduduk provinsi Kepulauan Riau sebesar 103,53 artinya terdapat 103 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, dengan luas daratan provinsi Kepulauan Riau sebesar 8,2 ribu km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 256,25 jiwa/km. Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni pada tahun 2022 sebanyak 1.207.082 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 48.084 jiwa.

**Tabel 1.5**

**Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

N o	Kab/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
1.	Bintan	86.872	82.575	169.447	105,20	128,54
2.	Karimun	134.030	128.045	262.075	104,67	287,13
3.	Natuna	42.369	40.455	82.824	104,73	41,23
4.	Lingga	52.725	49.425	102.150	106,68	45,06
5.	Kep. Anambas	24.695	23.389	48.084	105,58	81,48
6.	Batam	612.671	594.411	1.207.082	103,07	1.257,05
7.	Tanjungpinang	115.472	114.081	229.553	101,22	1.597,94
8.	Provinsi Kepri	1.068.834	1.032.381	2,101.215	103,53	256,25

Sumber: DPMDDUKCAPIL 2022

### d. Jumlah Kabupaten/Kota

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau hampir 96% adalah lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota





provinsi dan Kota Batam, dan lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000.

**Tabel 1.6**

**Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
5.	Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT
6.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
7.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT

*Sumber: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah*

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 mengacu pada Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 4 Tahun 2021 yang terdiri atas 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan 43 Unit Kerja Perangkat Daerah di bawah OPD baik berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas dan Badan maupun Cabang Dinas.



**Tabel 1.7**  
**31 PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021**

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah UPT
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2 UPT
2	DINAS PERHUBUNGAN	4 UPT
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6 UPT
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3 UPT
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2 UPT
6	DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA	-
7	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-
8	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	2 UPT
9	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	2 UPT
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	1 UPT
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	-
12	DINAS PENDIDIKAN	1 UPT 5 CABDIS
13	DINAS KEBUDAYAAN	5 CABDIS
14	DINAS ESDM	-
15	DINAS KESEHATAN	-
16	DINAS PARIWISATA	-
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-
18	DINAS SOSIAL	1 UPT
19	DINAS PM DESA, KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	-
20	DINAS PM DAN PTSP	-
21	DINAS KOP UKM	-
22	DISPERINDAG	-
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	9 UPT
24	BKD DAN KORPRI	-
25	BADAN PENGEMBANGAN SDM	-
26	BAPPEDA	-
27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-
28	BADAN KESBANG DAN POLITIK	-
29	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN	-
30	BADAN PENGHUBUNG	-
31	INSPEKTORAT	-
32	SATPOL PP DAN DAMKAR	-
33	SEKRETARIAT DAERAH	-
34	SEKRETARIAT DPRD	-
35	RUMAH SAKIT UMUM RAJA AHMAD THABIB	-
36	RUMAH SAKIT UMUM ENSKU HAJI DAUD	-

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Kepri



**Tabel 1.8**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan**  
**Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Desember 2021**

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	1.343	1.894	3.237
Fungsional Umum	653	636	1.289
Struktural	<b>323</b>	<b>137</b>	<b>460</b>
Eselon IV	139	74	213
Eselon III	145	58	203
Eselon II	38	5	43
Eselon I	1	-	1
Jumlah	<b>2.319</b>	<b>2.667</b>	<b>4.986</b>

Sumber : Badan Kepegawaian dan Korpri Desember 2022

**Tabel 1.9**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan**  
**di Provinsi Kepulauan Riau Per Desember 2022**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sampai dengan SD	7
2	SLTP/Sederajat	6
3	SMA/Sederajat	357
4	Diploma I, II/Akta I, II	11
5	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	492
6	Tingkat Sarjana/Diploma IV/Doktor/Ph.D	4.113
	<b>Jumlah</b>	<b>4.986</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri-Desember 2022



**Tabel 1.10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kepangkatan dan Jenis Kelamin Provinsi Kepulauan Riau Per Desember 2022**

Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. I/A (Juru Muda)	1	-	0
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	2	-	2
3. I/C (Juru)	3	-	3
4. I/D (Juru Tingkat I)	2	-	2
<b>Golongan I</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>
5. II/A (Pengatur Muda)	14	1	15
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	33	7	40
7. II/C (Pengatur)	90	81	171
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	147	117	264
<b>Golongan II</b>	<b>284</b>	<b>206</b>	<b>490</b>
9. III/A (Penata Muda)	197	253	450
10. III/B (Penata Muda Tingkat 1)	402	499	901
11. III/C (Penata)	463	595	1.058
12. III/D (Penata Tingkat I)	508	715	1.223
<b>Golongan III</b>	<b>1.570</b>	<b>2.062</b>	<b>3.632</b>
13. IV/A (Pembina)	289	299	588
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	114	94	208
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	31	3	34
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	21	3	24
17. IV/E (Pembina Utama)	2	-	2
<b>Golongan IV</b>	<b>457</b>	<b>399</b>	<b>856</b>
<b>Jumlah</b>	<b>2.319</b>	<b>2.667</b>	<b>4986</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri-Desember 2022

#### f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

##### 1. Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Alokasi anggaran untuk Urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp



817.898.806.329,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 797.275.277.188,36 atau sebesar (97,48%).

**Tabel 3.2.1**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Pada Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pendidikan					
Urusan Pendidikan		817.898.806.329,00	797.275.277.188,36	97,48	Dinas Pendidikan
Program pengelolaan Pendidikan		343.849.050.681	330.797.920.707,36	96,20	
	1. angka partisipasi sekolah (aps) sma/smk				
	2. angka partisipasi kasar (apk) sma/ma/smk				
	3. angka partisipasi kasar (apk) slb				
	4. angka partisipasi murni (apm) sma/smk/ma/mak				
	5. angka putus sekolah sma/smk				
	6. ruang kelas sma/smk/slb dalam kondisi baik				
	7. angka melanjutkan (am) dari smp ke sma/smk				
	8. rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah				
Pengelolaan pendidikan sekolah Menengahatas		183.690.074.285	176.036.573.361,25	95,83	
	Persentase siswa sma yang diterima Di perguruan tinggi				
	Persentase ruang kelas sma dalam kondisi baik				
	Persentase angka putus sekolah sma				
	Jumlah Ruang kelas SMA yang dibangun				



	<b>Jumlah utilitas SMA yang tersedia</b>				
	<b>Persentase Tenaga Pendidik SMA yang Bersertifikasi</b>				
Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15.938.283.936	15.768.174.483	98,93	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	10.484.136.200	10.449.513.764	99,67	
Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	1.969.636.600	1.967.719.935	99,90	
Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	5.606.991.600	5.598.477.875	99,85	
Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	4.736.383.902	4.730.072.577	99,87	
Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	1.436.882.600	1.431.903.410	99,65	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4.214.395.800	4.201.059.075	99,68	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1.058.914.600	1.057.824.075	99,90	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6.003.052.581	5.666.923.348	94,40	
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2.294.873.600	2.292.898.875	99,91	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2.235.626.600	2.234.286.075	99,94	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	764.134.600	754.988.765	98,80	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	217.800.000	217.595.000	99,91	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	337.985.600	337.548.445	99,87	
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	247.350.600	246.857.675	99,80	



Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	142.165.000	141.960.000	99,86	
Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	170.122.000	169.917.000	99,88	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	8.378.816.700	8.241.420.586	98,36	
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	189.572.000	182.575.400	96,31	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8.035.871.200	8.031.150.309	99,94	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6.231.533.929	5.653.596.713	90,73	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	267.610.000	253.207.372	94,62	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	328.892.200	299.144.687	90,96	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	78.628.000	51.127.440	65,02	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	432.030.000	386.670.000	89,50	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	101.888.384.437	95.669.960.477,25	93,89	
<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>		<b>146.924.996.066</b>	<b>141.945.854.225.34</b>	<b>96,61</b>	
	<b>Persentase siswa SMK Negeri yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri</b>				
	<b>Persentase Ruang kelas SMK dalam kondisi baik</b>				



	<b>Persentase Angka Putus Sekolah SMK</b>				
	<b>Jumlah Ruangkelas SMK yang dibangun</b>				
	<b>Jumlah UtilitasSMK yang tersedia</b>				
	<b>Persentase Tenaga Pendidik SMK yang Bersertifikasi</b>				
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	29.680.550.255	29.594.503.596	99,71	
Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	8.241.552.607	8.171.704.138	99,15	
Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	1.366.900.000	1.354.050.000	99,06	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1.893.480.000	1.858.260.000	98,14	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3.774.462.414	3.573.927.937	94,69	
Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	769.287.000	731.007.000	95,02	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4.316.375.200	4.260.047.936	98,70	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	310.894.905	190.991.750	61,43	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	900.035.000	900.000.000	100,00	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	74.063.059.785	70.560.598.019,34	95,27	
<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>		<b>13.233.980.330</b>	<b>12.815.493.120,77</b>	<b>96,83</b>	
	<b>Persentase Ruang kelas SLB dalam kondisi baik</b>				
	<b>Persentase Angka Putus Sekolah SLB</b>				
	<b>Jumlah Ruang kelas SLB yang dibangun</b>				
	<b>Jumlah Utilitas SLB yang tersedia</b>				





	<b>Persentase Tenaga Pendidik SLB yang Bersertifikasi</b>				
	<b>Persentase siswaSLB Negeri yang diterima di Dunia Usaha dan Dunia Industri</b>				
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	1.174.441.200	1.161.530.800	98,90	
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Terbangun	370.621.400	358.062.400	96,61	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	219.924.600	214.196.200	97,40	
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	230.793.100	219.481.829	95,10	
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.454.642.000	1.449.687.600	99,66	
Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	324.253.650	324.124.000	99,96	
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	309.796.200	298.937.850	96,50	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	579.798.200	561.153.500	96,78	
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	128.497.800	89.209.404	69,42	
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	306.454.500	241.812.816	78,91	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	356.493.680	302.108.850	84,74	
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	7.778.264.000	7.595.187.871,77	97,65	
<b>PROGRAM PENGEMBAN GAN KURIKULUM</b>	<b>9. Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum</b>	<b>19.974.000</b>	<b>9.663.102</b>	<b>48.38</b>	
	<b>10. Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum</b>				



	<b>11. Jumlah SMK yang Terevitalisasi</b>				
<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</b>	Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Menengah	9.987.000	0	0	
	Jumlah Kurikulum SMK yang link and match dengan DUDI				
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	9.987.000	0	0	
<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus</b>	<b>Jumlah Kurikulum yang sesuai dengan kearifan Lokal Pendidikan Khusus</b>	<b>9.987.000</b>	<b>9.663.102</b>	<b>96,76</b>	
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	9.987.000	9.663.102	96,76	
<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>12. Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah</b>	<b>795.960.700</b>	<b>766.615.950</b>	<b>96,31</b>	
<b>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Kepri</b>	<b>795.960.700</b>	<b>766.615.950</b>	<b>96,31</b>	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	279.043.500	271.770.750	97,39	
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	516.917.200	494.845.200	95,73	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	<b>13. Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin</b>	<b>29.926.000</b>	<b>7.831.336</b>	<b>26,17</b>	
<b>Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	Jumlah sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan	19.939.000	0	0	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul	19.939.000	0	0	



Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				
<b>Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	Jumlah sekolah yang diberikan rekomendasi perizinan	9.987.000	7.831.336	78,42	
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	9.987.000	7.831.336	78,42	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>14. Perse ntase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>	<b>473.203.894.948,00</b>	<b>465.693.246.093,00</b>	<b>98,41</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau</b>	1.174.182.616,00	1.086.022.521,00	92,49	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	905.064.300,00	843.003.926,00	93,14	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Dinas Pendidikan	115.809.500,00	102.699.795,00	88,68	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Dinas Pendidikan	114.858.816,00	109.661.500,00	95,48	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	38.450.000,00	30.657.300,00	79,73	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran Gajidan Tunjangan Pegawai serta Administrasi melaksanakan Tugas</b>	370.375.814.084,00	365.277.596.486,00	98,62	
	<b>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan</b>				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	367.996.008.414,00	363.208.701.493,00	98,70	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Tunjangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1.526.447.000,00	1.314.328.000,00	86,10	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	836.278.670,00	738.226.993,00	88,28	



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD yang disusun	17.080.000,00	16.340.000,00	95,67	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan</b>	277.300.000,00	262.615.700,00	94,70	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	277.300.000,00	262.615.700,00	94,70	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai Dinas Pendidikan</b>	1.148.680.575,00	883.686.532,00	76,93	
	<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Dinas Pendidikan</b>				
	<b>Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pegawai Dinas Pendidikan (BTIKP)</b>				
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan se-Provinsi Kepri	894.196.900,00	660.758.414,00	73,89	
	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan se-Provinsi Kepri (BTIKP)				
Realisasi Kinerja SKPD					
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	54.091.000,00	53.975.000,00	99,79	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	344.822.900,00	327.049.922,00	94,85	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis	458.665.100,00	446.642.500,00	97,38	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah peralatan Dan Mesin Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara</b>	4.897.962.108,00	4.872.531.756,00	99,48	
	<b>Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan</b>				



	<b>Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara</b>				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	354.126.000,00	351.006.050,00	99,12	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantoran Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	400.252.158,00	399.078.806,00	99,71	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	4.143.583.950,00	4.122.446.900,00	99,49	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau</b>	844.156.400,00	842.394.500,00	99,79	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	386.631.900,00	384.905.000,00	99,55	
Realisasi Kinerja SKPD					
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	54.091.000,00	53.975.000,00	99,79	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	344.822.900,00	327.049.922,00	94,85	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis	458.665.100,00	446.642.500,00	97,38	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah peralatan Dan Mesin Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara</b>	4.897.962.108,00	4.872.531.756,00	99,48	
	<b>Jumlah Gedung Dan Bangunan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dipelihara</b>				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	354.126.000,00	351.006.050,00	99,12	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantoran Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	400.252.158,00	399.078.806,00	99,71	



Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	4.143.583.950,00	4.122.446.900,00	99,49	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Peralatan Mesin Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau</b>	844.156.400,00	842.394.500,00	99,79	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	386.631.900,00	384.905.000,00	99,55	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya	126.989.500,00	126.989.500,00	100,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	330.535.000,00	330.500.000,00	99,99	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor Dinas Pendidikan</b>	91.607.666.115,00	89.794.230.304,00	98,02	
	<b>Jumlah layanan surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor Dinas Pendidikan (BTIKP)</b>				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.570.000,00	4.497.000,00	98,40	
	Jumlah penyediaan Jasa Surat Menyurat (BTIKP)				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.513.145.390,00	1.415.500.252,00	93,55	
	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (BTIKP)				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	448.435.000,00	137.635.000,00	30,69	
	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (BTIKP)				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	89.641.515.725,00	88.236.598.052,00	98,43	
	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan				



## 2. Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT), dan RSUD Engku Haji Daud (EHD) dengan perincian diuraikan dibawah ini :

### a. Dinas Kesehatan

Alokasi anggaran pada Dinas Kesehatan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 80.940.668.237,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 80.456.829.338,00 atau sebesar (99,40%) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.2.1  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada  
Urusan Wajib Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kesehatan		434.310.791.570,00	410.810.258.730,68	94,59	
Dinas Kesehatan		80.940.668.237,00	80.456.829.338,00	99,40	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYAKESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		43.604.502.357,00	43.162.025.665,00	98,99	
	1. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup				
	2. Angka KematianBayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup				
	3. Prevalensi Stunting(pendek dan sangat pendek) pada balita				
	4. Persentase warga negara yang terdampakkrisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan				
	5. Persentase warganegara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan				
	6. Jumlah Kabupaten/kota sehat(KKS)				



	7. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)				
	8. Capaian ODHA yang mendapatkan ARV				
	9. Eliminasi malaria (kabupaten/kota)				
	10. Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap				
	11. Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas				
	12. Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS				
	13. Persentase Puskesmas terakreditasi				
	14. Persentase RumahSakit terakreditasi				
	15. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial				
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKMRujukan Tingkat Daerah Provinsi	9.810.108.586,00	9.739.461.305,00	99,28	
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya	4.000.200.000,00	4.000.198.900,00	100,00	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan	2.250.000.000,00	2.210.430.000,00	98,24	
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Laporan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.559.908.586,00	3.528.832.405,00	99,13	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	33.528.312.654,00	33.167.192.520,00	98,92	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk	Persentase warga negarayang terdampak krisis kesehatan akibat	128.629.000,00	123.249.194,00	95,82	





Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana	bencana dan/atau berpotensi bencana				
Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	2.777.710.316,00	2.643.341.962,00	95,16	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase persalinan difasilitas pelayanan kesehatan (PF)	961.848.100,00	922.744.092,00	95,93	
	Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KN3)				
	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia reproduksi	408.690.400,00	404.716.400,00	99,03	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi wasting (gizikurang dan gizi buruk) pada balita	672.383.530,00	623.036.366,00	92,66	
	Prevalensi stunting				
	Persentase Bumil KEK				
	Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif				
	Persentase Kabkota Melaksanakan surveilans gizi				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kab/kota yang melaksanakan kesehatan kerja				
	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan Olahraga				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	254.577.700,00	253.230.100,00	99,47	
	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)				
	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar				
	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar				



	Persentase tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar				
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kampanye kesehatan	1.273.408.103,00	1.238.191.512,00	97,23	
	Jumlah Kab/Kota yang melakukan promosi kesehatan sesuai standar				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	67.110.000,00	66.678.690,00	99,36	
	Jumlah RSUD yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional integrasi				
	Persentase kabupaten/kota yang bekerjasama dengan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (SP3T) Provinsi				
	Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota				
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Kab/Kota yang sudah melaksanakan DDHB pada Bumil dan Pengobatan Hep C sesuai dengan therapy	642.639.220,00	622.917.225,00	96,93	
	Persentase wanita usia 30 - 50 tahun. Yang dilakukan skrining kanker payudara dan kanker serviks				
	Persentase desa/kelurahan yang mempunyai Posbindu				
	Puskesmas yang melakukan Pelayanan Terpadu PTM				
	Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)				
	Persentase puskesmas yang mempunyai Layanan Upaya Berhenti Merokok				
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis/ Success Rate (SR)				
	Persentase Kab/Kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana Pneumonia sesuai Standar				



	Insidensi HIV Per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)				
	Persentase ODHA baruditemukan yang				
	memulai pengobatan ARV				
	Persentase Kab/Kota yang mencapai API Malaria < 1 /per 1,000 penduduk				
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap				
	Persentase Kab/Kota dengan IR DBD <49 per 100.000 penduduk				
Pengelolaan PelayananKesehatan Haji	Persentase hasil pemeriksaan kesehatanjemaah haji (3 bulan sebelum operasional)	30.628.000,00	30.628.000,00	100,00	
Pengelolaan PelayananKesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase ODGJ Beratyang mendapatkan layanan	17.946.000,00	17.504.000,00	97,54	
Pengelolaan PelayananKesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Persentase Penyalahgunaan NAPZayang mendapatkan rehabilitasi medis	17.878.000,00	17.860.000,00	99,90	
Pengelolaan PelayananKesehatan Khusus	Jumlah Laporan Pengelolaan PelayananKesehatan Khusus	1.456.300.000,00	1.454.191.000,00	99,86	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase pendudukdengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	24.471.396.485,00	24.449.240.679,00	99,91	
Koordinasi dan Sinkronisasi PenerapanSPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Pemenuhan pelaksanaanintervensi PIS PK di Puskesmas	347.167.800,00	299.663.300,00	86,32	
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	201.394.417,00	190.829.340,00	94,75	
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Laporan Data Kesehatan	201.394.417,00	190.829.340,00	94,75	
Penerbitan Izin RumahSakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas Bdan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	64.686.700,00	64.542.500,00	99,78	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi	18.000.000,00	17.955.800,00	99,75	



Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Pendampingan/Fasilitasi Akreditasi RSUD	46.686.700,00	46.586.700,00	99,79	
	Persentase Pendampingan/Fasilitasi Akreditasi Puskesmas Kabupaten/Kota				
	Jumlah pendampingan akreditasi klinik				
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		13.166.451.551,00	13.159.976.396,00	99,95	
	<b>16. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar</b>				
Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	12.604.415.151,00	12.600.170.596,00	99,97	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur kesehatan	12.604.415.151,00	12.600.170.596,00	99,97	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	562.036.400,00	559.805.800,00	99,60	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Provinsi dengan sertifikasi UKOM (Uji Kompetensi) yang diterbitkan tahun berjalan	421.037.200,00	419.056.500,00	99,53	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk jabatan fungsional kesehatan	140.999.200,00	140.749.300,00	99,82	
<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN</b>		27.866.000,00	27.866.000,00	100,00	
	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar				
Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha	27.866.000,00	27.866.000,00	100,00	
Pengendalian dan pengawasan serta tindakan lanjut .Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat	Persentase sarana distribusi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi cara distribusi yang baik (CDAKB)	27.866.000,00	27.866.000,00	100,00	



kesehatan(PAK)					
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN</b>		1.032.277.200,00	1.025.545.180,00	99,35	
<b>MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>					
	<b>17. Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)</b>				
		819.928.600,00	814.516.500,00	99,34	
<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</b>				
Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan kemitraan	819.928.600,00	814.516.500,00	99,34	
Pelaksanaan Komunikasi Informasidan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penyebaran Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dari Provinsi	212.348.600,00	211.028.680,00	99,38	
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	212.348.600,00	211.028.680,00	99,38	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		23.109.571.129,00	23.081.416.097,00	99,88	
	<b>18. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun</b>	288.013.645,00	281.581.100,00	97,77	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	187.485.045,00	184.339.600,00	98,32	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.528.600,00	97.241.500,00	96,73	



<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	17.790.603.875,00	17.780.010.994,00	99,94	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan gaji dan tunjangan	17.004.567.875,00	16.993.974.994,00	99,94	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tercukupinya Anggaran Untuk Pembayaran Administrasi Pelaksana Tugas Kegiatan Setiap Tahunnya	786.036.000,00	786.036.000,00	100,00	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1.117.785.109,00	1.116.547.570,00	99,89	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	10.000.000,00	9.890.600,00	98,91	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor	147.458.249,00	147.458.249,00	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan logistik kantor	65.744.000,00	64.852.911,00	98,64	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetak dan penggandaan	174.675.160,00	174.675.160,00	100,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.778.000,00	12.704.000,00	99,42	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	32.439.500,00	32.370.700,00	99,79	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	653.561.500,00	653.467.250,00	99,99	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis	21.128.700,00	21.128.700,00	100,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	323.868.000,00	323.803.000,00	99,98	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	248.468.000,00	248.403.000,00	99,97	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan gedung kantor dan bangunan Lainnya	75.400.000,00	75.400.000,00	100,00	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	3.155.830.500,00	3.146.033.033,00	99,69	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.300.000,00	156.808.533,00	97,82	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ketersediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	71.500.000,00	70.720.000,00	98,91	



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Pelayanan Umum Kantor	2.924.030.500,00	2.918.504.500,00	99,81	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	433.470.000,00	433.440.400,00	99,99	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan	421.350.000,00	421.348.600,00	100,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12.120.000,00	12.091.800,00	99,77	

### b. RSUD Raja Ahmad Tabib

Alokasi anggaran pada RSUD Raja Ahmad Tabib pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 267.625.721.929,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 244.346.764.014,68 atau sebesar (91,30%), disajikan pada tabel berikut ini

**Tabel 3.2.2.2**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
RSUD Raja Ahmad Tabib		267.625.721.929,00	244.346.764.014,68	91,30	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>	237.911.547.995,00	220.798.669.151,00	92,81	-
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri	67.381.086.493,00	63.368.615.403,00	94,05	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya Penyediaan Gaji (12 Bulan, Gaji 13 dan 14 PNS) dan Tunjangan ASN pada RSUD Raja Ahmad Tabib	66.622.222.493,00	62.623.971.403,00	94,00	-



Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Penatausahaan Keuangan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	743.864.000,00	730.944.000,00	98,26	-
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan Internal/Eksternal RSUD Raja	15.000.000,00	13.700.000,00	91,33	-
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Pada RSUD Raja Ahmad Tabib</b>	<b>25.868.900,00</b>	<b>25.170.000,00</b>	<b>97,30</b>	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Jabatan, Fungsi dan Tugas	25.868.900,00	25.170.000,00	97,30	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Administrasi Umum pada RSUD Raja Ahmad Tabib Prov. Kepri</b>	<b>1.714.645.165,00</b>	<b>1.592.571.080,00</b>	<b>92,88</b>	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RSUD Raja Ahmad Tabib	75.000.000,00	74.995.200,00	99,99	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Laptop, Komputer, UPS, Printer, Infocus, Perlengkapan Zoom, Mesin Cetak/Fotocopy pada RSUD Raja Ahmad Tabib	404.071.816,00	385.847.499,00	95,49	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Pendukung Operasional Rumah Singgah dan Masjid di RSUD Raja Ahmad Tabib	100.000.000,00	94.515.283,00	94,52	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Habis Pakai Kantor, Belanja Form, Resep, stiker dll, Alat Pos Prangko/Materai/Ampl op/dll pada RSUD Raja Ahmad Tabib	543.855.000,00	535.504.748,00	98,46	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Belanja Cetakan dan Penggandaan Pendukung Pelayanan RSUD	150.000.000,00	147.421.000,00	98,28	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu, Penginapan Tamu, Transportasi Tamu dan	31.920.000,00	30.225.700,00	94,69	-





Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Perjadin Dalam dan Luar Daerah, Makan dan Minum	409.798.349,00	324.061.650,00	79,08	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>16.815.031.300,00</b>	<b>16.405.373.431,00</b>	<b>97,56</b>	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa dan Perlengkapan Surat Menyurat dan Jasa Pengiriman	50.000.000,00	38.891.000,00	77,78	Pemanfaatan belanja pengiriman tidak maksimal karena pembayaran harus tunai
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Pemenuhan Jasa Komunikasi (Telp, Internet dan TV Berbayar), Sumber Daya Air dan Listrik pada RSUD RAT	6.440.761.500,00	6.237.568.052,00	96,85	-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Sewa Mesin Fotocopy dan Mesin Lainnya; Tersedianya Sewa Rumah Dinas dan sewa gudang	118.427.530,00	117.000.000,00	98,79	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada RSUD Raja Ahmad Tabib	10.205.842.270,00	10.011.914.379,00	98,10	
					-
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahandaerah provinsi</b>	<b>358.553.800,00</b>	<b>237.818.255,00</b>	<b>66,33</b>	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas (2 Direktur, 3 Wadir, 4 Pejabat Eselon Lainnya dan 1 Ketua Komite Medik	58.553.800,00	24.978.585,00	42,66	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan (2 Pick Up, 5 Ambulance, 2 Mobil Jenazah, 7 Motor Operasional)	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan (2 Pick Up, 5 Ambulance, 2 Mobil Jenazah, 7 Motor Operasional)	300.000.000,00	212.839.670,00	70,95	



<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<b>151.616.362.337,00</b>	<b>139.169.120.982,00</b>	<b>91,79</b>	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	151.616.362.337,00	139.169.120.982,00	91,79	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>13.691.419.281,00</b>	<b>12.671.692.943,68</b>	<b>92,55</b>	
	<b>2. Status Akreditasi RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib</b>				
	<b>3. Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib</b>				
	<b>4. Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib</b>				
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>8.491.463.974,00</b>	<b>7.728.455.488,00</b>	<b>91,01</b>	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Jasa Rehabilitasi dan Pemeliharaan RS dan Area Sekitar RS pada 1 Tahun RSUD Raja Ahmad Tabib	1.004.002.520,00	955.338.670,00	95,15	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat	Ketersediaan Alkes dan Alat Penunjang	3.983.757.045,00	3.949.440.000,00	99,14	
Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Medik Rumah Sakit Tipe B di RSUD Raja Ahmad Tabib				
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Ketersediaan Kalibrasi Alkes pada RSUD Raja Ahmad Tabib	918.502.908,00	671.619.974,00	73,12	
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Tersedianya Bahan Habis Pakai Non Medis pendukung Kegiatan Laundry , pengadaan Linen pada RSUD RAT	400.000.000,00	399.000.100,00	99,75	
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Ketersediaan Pemeliharaan Alkes dan Alat Penunjang Rumah Sakit Tipe B di RSUD Raja Ahmad	474.759.005,00	417.192.019,00	87,87	



	Tabib				
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Ketersediaan Pengadaan Bahan Makanan dan Minuman Pasien di RSUD Raja Ahmad Tabib	1.710.442.496,00	1.335.864.725,00	78,10	
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>5.156.521.507,00</b>	<b>4.914.480.075,68</b>	<b>95,31</b>	
Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Tersedianya AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) pada RSUD Raja Ahmad Tabib	1.113.621.689,00	880.676.573,00	79,08	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Ketersediaan Pengadaan Bahan, Jasa Kebersihan Gedung dan Pertamanan RSUD Raja Ahmad Tabib	4.042.899.818,00	4.033.803.502,68	99,78	
<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>8.433.800,00</b>	<b>8.257.380,00</b>	<b>97,91</b>	
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Manajemen Rumah Sakit yang Terintegrasi dengan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan	8.433.800,00	8.257.380,00	97,91	
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>58,57</b>	
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Modernisasi RSUD Raja Ahmad Tabib Menjadi RS Rujukan Tertentu (RS Kardiovaskuler)	35.000.000,00	20.500.000,00	58,57	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>16.022.754.653,00</b>	<b>10.876.401.920,00</b>	<b>67,88</b>	



KESEHATAN					
	<b>5. Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat &gt;20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib</b>				
<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>	<b>15.594.347.153,00</b>	<b>10.457.976.260,00</b>	<b>67,06</b>	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya luran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemberi Kerja; Tersedianya Insentif Kondisi atau Kejadian atau Kasus Luar Biasa bagi Karyawan RSUD Raja Ahmad Tabib	15.594.347.153,00	10.457.976.260,00	67,06	
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Tersedianya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>428.407.500,00</b>	<b>418.425.660,00</b>	<b>97,67</b>	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Karyawan yang Mengikuti Pelatihan dan Pendidikan (Dokter, Perawat, Bidan, Radiografer, Laboratorium Operator dan Tenaga Kesehatan Pendukung Lainnya) pada RSUD Raja Ahmad Tabib	266.167.500,00	257.960.000,00	96,92	
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perawat dan Bidan yang Memiliki Sertifikasi pada Area Khusus (IBS,IGD,ICU,PICU,NI CU) pada RSUD Raja Ahmad Tabib	162.240.000,00	160.465.660,00	98,91	

### c. RSUD Engku Haji Daud

Alokasi anggaran pada RSUD Engku Haji Daud pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 85.744.401.404,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 86.006.665.378,00 atau sebesar (100,31%), disajikan pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.2.2.2**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan**  
**Wajib Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
RSUD Engku Haji Daud		85.744.401.404,00	86.006.665.378,00	100,31	
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>5.686.488.605,00</b>	<b>5.176.242.207,00</b>	<b>91,03</b>	
	1. Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud				
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Engku Haji Daud				
<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>		<b>4.800.158.605,00</b>	<b>4.363.572.607,00</b>	<b>90,90</b>	
Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	1.409.838.523,00	1.289.278.040,00	91,45	
Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	215.347.663,00	211.332.000,00	98,14	
Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	34.617.600,00	33.830.000,00	97,72	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2.221.898.000,00	2.059.896.248,00	92,71	
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	918.456.819,00	769.236.319,00	83,75	
<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</b>		<b>800.700.300,00</b>	<b>777.687.000,00</b>	<b>97,13</b>	



Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		800.700.300,00	777.687.000,00	97,13	
<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>		<b>85.629.700,00</b>	<b>34.982.600,00</b>	<b>40,85</b>	
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		85.629.700,00	34.982.600,00	40,85	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		15.791.564.000,00	14.818.648.522,00	<b>93,84</b>	
	<b>3. Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat &gt;20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud</b>				
<b>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</b>		15.715.064.000,00	14.773.048.522,00	94,01	
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15.715.064.000,00	14.773.048.522,00	94,01	
<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</b>		76.500.000,00	45.600.000,00	59,61	
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	76.500.000,00	45.600.000,00	59,61	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>4. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>	64.266.348.799,00	66.011.774.649,00	102,72	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>104.186.900,00</b>	<b>103.155.100,00</b>	<b>99,01</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.452.900,00	79.121.100,00	99,58	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	24.734.000,00	24.034.000,00	97,17	



	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>37.482.900.601,00</b>	<b>37.046.201.343,00</b>	<b>98,83</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36.913.076.601,00	36.516.680.343,00	98,93	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	521.664.000,00	494.004.000,00	94,70	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	48.160.000,00	35.517.000,00	73,75	
Keuangan Akhir Tahun SKPD	SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>467.546.300,00</b>	<b>446.325.819,00</b>	<b>95,46</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	149.991.300,00	149.991.300,00	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	54.334.000,00	48.194.500,00	88,70	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	75.000.000,00	74.996.400,00	100,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	71.100.000,00	69.800.000,00	98,17	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.121.000,00	103.343.619,00	88,24	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>994.705.000,00</b>	<b>978.995.785,00</b>	<b>98,42</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	994.705.000,00	978.995.785,00	98,42	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan</b>	<b>1.826.187.900,00</b>	<b>1.622.755.169,00</b>	<b>88,86</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan	109.645.000,00	62.271.923,00	56,79	
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	199.743.400,00	70.491.300,00	35,29	



Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	200.000.000,00	199.454.346,00	99,73	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud Yang Dipelihara	7.921.600,00	7.000.000,00	88,37	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantoran Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	968.864.000,00	968.861.600,00	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Rehabilitasi	340.013.900,00	314.676.000,00	92,55	
<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>		<b>23.390.822.098,00</b>	<b>25.814.341.433,00</b>	<b>110,36</b>	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD Yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	23.390.822.098,00	25.814.341.433,00	110,36	Penggunaan ambang batas BLUD

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Alokasi anggaran untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 419.838.108.064,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 386.418.211.322,95 atau sebesar (92,04%), disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.2.2.1**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		419.838.108.064,00	386.418.211.322,95	92,04	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		21.614.698.123,00	20.799.234.908,24	96,23	
	1. Jumlah Titik Rawan Banjir				
	2. Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian				
	Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)				
	3. Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%)				





Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Saluran Utama yang Terbangun	10.400.456.158,00	10.129.896.278,57	97,40	
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai terbangun	5.542.956.492,00	5.407.814.414,67	97,56	
Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Normalisasi Sungai/Saluran Utama Lainnya	1.473.400.096,00	1.256.408.498,00	85,27	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya rapat koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	173.006.250,00	128.723.842,00	74,40	
<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang jaringan irigasi terbangun</b>	<b>681.469.200,00</b>	<b>681.469.200,00</b>	<b>100,00</b>	
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi terbangun	681.469.200,00	681.469.200,00	100,00	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>		1.204.198.347,00	1.130.553.186,00	93,88	
	<b>4. Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)</b>				
<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)</b>	<b>1.204.198.347,00</b>	<b>1.130.553.186,00</b>	<b>93,88</b>	
Penyusunan Rencana,	Rencana, Kebijakan, Strategi	902.033.927,00	885.216.029,00	98,14	
Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	dan Teknis SPAM yang tersusun				
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang diperbaiki	204.695.620,00	182.668.557,00	89,24	
Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Terselenggaranya Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	97.468.800,00	62.668.600,00	64,30	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>		<b>17.943.594,00</b>	<b>17.781.940,00</b>	<b>99,10</b>	
	<b>5. Cakupan Pelayanan Persampahan (%)</b>				



Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	17.943.594,00	17.781.940,00	99,10	
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Tersedianya sarana dan prasarana persampahan	17.943.594,00	17.781.940,00	99,10	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>		<b>144.806.125,00</b>	<b>92.095.756,00</b>	<b>63,60</b>	
	<b>6. Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)</b>				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	144.806.125,00	92.095.756,00	63,60	
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	144.806.125,00	92.095.756,00	63,60	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>		<b>357.848.100,00</b>	<b>322.315.820,23</b>	<b>90,07</b>	
	<b>7. Cakupan Pelayanan Drainase (%)</b>				
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kotadan Kawasan Strategis Provinsi	Cakupan Pelayanan Drainase (%)	357.848.100,00	322.315.820,23	90,07	
Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Panjang drainase perkotaan terbangun	357.848.100,00	322.315.820,23	90,07	
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>88.188.423.257,00</b>	<b>79.507.311.760,54</b>	<b>90,16</b>	
	<b>8. Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)</b>				
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ direnovasi/ direnovasi/ dipelihara untuk kepentingan strategis daerah	88.188.423.257,00	79.507.311.760,54	90,16	
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung yang dibangun untuk kepentingan strategis daerah	88.188.423.257,00	79.507.311.760,54	90,16	
<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>		<b>19.656.606.256,00</b>	<b>17.114.234.382,58</b>	<b>87,07</b>	



	<b>9. Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)</b>				
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis	19.656.606.256,00	17.114.234.382,58	87,07	
Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan lingkungan yang ditata	19.656.606.256,00	17.114.234.382,58	87,07	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>		<b>257.452.861.926,00</b>	<b>238.803.576.437,37</b>	<b>92,76</b>	
	<b>10. Persentase jalan kondisibaik (%)</b>				
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase jalan kondisi baik (%)	257.452.861.926,00	238.803.576.437,37	92,76	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang tersusun	9.645.185.033,00	9.358.679.201,00	97,03	
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	9.724.523.794,00	8.382.603.524,00	86,20	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Survey	1.772.388.537,00	1.759.998.986,00	99,30	
Pembangunan Jalan	Panjang jalan terbangun	100.211.577.842,00	95.717.089.895,84	95,52	
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang jalan yang dilebarkan menambah lajur	24.988.336.947,00	24.507.088.303,00	98,07	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	12.934.103.096,00	9.592.751.327,00	74,17	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	8.218.685.775,00	7.953.371.376,71	96,77	
Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan terbangun	13.726.671.827,00	13.035.140.269,82	94,96	
Pembangunan Flyover	Jumlah flyover terbangun	60.946.369.000,00	54.547.084.588,00	89,50	



Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	167.875.400,00	167.875.400,00	100,00	
Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara	3.047.357.952,00	3.037.216.099,00	99,67	
Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah penanggulangan bencana/ tanggap darurat	2.431.054.428,00	2.319.755.512,00	95,42	
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah kabupaten/kota	2.600.021.572,00	1.828.129.776,00	70,31	
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah pengawasan teknis	7.038.710.723,00	6.596.792.179,00	93,72	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>		<b>1.676.518.770,00</b>	<b>1.331.681.949,00</b>	<b>79,43</b>	
	<b>11. Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang</b>				
	<b>Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli</b>				
<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	<b>Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli</b>	<b>1.042.726.125,00</b>	<b>786.716.931,00</b>	<b>75,45</b>	
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi terlatih	622.303.575,00	430.370.583,00	69,16	
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga konstruksi terlatih	256.000.000,00	225.303.645,00	88,01	
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah pertemuan	164.422.550,00	131.042.703,00	79,70	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	377.198.115,00	329.928.629,00	87,47	
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	135.160.106,00	110.126.621,00	81,48	
1.03.11.1.02.02 Penyediaan Perangkat	Terselenggaranya Penyediaan Perangkat	111.072.259,00	103.932.027,00	93,57	
Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				
Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terselenggaranya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	130.965.750,00	115.869.981,00	88,47	
Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan	256.594.530,00	215.036.389,00	83,80	



	Jasa Konstruksi yang tersusun				
Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Rancangan/Draf Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	85.969.670,00	70.585.983,00	82,11	
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Terselenggaranya Pembinaan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	170.624.860,00	144.450.406,00	84,66	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>		<b>3.309.030.188,00</b>	<b>2.135.671.126,00</b>	<b>64,54</b>	
	<b>12. Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)</b>				
<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>	<b>Persentase Proses Revisi RTRW Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)</b>	<b>162.417.800,00</b>	<b>73.301.296,00</b>	<b>45,13</b>	
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	162.417.800,00	73.301.296,00	45,13	
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang</b>	<b>2.521.291.650,00</b>	<b>1.505.360.096,00</b>	<b>59,71</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Tersusunnya Materi Teknis dan Ranperda Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Riau	2.183.410.698,00	1.348.001.414,00	61,74	
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RTRR Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Evaluasi Ranperda tentang RTRW dan RTRR Kab Kota	337.880.952,00	157.358.682,00	46,57	
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang</b>	<b>178.274.800,00</b>	<b>150.586.333,00</b>	<b>84,47</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Laporan Pelaksanaan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	178.274.800,00	150.586.333,00	84,47	
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Terselenggaranya Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>447.045.938,00</b>	<b>406.423.401,00</b>	<b>90,91</b>	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah laporan koordinasi Pelaksanaan	447.045.938,00	406.423.401,00	90,91	



	Penataan Ruang				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI</b>		<b>26.215.173.378,00</b>	<b>25.163.754.057,00</b>	<b>95,99</b>	
	<b>13. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan</b>	<b>442.077.640,00</b>	<b>267.086.582,00</b>	<b>60,42</b>	
<b>Perangkat Daerah</b>	<b>evaluasi kinerja yang tersusun</b>				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun	90.749.600,00	73.201.636,00	80,66	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.787.500,00	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.025.300,00	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	246.377.300,00	133.759.546,00	54,29	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja tersusun	66.137.940,00	60.125.400,00	90,91	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>16.932.514.097,00</b>	<b>16.743.396.638,00</b>	<b>98,92</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.503.933.457,00	15.327.104.038,00	98,86	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.358.126.000,00	1.353.327.200,00	99,65	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70.454.640,00	62.965.400,00	89,37	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.735.700.674,00</b>	<b>2.196.352.817,00</b>	<b>80,28</b>	



Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	17.052.000,00	14.953.480,00	87,69	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	864.972.932,00	843.125.840,00	97,47	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.272.500,00	77.165.380,00	96,13	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	195.500.700,00	187.480.796,00	95,90	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.273.500,00	88.008.000,00	96,42	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	74.907.542,00	27.540.000,00	36,77	
Penyediaan Bahan/ Material	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.570.000,00	132.618.000,00	95,70	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.540.000,00	31.352.500,00	83,52	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.235.611.500,00	794.108.821,00	64,27	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.064.620.970,00</b>	<b>2.034.041.548,00</b>	<b>98,52</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.000.000,00	344.539.000,00	93,12	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	967.957.000,00	966.162.500,00	99,81	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	69.064.900,00	68.970.000,00	99,86	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	607.599.070,00	605.370.048,00	99,63	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.635.189.997,00</b>	<b>3.527.692.882,00</b>	<b>97,04</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.280.200,00	7.499.000,00	61,07	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.346.407,00	444.362.169,00	90,99	



Penyediaan Jasa Peralatandan PerlengkapanKantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	113.612.000,00	91.403.700,00	80,45	
Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.020.951.390,00	2.984.428.013,00	98,79	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah</b>	<b>Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan PemerintahanDaerah</b>	<b>390.070.000,00</b>	<b>380.183.590,00</b>	<b>97,47</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaanandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	156.815.000,00	150.756.590,00	96,14	
Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya	219.022.000,00	216.416.000,00	98,81	
PemeliharaanAset Tetap Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.230.000,00	8.030.000,00	87,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.003.000,00	4.981.000,00	99,56	

#### 4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Alokasi anggaran untuk Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 220.358.678.160 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 215.926.288.743 atau sebesar (97,99%),. Pada urusan wajib Perumahan Dan Kawasan Permukiman tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.4**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman		220.358.678.160,00	215.926.288.742,54	97,99	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>		<b>674.204.000,00</b>	<b>671.599.994,00</b>	<b>99,61</b>	





	ersentase warganegara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni				
	ersentase warganegara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas				
	yediaan rumah yang layak huni				
<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	Jumlah Dokumen Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	300.000.000,00	297.395.994,00	99,13	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	150.000.000,00	149.006.397,00	99,34	
Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	150.000.000,00	148.389.597,00	98,93	
<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	Jumlah Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi Yang Terbangun dan Terehabilitasi	374.204.000,00	374.204.000,00	100,00	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang dihabilitasi	374.204.000,00	374.204.000,00	100,00	
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>		1.921.151.995,00	1.822.700.097,00	94,88	
	<b>3. Persentase RTL yang dibenahi</b>				
	<b>4. Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani</b>				
<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>		<b>209.649.000,00</b>	<b>125.874.097,00</b>	<b>60,04</b>	
	<b>Persentase RTL yang dibenahi</b>				
	<b>Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani</b>				
Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusunnya dokumen penyusunan / review / legalisisasi kebijakan bidang PKP	9.649.000,00	5.795.667,00	60,06	Tidak Tersusunnya Dokumen Kebijakan Bidang PKP di Tahun 2022, dikarenakan Menunggu Revisi Perda RTRW Provinsi Kepri
1.04.03.1.01.09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan	200.000.000,00	120.078.430,00	60,04	



Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman				
<b>Peningkatan Kualitas Kawasan</b>		1.711.502.995,00	1.696.826.000,00	99,14	
<b>Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>					
	<b>Persentase RTL yang dibenahi</b>				
	<b>Persentase luas kawasan kumuh 10 -15 ha yang ditangani</b>				
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15(Lima Belas) Ha	227.320.000,00	222.992.000,00	98,10	
Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh)Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah kawasan pemugaran/peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.484.182.995,00	1.473.834.000,00	99,30	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		<b>202.382.884.666,00</b>	<b>198.894.965.261,54</b>	<b>98,28</b>	
	<b>5. Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)</b>				
Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	202.382.884.666,00	198.894.965.261,54	98,28	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah kebutuhan penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang terbangun	202.382.884.666,00	198.894.965.261,54	98,28	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>15.380.437.499,00</b>	<b>14.537.023.390,00</b>	<b>94,52</b>	
	<b>6. Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>				



<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah yangtersusun	1.001.607.171,00	983.388.392,00	98,18	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD Yang Tersusun	447.275.800,00	439.747.980,00	98,32	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumenevaluasi kinerja perangkat daerah	554.331.371,00	543.640.412,00	98,07	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan Kebutuhan Jasa Administrasi	8.038.452.299,00	7.888.481.105,00	98,13	
Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	7.419.202.299,00	7.276.821.105,00	98,08	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	619.250.000,00	611.660.000,00	98,77	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	447.569.144,00	362.083.532,00	80,90	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kebutuhan pengamanan barangmilik daerah SKPD	163.250.000,00	122.400.000,00	74,98	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kebutuhan koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	184.558.000,00	169.546.434,00	91,87	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kebutuhan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	99.761.144,00	70.137.098,00	70,31	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Pemenuhan kebutuhanadministrasi Kepegawaian	809.294.768,00	683.828.187,00	84,50	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan yang diadakan	217.452.000,00	196.392.825,00	90,32	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kebutuhan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	531.842.768,00	427.435.362,00	80,37	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	Jumlah kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugasdan Fungsi	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	
<b>Administrasi Umum PerangkatDaerah</b>	Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	2.268.648.917,00	1.875.330.838,00	82,66	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	230.137.500,00	228.970.550,00	99,49	
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	96.000.000,00	95.612.000,00	99,60	
Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	63.251.900,00	44.233.270,00	69,93	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	165.217.600,00	149.638.610,00	90,57	
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah kebutuhan Penyediaan Barang Cetakandan	59.574.220,00	54.465.250,00	91,42	



	Penggandaan				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kebutuhan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.160.000,00	35.520.000,00	80,43	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.185.000,00	-	0,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.088.672.025,00	840.774.765,00	77,23	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kebutuhan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	153.793.144,00	106.431.385,00	69,20	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah kebutuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	365.657.528,00	319.685.008,00	87,43	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>883.712.700,00</b>	<b>864.689.000,00</b>	<b>97,85</b>	
1Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	86.780.000,00	86,78	
Pengadaan Mebel	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Mebel	145.895.000,00	145.246.000,00	99,56	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	637.817.700,00	632.663.000,00	99,19	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.324.775.000,00</b>	<b>1.306.812.531,00</b>	<b>98,64</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	6.000.000,00	60,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.600.000,00	205.530.531,00	95,77	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.100.175.000,00	1.095.282.000,00	99,56	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>606.377.500,00</b>	<b>572.409.805,00</b>	<b>94,40</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.560.000,00	75.692.950,00	90,59	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	53.830.000,00	46.792.700,00	86,93	



Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.800.000,00	22.771.800,00	55,81	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.050.000,00	165.000.000,00	99,97	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	263.137.500,00	262.152.355,00	99,63	

## 5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan uraian sebagai berikut

### a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Alokasi anggaran untuk Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran sebesar Rp 21.611.534.265,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 21.417.990.423,00 atau sebesar (99,10%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program sebesar 100% (kategori sangat tinggi). Jumlah indikator program sebanyak 5 indikator dengan capaian semua indikator program kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan wajib Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini



**Tabel 3.2.5.1**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib**  
**Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**  
**Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran**  
**Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Satuan Polisi Pamong Praja		21.611.534.265,00	21.417.990.423,00	99,10	
<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		2.083.448.800,00	2.029.694.254,00	97,42	
	1. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkadadi Provinsi				
	2. Persentase Penegakan pelanggaran Perdatan/atau Perkada				
	3. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		1.493.875.950,00	1.460.020.972,00	97,73	
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan				
	Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pendampingan satlinmas				
	Persentase SM aparaturnya Satpol PP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Jumlah upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah prov kepri	878.844.200,00	862.083.750,00	98,09	



Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Penanganan Unjuk Rasa dan atau Kerusuhan Massa	264.517.300,00	263.681.300,00	99,68	
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	89.413.572,00	88.748.070,00	99,26	
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur yangmendapatkan peningkatan SDM	222.607.308,00	216.427.652,00	97,22	
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen SOP Ketentraman dan Ketertiban Umum yangdisusun	33.793.570,00	29.080.200,00	86,05	
Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan	Jumlah warga negarayang memperoleh layanan akibat dari	4.700.000,00	-	-	
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	penegakan hukumperda dan perkada				
<b>Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</b>	<b>Persentase Penegakan pelanggaran Perdadadan/atau Perkada</b>	315.059.300,00	299.666.700,00	95,11	
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah perda/perkadayang dilakukan pengawasan	264.517.300,00	264.297.300,00	99,92	
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah danPeraturan Gubernur	50.542.000,00	35.369.400,00	69,98	
<b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</b>	<b>Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Provinsi kepri yang terbina</b>	274.513.550,00	270.006.582,00	98,36	
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah PPNS yang mendapatkan pengembangan karier kapasitas	274.513.550,00	270.006.582,00	98,36	
<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA</b>		246.907.500,00	242.295.331,00	98,13	



<b>N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN</b>					
<b>PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>					
	<b>4. Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakan lanjutnya</b>				
<b>Penyelenggaraan pemetaan rawan bencana kebakaran</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan / atau tindakan lanjutnya</b>	99.342.500,00	99.042.700,00	99,70	
Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	99.342.500,00	99.042.700,00	99,70	
<b>Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	<b>Persentase Kabupaten/Kota yg dilakukan pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan</b>	147.565.000,00	143.252.631,00	97,08	
	<b>Penyelamatan Non Kebakaran</b>				
Pembinaan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	147.565.000,00	143.252.631,00	97,08	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		19.281.177.965	19.146.000.838	99,30	
	<b>5. Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	132.126.244,00	128.728.146,00	97,43	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	25.935.740,00	23.684.435,00	91,32	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta khtiar	106.190.504,00	105.043.711,00	98,92	





Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD yangdisusun				
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	12.582.566.851	12.519.109.609	99,50	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12.139.238.851	12.079.721.609	99,51	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya apembayaran Tunjangan Pengelolaan Keuangan	443.328.000	439.388.000	99,11	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	283.516.645,00	281.609.406,00	99,33	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.141.240,00	5.942.900,00	96,77	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.001.000,00	9.734.200,00	97,33	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.715.837,00	26.868.041,00	96,94	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Pemenuhan Barang Cetak	14.995.000,00	14.505.100,00	96,73	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundan g-undangan	9.360.000,00	9.360.000,00	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	215.303.568,00	215.199.165,00	99,95	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Terlaksananya Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	200.000.000,00	199.336.700,00	99,67	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	200.000.000,00	199.336.700,00	99,67	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	5.738.909.125,00	5.674.966.327,00	367,32	
Penyediaan JasaSurat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	194.142.000,00	193.589.000,00	99,72	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	135.000.000,00	92.351.452,00	68,41	



	Listrik				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.048.000,00	14.985.000,00	99,58	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.394.719.125,00	5.374.040.875,00	99,62	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	344.059.100,00	342.250.650,00	99,47	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara, dan terbayar pajak	42.237.400,00	42.204.400,00	99,92	
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara, dan terbayar pajak	74.126.200,00	74.036.600,00	99,88	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Mako dan Pos Terpadu Pol PP	26.761.000,00	26.400.000,00	98,65	
Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor, perlengkapan kantor dan pos terpadu pos PP	200.934.500,00	199.609.650,00	99,34	

#### b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Alokasi anggaran untuk Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada tahun anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp 16.231.184.408,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 15.116.165.401,17 atau sebesar (193,13%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program sebesar 93,54% (kategori sangat tinggi). Jumlah indikator program sebanyak 4 indikator dengan capaian sebanyak 3 indikator program memiliki capaian sangat tinggi dan 1 indikator program dengan capaian rendah. Indikator yang memiliki status rendah yaitu Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan wajib Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan



Masyarakat yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.5.2**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib**  
**Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan**  
**Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah		16.231.184.408,00	15.116.165.401,17	93,13	
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		<b>7.536.276.556,00</b>	<b>6.559.982.425,68</b>	<b>87,05</b>	
	Nilai Prioritas Pencegahan Bencana				Pada Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan Penanganan Darurat Bencana. Rencana Kontijensi per jenis Bencana, Sistem Peringatan Diniserta Perbaikan Darurat Bencana belum dapat dilaksanakan
	Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana				
	Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana				
<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>	<b>Persentase wilayah dengan potensi tinggi yang terlayani informasi bencana</b>	<b>401.943.748,00</b>	<b>397.965.470,00</b>	<b>99,01</b>	
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan bencana Kabupaten/ Kota (Per jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	401.943.748,00	397.965.470,00	99,01	
<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>	<b>Persentase Penanganan Pra Bencana</b>	<b>1.130.961.070,00</b>	<b>858.885.205,68</b>	<b>75,94</b>	
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen rencana penanggulangan	495.310.400,00	271.109.702,00	54,74	



	bencana yang dilegalisasi				
Pengelolaan Risiko Bencana	Jumlah dokumen analisis risiko bencana pada kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana	57.526.100,00	51.991.288,00	90,38	
Penanganan Pasca bencana Provinsi	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana (jitu pasna) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (r3p)	232.725.800,00	212.824.904,68	91,45	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	345.398.770,00	322.959.311,00	93,50	
<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana</b>	<b>5.953.956.338,00</b>	<b>5.258.337.502,00</b>	<b>88,32</b>	
Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	SK penetapan status darurat bencana dan skpdb yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	5.636.528.688,00	4.947.448.261,00	87,77	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	317.427.650,00	310.889.241,00	97,94	
<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal</b>	<b>49.415.400,00</b>	<b>44.794.248,00</b>	<b>90,65</b>	
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	49.415.400,00	44.794.248,00	90,65	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>8.694.907.852,00</b>	<b>8.556.182.975,49</b>	<b>98,40</b>	
	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan</b>				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	311.954.181,00	303.826.651,00	97,39	



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	185.292.500,00	181.098.357,00	97,74	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.039.231,00	41.933.666,00	97,43	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.622.450,00	80.794.628,00	96,62	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	5.615.495.839,00	5.541.499.819,00	98,68	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.254.511.839,00	5.184.065.819,00	98,66	
Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	360.984.000,00	357.434.000,00	99,02	
Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	768.854.644,00	722.241.872,00	93,94	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	156.155.200,00	156.050.379,00	99,93	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	79.422.544,00	77.417.875,00	97,48	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.969.500,00	6.692.000,00	83,97	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.689.900,00	31.596.900,00	99,71	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	493.617.500,00	450.484.718,00	91,26	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.179.473.201,00	1.170.981.943,00	99,28	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	127.001.120,00	119.524.568,00	94,11	



Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	45.130.000,00	44.756.250,00	99,17	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantoryang Disediakan	1.007.342.081,00	1.006.701.125,00	99,94	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	675.129.987,00	673.632.690,49	99,78	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Telaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	137.460.900,00	137.346.325,00	99,92	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3.388.000,00	3.388.000,00	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	534.281.087,00	532.898.365,49	99,74	

## 6. Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Alokasi anggaran untuk Urusan Sosial pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp25.365.908.990,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 25.162.428.091 atau sebesar (99,20%). Pada urusan wajib Sosial tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini

**Tabel 3.2.6**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Sosial Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
<b>SOSIAL</b>		<b>25.365.908.990,00</b>	<b>25.162.428.091,00</b>	<b>99,20</b>	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>2.987.842.506,00</b>	<b>2.973.692.964,00</b>	<b>99,53</b>	
	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial				



	yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas				
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitas				
<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</b>		<b>2.987.842.506,00</b>	<b>2.973.692.964,00</b>	<b>99,53</b>	
	Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang				
	mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas				
	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitas				
<b>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi</b>		<b>50.103.600,00</b>	<b>50.103.600,00</b>	<b>100,00</b>	
	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitas				
<b>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi</b>		<b>196.363.400,00</b>	<b>196.322.000,00</b>	<b>99,98</b>	
	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitas				
<b>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi</b>		<b>2.741.375.506,00</b>	<b>2.727.267.364,00</b>	<b>99,49</b>	
	Jumlah lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas				
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>3.832.042.379,00</b>	<b>3.736.695.202,00</b>	<b>97,51</b>	
	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi				



	sosial didalam panti				
	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				
	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia				
	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial didalam panti				
	Persentase gelandangan pengemis yang mendapatkan pelayanandan rehabilitasi sosial di dalam panti				
	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti				
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyangg Disabilitas Terlantar di dalam Panti</b>		<b>1.625.966.031,00</b>	<b>1.601.381.824,00</b>	<b>98,49</b>	
	Jumlah penyangg disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		1.625.966.031,00	1.601.381.824,00	<b>98,49</b>	
	Jumlah penyangg disabilitas terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				
	Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial penyangg disabilitas yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi				
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti</b>		<b>866.807.858,00</b>	<b>843.422.451,00</b>	<b>97,30</b>	
	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				





	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasisosial anak terlantar yang tersedia				
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses		290.641.556,00	278.261.270,00	<b>95,74</b>	
	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasisosial anak yang tersedia				
	Jumlah ABH dan AMPK yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		576.166.302,00	565.161.181,00	<b>98,09</b>	
	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				
	Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial anakterlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi				
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</b>		<b>1.133.181.088,00</b>	<b>1.091.778.926,00</b>	<b>96,35</b>	
	Jumlah lanjut usia terlantaryang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti				
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		1.133.181.088,00	1.091.778.926,00	<b>96,35</b>	
	Jumlah lanjut usia terlantaryang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasisosial di				



	dalam panti				
	Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan sosial lanjut usia terlantar yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas				
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</b>		<b>22.575.200,00</b>	<b>22.543.200,00</b>	<b>99,86</b>	
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti				
Pemulangan ke DaerahAsal		22.575.200,00	22.543.200,00	<b>99,86</b>	
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial di dalam panti				
<b>Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang</b>		<b>183.512.202,00</b>	<b>177.568.801,00</b>	<b>96,76</b>	
<b>Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</b>					
	Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti				
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		99.270.000,00	93.514.900,00	<b>94,20</b>	
	Jumlah lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas				
	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasisosial di dalam panti				
Pemulangan ke Daerah Asal		84.242.202,00	84.053.901,00	<b>99,78</b>	
	Jumlah korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti				
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>5.643.752.928,00</b>	<b>5.596.350.933,00</b>	<b>99,16</b>	
	<b>Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif</b>				



	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Persentase PMKS ruang lingkup jaminan				
	kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</b>		<b>5.643.752.928,00</b>	<b>5.596.350.933,00</b>	<b>99,16</b>	
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)				
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)				
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				
	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan				
<b>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>		<b>2.852.554.883,00</b>	<b>2.815.991.474,00</b>	<b>98,72</b>	
	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan				



	bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				
	Terevaluasinya pendistribusian raskin/rastra				
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		277.655.103,00	272.322.014,00	<b>98,08</b>	
	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan				
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		2.513.542.942,00	2.508.037.445,00	<b>99,78</b>	
Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP					
Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP					
Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP					
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)				
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)				
	Jumlah keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				
	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan				
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		2.852.554.883,00	2.815.991.474,00	<b>98,72</b>	
	Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial				



	lainnya				
	Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya				
	Jumlah PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial				
	Terevaluasinya pendistribusian raskin/rastra				
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		277.655.103,00	272.322.014,00	<b>98,08</b>	
	Jumlah dokumen data terpadu kesejahteraan sosial yang dipublikasikan				
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		2.513.542.942,00	2.508.037.445,00	<b>99,78</b>	
Jumlah keluarga miskin di wilayah perkotaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP					
Jumlah keluarga miskin di wilayah perdesaan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP					
Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir dan perbatasan yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP					
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan</b>		<b>482.283.123,00</b>	<b>481.096.400,00</b>	<b>99,75</b>	
<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
	Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat daerah				
	Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah				



	Persentase terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		16.229.900,00	16.229.900,00	<b>100,00</b>	
	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		47.185.950,00	46.627.200,00	<b>98,82</b>	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		207.350.649,00	206.766.700,00	<b>99,72</b>	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		211.516.624,00	211.472.600,00	<b>99,98</b>	
	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun				
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>8.779.923.567,00</b>	<b>8.759.445.264,00</b>	<b>99,77</b>	
	Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		8.239.815.567,00	8.219.337.264,00	<b>99,75</b>	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		540.108.000,00	540.108.000,00	<b>100,00</b>	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>58.001.700,00</b>	<b>57.806.900,00</b>	<b>99,66</b>	
	Persentase terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		58.001.700,00	57.806.900,00	<b>99,66</b>	



	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>17.000.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah				
		17.000.000,00	17.000.000,00	<b>100,00</b>	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>895.493.536,00</b>	<b>895.238.535,00</b>	<b>99,97</b>	
	Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		20.895.750,00	20.891.000,00	<b>99,98</b>	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		31.574.500,00	31.574.500,00	<b>100,00</b>	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		86.872.100,00	86.872.100,00	<b>100,00</b>	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		78.057.100,00	78.026.200,00	<b>99,96</b>	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		10.800.000,00	10.800.000,00	<b>100,00</b>	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				
Fasilitasi Kunjungan Tamu		16.802.850,00	16.593.850,00	<b>98,76</b>	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		650.491.236,00	650.480.885,00	<b>100,00</b>	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>174.126.763,00</b>	<b>174.026.763,00</b>	<b>99,94</b>	
	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		58.090.000,00	58.090.000,00	<b>100,00</b>	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		116.036.763,00	115.936.763,00	<b>99,91</b>	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>857.127.134,00</b>	<b>851.761.240,00</b>	<b>99,37</b>	
	Persentase terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				
1.06.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		19.267.000,00	19.200.000,00	<b>99,65</b>	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
1.06.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		62.655.886,00	57.727.789,00	<b>92,13</b>	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
1.06.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		775.204.248,00	774.833.451,00	<b>99,95</b>	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>332.629.164,00</b>	<b>326.631.650,00</b>	<b>98,20</b>	





	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		163.284.950,00	157.295.050,00	<b>96,33</b>	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		57.285.614,00	57.278.000,00	<b>99,99</b>	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		112.058.600,00	112.058.600,00	<b>100,00</b>	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehab				

## 7. Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Alokasi anggaran untuk Urusan Tenaga Kerja pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 30.789.687.932 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 30.109.215.763 atau sebesar (97,79%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 90,24% (kategori tinggi). Jumlah indikator program pada urusan Tenaga Kerja sebanyak 12 indikator, dengan pencapaian sebanyak 7 Indikator program kategori sangat tinggi, sebanyak 2 indikator program kategori tinggi, sebanyak 1 indikator program kategori sedang, 1 indikator program kategori rendah dan sebanyak 1 indikator program kategori sangat rendah. Indikator yang memiliki kategori sangat rendah yaitu Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan. Indikator yang memiliki kinerja kategori rendah yaitu Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja. Indikator program yang memiliki kategori sedang yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).



Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahandan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan Tenaga Kerja tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini

**Tabel 3.2.2.2**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib**  
**Tenaga Kerja Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
<b>Urusan Tenaga Kerja</b>		<b>30.789.687.932,00</b>	<b>30.109.215.763,00</b>	<b>97,79</b>	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		5.182.342.800,00	5.045.297.449,00	97,36	
	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				
	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru				
	Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja				
Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<b>Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>5.152.342.800,00</b>	<b>5.016.947.249,00</b>	<b>97,37</b>	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang dilaksanakan	657.195.900,00	643.251.055,00	97,88	
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK PP)	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi yang dilaksanakan	4.495.146.900,00	4.373.696.194,00	97,30	
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kab/kota yang diukur tingkat	<b>30.000.000,00</b>	<b>28.350.200,00</b>	94,50	



	kompetensi dan produktivitasnya				
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah perusahaan yang mendapat pengukuran dan pembinaan produktivitas	30.000.000,00	28.350.200,00	94,50	
Program Penempatan Tenaga Kerja		65.161.000,00	51.285.368,00	78,71	
	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan				
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)				
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Persentase PMI Memperoleh Pelayanan dan Perlindungan (Pra dan Purna Penempatan)	35.161.000,00	29.996.968,00	85,31	
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah calon pekerja migran yang terlayani	35.161.000,00	29.996.968,00	85,31	
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase pencari kerja melalui informasi pasar kerja	30.000.000,00	21.288.400,00	70,96	
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah data informasi pasar kerja di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau	30.000.000,00	21.288.400,00	70,96	
Program Hubungan Industrial		400.825.600,00	365.809.100,00	91,26	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				a.
	Tingkat upah riil terhadap UMP per jam				
<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada</b>	<b>180.557.300,00</b>	<b>160.553.100,00</b>	<b>88,92</b>	



Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi				
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah laporan hasil mediasi	11.540.000,00	6.237.600,00	54,05	
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah laporan pelaksanaan kerja sama tripartit daerah provinsi	169.017.300,00	154.315.500,00	91,30	
<b>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)</b>	<b>Persentase Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan</b>	<b>220.268.300,00</b>	<b>205.256.000,00</b>	<b>93,18</b>	
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah dokumen rekomendasi hasil penetapan upah minimum provinsi	87.597.200,00	80.400.500,00	91,78	
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah dokumen rekomendasi hasil penetapan upah minimum kabupaten/kota	132.671.100,00	124.855.500,00	94,11	
Program Pengawasan Ketenagakerjaan		716.160.500,00	670.463.918,00	93,62	
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)				
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan				
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani				
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan</b>	<b>Persentase perusahaan yang dilakukan pengawasan</b>	<b>716.160.500,00</b>	<b>670.463.918,00</b>	<b>93,62</b>	



Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan yang diawasi	216.674.000,00	195.914.329,00	90,42	
Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan (UPT PK Batam)	Jumlah Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan yang diawasi	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00	
Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Fasilitas Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan yang dilaksanakan	146.883.900,00	139.016.700,00	94,64	
Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan yang dilaksanakan	60.097.600,00	56.355.639,00	93,77	
Jumlah Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan yang dilaksanakan	Jumlah Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan yang dilaksanakan	166.505.000,00	153.177.250,00	92,00	
Program Perencanaan Tenaga kerja		57.456.000,00	51.311.377,00	89,31	
	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas				
<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Persentase kab/kota yang menyusun perencanaan ketenagakerjaan</b>	<b>57.456.000,00</b>	<b>51.311.377,00</b>	<b>89,31</b>	
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah yang tersusun	57.456.000,00	51.311.377,00	89,31	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		24.367.742.032,00	23.925.048.551,00	98,18	
	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>				
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>21.742.254.532,00</b>	<b>21.506.857.945,00</b>	<b>98,92</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi)	Jumlah pembayarangaji dan tunjangan ASN	21.156.094.532,00	20.939.897.945,00	98,98	



Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pembayaran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	586.160.000,00	566.960.000,00	96,72	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu</b>	<b>83.200.000,00</b>	<b>83.000.000,00</b>	<b>99,76</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	83.200.000,00	83.000.000,00	99,76	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>173.710.000,00</b>	<b>164.892.882,00</b>	<b>94,92</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.250.000,00	155.432.882,00	94,63	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	9.460.000,00	9.460.000,00	100,00	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.668.897.112,00</b>	<b>1.552.669.633,00</b>	<b>93,04</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa suratmenyurat	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	373.533.596,00	322.986.934,00	86,47	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD BLK PP)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	44.320.000,00	37.167.700,00	83,86	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PK Karimun)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	17.475.800,00	16.340.696,00	93,50	



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51.732.116,00	40.611.678,00	78,50	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30.000.000,00	29.985.000,00	99,95	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT PK Batam)	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14.400.000,00	14.257.000,00	99,01	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	909.546.000,00	889.434.625,00	97,79	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD BLK PP)	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.835.000,00	94.484.250,00	93,70	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PK Karimun)	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.219.600,00	25.173.750,00	99,82	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.835.000,00	81.228.000,00	80,56	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas</b>	<b>25.580.000,00</b>	<b>23.455.200,00</b>	<b>91,69</b>	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	15.580.000,00	14.700.200,00	94,35	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	10.000.000,00	8.755.000,00	87,55	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>111.324.000,00</b>	<b>110.395.980,00</b>	<b>99,17</b>	
<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>				
Pengadaan Mebel (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah mebel yang diadakan	75.000.000,00	74.840.000,00	99,79	
Pengadaan Mebel (UPT PK Batam)	Jumlah mebel yang diadakan	3.500.000,00	2.955.980,00	84,46	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	



Transmigrasi)					
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD BLK PP)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	13.750.000,00	13.750.000,00	100,00	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPT PK Karimun)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	2.574.000,00	2.350.000,00	91,30	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>562.776.388,00</b>	<b>483.776.911,00</b>	<b>85,96</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.983.000,00	13.613.780,00	97,36	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPTD BLK PP)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.931.200,00	1.931.200,00	100,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PK Karimun)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.352.600,00	1.352.600,00	100,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.916.000,00	1.702.000,00	58,37	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	24.978.000,00	23.964.389,00	95,94	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPTD BLK PP)	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	1.105.200,00	1.063.200,00	96,20	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT PK Karimun)	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	1.760.900,00	1.760.900,00	100,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	3.651.000,00	2.930.300,00	80,26	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	63.482.750,00	59.512.600,00	93,75	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	7.150.000,00	6.126.770,00	85,69	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan	14.427.738,00	12.869.326,00	89,20	





Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	penggandaan				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PK Karimun)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan	856.000,00	513.600,00	60,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan	5.371.000,00	3.051.000,00	56,81	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.720.000,00	18.720.000,00	100,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (UPT PK Batam)	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.632.000,00	400.000,00	24,51	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	353.163.000,00	296.508.446,00	83,96	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD BLK PP)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	8.213.000,00	5.892.700,00	71,52	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PK Karimun)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	24.803.000,00	19.300.600,00	77,82	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PK Batam)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	13.280.000,00	12.563.000,00	94,60	



## 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 22.091.909.994 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 21.704.535.894 atau sebesar (98,25%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 118,81%. Jumlah indikator program pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 8 indikator, dengan pencapaian sebanyak 6 Indikator program kategori sangat tinggi, dan sebanyak 2 indikator program kategori tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini

**Tabel 3.2.2.2**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan**  
**Wajib Kesehatan RSUD Raja Ahmad Tabib Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		22.091.909.994,00	21.704.535.894,00	98,25	
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
	Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	3.397.104.498,00	3.326.787.432,00	97,93	
	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan				
	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen				
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada	Jumlah Anggaran Responsif Gender (ARG)	61.115.057,00	59.276.620,00	96,99	
Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi					
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan	Dokumen Perencanaan OPD yang Responsif Gender	61.115.057,00	59.276.620,00	96,99	



Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi					
<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	2.234.350.415,00	2.180.332.310,00	97,58	
	Jumlah Organisasi Perempuan yang terbina				
	Jumlah Perempuan Politik yang ditingkatkan kapasitasnya				
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Politik yang ditingkatkan kapasitasnya	516.947.793,00	512.963.173,00	99,23	
	Jumlah Organisasi Perempuan yang terbina				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya di bidang ekonomi	1.717.402.622,00	1.667.369.137,00	97,09	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	Jumlah Perempuan yang mengikuti sekolah perempuan	1.101.639.026,00	1.087.178.502,00	98,69	
	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya				
	Tersedianya Pengembangan Komunikasi, Informasidan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang mengikuti sekolah perempuan	203.879.010,00	199.872.716,00	98,03	
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaku Industri Rumahan yang ditingkatkan kapasitasnya	897.760.016,00	887.305.786,00	98,84	
<b>Program Perlindungan Perempuan</b>					
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan	801.025.500,00	758.974.586,00	94,75	



	Orang (TPPO)				
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO</b>	<b>350.279.300,00</b>	<b>341.438.774,00</b>	<b>97,48</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat	350.279.300,00	341.438.774,00	97,48	
Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	terkait perlindungan perempuan termasuk TPPO				
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan/Layanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan yang difasilitasi Penguatan dan Pengembangannya</b>	<b>127.553.700,00</b>	<b>122.803.128,00</b>	<b>96,28</b>	
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Tersedianya Bantuan Spesifik kepada Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	98.132.500,00	96.550.653,00	98,39	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pertemuan penguatan jejaring gugus tugas PPTPPO dan SPPT PKKTP	29.421.200,00	26.252.475,00	89,23	
<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terlayani</b>	<b>323.192.500,00</b>	<b>294.732.684,00</b>	<b>91,19</b>	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan yang ditindaklanjuti UPTD P2TP2A Prov. Kepri	193.192.500,00	186.140.000,00	96,35	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersedianya operasional layanan korban kekerasan	130.000.000,00	108.592.684,00	83,53	



<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>					
	<b>Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan</b>	2.623.371.027,00	2.579.093.315,00	98,31	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	2.281.514.202,00	2.243.121.015,00	98,32	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	409.350.900,00	400.484.795,00	97,83	
<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas Lifeskill</b>	1.872.163.302,00	1.842.636.220,00	98,42	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk	Jumlah Perempuan yang terlatih untuk peningkatan	341.856.825,00	335.972.300,00	98,28	
Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	ketahanan dan kualitas keluarga				
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan yang ditingkatkan keterampilan / life skill	341.856.825,00	335.972.300,00	98,28	
<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>					
	<b>Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak</b>	<b>26.904.655,00</b>	<b>11.808.676,00</b>	<b>43,89</b>	
<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi</b>	<b>26.904.655,00</b>	<b>11.808.676,00</b>	<b>43,89</b>	
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Data Terpilah Gender dan Anak di Provinsi Kepri	26.904.655,00	11.808.676,00	43,89	
<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>					
	<b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</b>	<b>1.153.618.092,00</b>	<b>1.139.351.687,00</b>	<b>98,76</b>	
<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Forum Anak yg dibina</b>	<b>652.147.392,00</b>	<b>649.138.900,00</b>	<b>99,54</b>	



	<b>Jumlah Puspaga yang dibina dan dikembangkan</b>				
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Puspaga yang dibina dan dikembangkan	652.147.392,00	649.138.900,00	99,54	
pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi					
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah forum anak yang dibina dan dikembangkan</b>	<b>501.470.700,00</b>	<b>490.212.787,00</b>	<b>97,76</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terciptanya lingkungan yang aman dan responsif terhadap anak	264.580.200,00	254.671.472,00	96,25	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatnya kapasitas orangtua terhadap pemenuhan hak anak melalui media publikasi	139.725.000,00	139.286.600,00	99,69	
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang terbentuk	97.165.500,00	96.254.715,00	99,06	
<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>					
	<b>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</b>	<b>939.493.000,00</b>	<b>874.917.772,00</b>	<b>93,13</b>	
<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang</b>	<b>Persentase Penyediaan Layanan bagi anak</b>	<b>132.044.000,00</b>	<b>106.753.052,00</b>	<b>80,85</b>	
<b>Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</b>					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Persentase pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	132.044.000,00	106.753.052,00	80,85	
<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah</b>	<b>Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi anak yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>76.806.000,00</b>	<b>73.597.825,00</b>	<b>95,82</b>	



Kabupaten/Kota					
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitasSDM lembaga penanganan anak	76.806.000,00	73.597.825,00	95,82	
<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase desa / kelurahan yang terbentuk PATBM</b>	<b>730.643.000,00</b>	<b>694.566.895,00</b>	<b>95,06</b>	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan	Terlaksananya PelatihanPATBM	549.826.000,00	514.355.250,00	93,55	
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Rapat sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak	180.817.000,00	180.211.645,00	99,67	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>					
	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>	13.150.393.222,00	13.013.602.426,00	98,96	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah teradministrasi dengan baik</b>	58.440.000,00	58.440.000,00	100,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	58.440.000,00	58.440.000,00	100,00	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Disiplin Pegawai</b>	60.900.000,00	60.550.000,00	99,43	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan	60.900.000,00	60.550.000,00	99,43	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyelesaian Laporan Keuangan</b>	9.269.114.342,00	9.199.091.131,00	99,24	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	8.787.296.342,00	8.736.249.131,00	99,42	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	466.818.000,00	451.028.000,00	96,62	



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan	15.000.000,00	11.814.000,00	78,76	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	929.907.644,00	905.705.826,00	97,40	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.924.000,00	13.120.000,00	94,23	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.662.800,00	74.190.000,00	98,05	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	56.405.144,00	53.430.658,00	94,73	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	91.784.800,00	88.951.612,00	96,91	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	248.210.500,00	236.428.900,00	95,25	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.980.000,00	26.880.000,00	89,66	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah dan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	413.940.400,00	412.704.656,00	99,70	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara sesuai rencana kebutuhan</b>	560.657.700,00	542.495.704,00	96,76	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa	71.260.000,00	69.172.000,00	97,07	
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	184.023.600,00	179.817.300,00	97,71	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan Kebutuhan pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	23.670.000,00	22.830.000,00	96,45	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	281.704.100,00	270.676.404,00	96,09	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber	2.248.094.337,00	2.224.209.065,00	98,94	





	daya air dan listrik				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor	198.310.905,00	181.726.338,00	91,64	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor ( Gaji PTT dan THL )	144.100.000,00	137.808.000,00	95,63	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah	1.905.683.432,00	1.904.674.727,00	99,95	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.279.199,00	23.110.700,00	99,28	

## 9. Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan. Alokasi anggaran untuk Urusan Pangan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 21.498.941.309,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp20.928.008.445,00 atau sebesar (97,34%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 125,22%. Jumlah indikator program pada urusan Pangan sebanyak 6 indikator, dengan pencapaian semua Indikator program kategori sangat tinggi. Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan Pangan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.9**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Pangan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pangan		21.498.941.309,00	20.928.008.445,00	97,34	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1.104.175.750,00	934.840.588,00	84,66	



	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan				
	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen				
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi				
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Persentase jumlah daerah yang di analisis ketersediaan bahan pangan	846.000.550,00	705.927.879,00	83,44	
Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	114.808.550	107.628.388	93,75	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok yang dikembangkan	731.192.000,00	598.299.491,00	81,83	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan	130.000.000,00	122.275.557,00	94,06	
	Persentase ketersediaan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) terhadap daerah rentan pangan				
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan yang di kembangkan	100.000.000,00	92.951.600,00	92,95	
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Lumbung yang dipelihara	30.000.000,00	29.323.957,00	97,75	
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah Kelompok yang menerapkan pola B2SA	128.175.200,00	106.637.152,00	83,2	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah laporan Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	128.175.200,00	106.637.152,00	83,2	
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>		<b>42.879.000</b>	<b>31.407.900</b>	<b>73,25</b>	
	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan				



<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Persentase Total Daerah yang diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan</b>	<b>42.879.000</b>	<b>31.407.900</b>	<b>73,25</b>	
	Persentase daerah yang dilakukan pemantauan situasi ketahanan pangan dan gizi (SKPG)				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Laporan Pemantauan Ketahanan Pangan dan Gizi	42.879.000	31.407.900	73,25	
	Jumlah Daerah yang diintervensi Penanganan Kerawanan Pangan				
<b>Program Pengawasan Keamanan Pangan</b>		<b>199.800.000,00</b>	<b>193.724.900,00</b>	<b>96,96</b>	
	<b>Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman</b>				
<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman</b>	<b>199.800.000,00</b>	<b>193.724.900,00</b>	<b>96,96</b>	
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah dokumen pendukung kelembagaan keamanan pangan	199.800.000,00	193.724.900,00	96,96	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>20.152.086.559,00</b>	<b>19.768.035.057,00</b>	<b>98,09</b>	
	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi</b>	<b>Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	<b>117.082.324,00</b>	<b>94.115.968,00</b>	<b>80,38</b>	
<b>Kinerja Perangkat Daerah</b>					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.023.400,00	21.824.000,00	72,69	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	87.058.924,00	72.291.968,00	83,04	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan yang tersusun</b>	<b>16.233.252.307,00</b>	<b>16.055.068.595,00</b>	<b>98,90</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan PNS	15.669.924.307,00	15.507.573.675,00	98,96	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pemenuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN	563.328.000,00	547.494.920,00	97,19	



<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	787.222.260,00	678.280.538,00	86,16	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.207.100,00	13.675.701,00	96,26	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	208.457.900,00	204.820.524,00	98,26	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	11.994.000,00	11.290.920,00	94,14	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	15.994.500,00	15.385.190,00	96,19	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	12.254.150,00	94,26	
Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Pemenuhan bahan bacaan dan	8.000.000,00	6.000.000,00	75,00	
Peraturan Perundang-undangan	peraturan perundang-undangan				
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Pemenuhan Fasilitas Tamu	10.900.000,00	10.864.000,00	99,67	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	359.317.260,00	262.358.454,00	73,02	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Jasa Penunjang</b>	2.555.347.272,00	2.521.487.986,00	98,67	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	309.713.840,00	287.378.518,00	92,79	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Administrasi Kantor	2.194.133.432,00	2.182.609.468,00	99,47	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik daerah yang terpelihara</b>	<b>459.182.396,00</b>	<b>419.081.970,00</b>	<b>91,27</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/Operasional	325.701.636,00	296.296.008,00	90,97	



Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	113.639.100,00	103.510.492,00	91,09	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	19.841.660,00	19.275.470,00	97,15	

## 10. Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Alokasi anggaran untuk Urusan Pertanahan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 189.052.848,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 91.384.131,00 atau sebesar (48,34%), pada urusan wajib Pertanahan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.10**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Pertanahan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
<b>Pertanahan</b>		189.052.848,00	91.384.131,00	48,34%	
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%)	189.052.848,00	91.384.131,00	48,34%	
<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>Persentase Jumlah OPD/Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi</b>	<b>189.052.848,00</b>	<b>91.384.131,00</b>	<b>48,34%</b>	
Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah OPD/Kab/Kota yang mengajukan permohonan penetapan lokasi yang terfasilitasi	189.052.848,00	91.384.131,00	48,34%	

## 11. Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alokasi anggaran untuk Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 28.445.718.115,00 dengan penyerapan anggaran



pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 27.887.635.771,00 atau sebesar (98,04%), pada urusan Lingkungan Hidup tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.10**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Lingkungan Hidup		28.445.718.115,00	27.887.635.771,00	98,04	
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	441.652.000,00	395.423.224,00	89,53	
Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Laporan Dokumen Lingkungan Hidup	441.652.000,00	395.423.224,00	89,53	
Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLP untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko LH	441.652.000,00	395.423.224,00	89,53	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		444.314.800,00	370.455.645,00	83,38	
	Indeks Kualitas Air Laut				
	Indeks Kualitas Air				
	Indeks Kualitas Udara Ambien				
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan				
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	394.914.800,00	321.055.645,00	81,30	
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengamatan: (1) Air Bersih, (2) Udara Ambien, (3) Tutupan Lahan, dan (4) Air Laut	100.000.000,00	90.950.100,00	90,95	



Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan	Terlaksananya: (1) Penyusunan Inventarisasi GRK, dan (2) Pembinaan Kampung Iklim	200.000.000,00	190.140.968,00	95,07	
Adaptasi Perubahan Iklim					
Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi (UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	94.914.800,00	39.964.577,00	42,11	
<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Jumlah Laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>49.400.000,00</b>	<b>49.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	
Sub Kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkelolanya Limbah Sludge Oil di Kawasan Pesisir	49.400.000,00	49.400.000,00	100,00	
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Perusahaan yang Taat Aturan</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>132.325.948,00</b>	<b>88,22</b>	
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau	150.000.000,00	132.325.948,00	88,22	
Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga	Terlaksananya Pengawasan Tingkat Ketaatan Peraturan LH	150.000.000,00	132.325.948,00	88,22	
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>70.946.600,00</b>	<b>94,60</b>	
	<b>Persentase Pengurangan Sampah</b>				
	<b>Persentase Penanganan Sampah</b>				
<b>Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST</b>	<b>Jumlah Penanganan Sampah di TPA/TPST</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>70.946.600,00</b>	<b>94,60</b>	



<b>Regional</b>					
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Penyediaan Prasarana dan Sarana TPA di Provinsi Kepulauan Riau	75.000.000,00	70.946.600,00	94,60	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	27.334.751.315,00	26.918.484.354,00	98,48	
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD.</b>	<b>78.368.150,00</b>	<b>75.925.282,00</b>	<b>96,88</b>	
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya rencana kerja OPD	40.437.000,00	38.023.282,00	94,03	
	Tersedianya LakipOPD				
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	37.931.150,00	37.902.000,00	99,92	
	Tersedianya website Lingkungan Hidup				
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhi nya Gaji dan Tunjangan, serta Administrasi Keuangan ASN</b>	<b>24.434.333.858,00</b>	<b>24.072.578.622,00</b>	<b>98,52</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gajidan Tunjangan ASN	24.008.563.858,00	23.656.642.622,00	98,53	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	425.770.000,00	415.936.000,00	97,69	
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pangadministrasi an Kantor</b>	<b>477.220.259,00</b>	<b>468.361.102,00</b>	<b>98,14</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	20.724.000,00	20.423.600,00	98,55	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Penyediaan Alat- alat Pelindung Diri	157.491.300,00	152.511.290,00	96,84	





Kantor	Covid 19				
	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor				
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD KPHP UNIT IV BINTAN-TPI)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan Kantor	57.900.000,00	55.560.000,00	95,96	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Pemenuhan Bahan Bacaan Kantor	20.520.000,00	20.520.000,00	100,00	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Fasilitas Kunjungan Tamu	24.392.000,00	23.917.400,00	98,05	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.792.959,00	191.543.812,00	99,87	
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Penata Usahaan Arsip	4.400.000,00	3.885.000,00	88,30	
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>	<b>Terpenuhi akebutuhan Pelayanan Kantor</b>	<b>1.835.717.048,00</b>	<b>1.826.620.060,00</b>	<b>99,50</b>	
<b>Pemerintahan Daerah</b>					
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rutinitas Kantor	3.000.000,00	2.942.500,00	98,08	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Air Bersih	15.180.000,00	9.557.500,00	62,96	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.817.537.048,00	1.814.120.060,00	99,81	
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>209.112.000,00</b>	<b>205.981.200,00</b>	<b>98,50</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	185.310.000,00	184.283.200,00	99,45	



Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23.802.000,00	21.698.000,00	91,16	
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>269.018.088,00</b>	<b>89,67</b>	
<b>Perangkat Daerah</b>	<b>pelatihan Pegawai</b>				
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi(UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Terlaksananya Pelatihan/ In House Training SDM Laboratorium Lingkungan	300.000.000,00	269.018.088,00	89,67	

## 12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Alokasi anggaran untuk Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.382.791.649,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 1.247.197.636,00 atau sebesar (90,19%), pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.01.12**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.382.791.649,00	1.247.197.636,00	90,19	
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang tertib melaporkan datapelayanan pendaftaran penduduk</b>	374.988.500,00	319.729.609,00	85,26	
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan</b>	Jumlah Disdukcapil Kab/Kota yang mendapat pengawasan, pembinaan dan	374.988.500,00	319.729.609,00	85,26	



	bimbingan terkait administrasi kependudukan				
Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait	374.988.500,00	319.729.609,00	85,26	
terkait Pendaftaran Penduduk	Pendaftaran Penduduk				
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)</b>	265.000.000,00	246.297.445,00	92,94	
<b>Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Jumlah Disdukcapil Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait administrasi Pencatatan Sipil	265.000.000,00	246.297.445,00	92,94	
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	265.000.000,00	246.297.445,00	92,94	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Kab/Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri</b>	<b>742.803.149,00</b>	<b>681.170.582,00</b>	<b>91,70</b>	
<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi</b>	Jumlah Kab/Kota dengan Database Kependudukan yang valid dan akurat	742.803.149,00	681.170.582,00	91,70	
Fasilitasi terkait pengelolaan informasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan	742.803.149,00	681.170.582,00	91,70	

### 13. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 32.229.370.116,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 31.690.621.855,00 atau sebesar (98,33%), pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.2.01.13**  
**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		32.229.370.116,00	31.690.621.855,00	98,33	
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTA HANDESA</b>	<b>Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desayang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes</b>	<b>45.027.000,00</b>	<b>44.805.396,00</b>	<b>99,51</b>	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	45.027.000,00	44.805.396,00	99,51	
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	45.027.000,00	44.805.396,00	99,51	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan</b>	<b>21.006.149.125,00</b>	<b>20.625.606.711,00</b>	<b>98,19</b>	
<b>LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>peningkatan kapasitas</b>				
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/ Kota yang mendapat pembinaan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi desa	21.006.149.125,00	20.625.606.711,00	98,19	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga	17.471.595.200,00	17.122.549.658,00	98,00	



Lembaga kemasyarakatan Desa /Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	224.719.300,00	222.723.200,00	99,11	
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya				
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	750.194.900,00	749.748.290,00	99,94	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	736.318.725,00	729.735.349,00	99,11	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.823.321.000,00	1.800.850.214,00	98,77	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>	11.178.193.991,00	11.020.209.748,00	98,59	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun</b>	299.737.000,00	299.271.939,00	99,84	



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.383.000,00	16.345.000,00	99,77	
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.376.400,00	37.154.480,00	99,41	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.977.600,00	245.772.459,00	99,92	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang Terpenuhi Hak Keuangannya</b>	8.394.419.116,00	8.272.824.495,00	98,55	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.963.103.116,00	7.864.218.495,00	98,76	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	431.316.000,00	408.606.000,00	94,73	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya peningkatan profesionalis meaparatur</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>67,78</b>	<b>terkena refocusing anggaran</b>
Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000,00	3.050.000,00	67,78	terkena refocusing anggaran
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Kantor</b>	<b>881.389.275,00</b>	<b>859.983.219,00</b>	<b>97,57</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Jumlah Paket Komponen Instalasi	5.004.000,00	5.001.000,00	99,94	
/Penerangan Bangunan Kantor	Liastrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	112.730.600,00	112.538.761,00	99,83	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	50.852.000,00	46.879.900,00	92,19	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	80.000.000,00	79.960.000,00	99,95	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.450.000,00	12.439.000,00	99,91	



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	620.352.675,00	603.164.558,00	97,23	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Aset yang Diadakan</b>	179.709.700,00	179.543.400,00	99,91	
Pengadaan dan Peralatan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	179.709.700,00	179.543.400,00	99,91	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan</b>	1.230.800.900,00	1.222.943.305,00	99,36	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	8.584.960,00	95,39	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	28.330.000,00	28.330.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30.420.900,00	30.420.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.163.050.000,00	1.155.608.345,00	99,36	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Sarana Prasarana Kondisi Baik</b>	<b>187.638.000,00</b>	<b>182.593.390,00</b>	<b>97,31</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	162.098.000,00	157.124.540,00	96,93	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25.540.000,00	25.468.850,00	99,72	



#### 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Alokasi anggaran untuk Urusan Pember Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 387.453.675,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp359.989.801,00 atau sebesar (92,91%), pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.2.01.14**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib**  
**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		387.453.675,00	359.989.801,00	92,91	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>					
	Contraceptive Prevalence Rate	10.000.000,00	8.252.780,00	82,53	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersusunnya dokumen terkait penyerasian kebijakan pembangunan daerah dengan program KKBPK	10.000.000,00	8.252.780,00	82,53	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand	Jumlah dokumen grand design	10.000.000,00	8.252.780,00	82,53	
Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	pembangunan kependudukan (GDPK) yang tersusun dan termanfaatkan				
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA</b>					
	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	377.453.675,00	351.737.021,00	93,19	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	Jumlah mitra dan organisasi dan kemasyarakatan yang	309.233.775,00	286.251.021,00	92,57	





<b>Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>berpartisipasi dalam pemberdayaan dan pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</b>				
Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kelompok yang mendapatkan pemberdayaan Ekonomi keluarga	122.145.775,00	104.838.831,00	85,83	
Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB	Jumlah pelaksanaan fasilitasi pengembangan program ketahanan keluarga di kampung KB	187.088.000,00	181.412.190,00	96,97	
<b>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Keluarga Terlatih</b>	<b>68.219.900,00</b>	<b>65.486.000,00</b>	<b>95,99</b>	
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Pelaksanaan fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	68.219.900,00	65.486.000,00	95,99	

## 15. Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Alokasi anggaran untuk Urusan Pangan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 88.823.574.588,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 83.524.434.815,51 atau sebesar (94,03%), pada urusan Perhubungan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.15**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Perhubungan Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Perhubungan		88.823.574.588,00	83.524.434.815,51	94,03	



<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>		1.627.000.406,00	1.610.878.002,93	99,01	
	<b>Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)</b>				
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalandi Jalan Provinsi</b>	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.351.696.406,00	1.337.412.254,93	98,94	
Penyediaan Perlengkapan Jalandi Jalan Provinsi	Tersedianya perlengkapan jalan di jalan provinsi	1.194.868.000,00	1.184.610.552,78	99,14	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Fasilitas prasarana jalan dalam kondisi baik	156.828.406,00	152.801.702,15	97,43	
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</b>	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	137.504.000,00	136.755.875,00	99,46	
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	69.068.000,00	68.439.067,00	99,09	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	68.436.000,00	68.316.808,00	99,83	
<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</b>	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	68.966.000,00	67.879.300,00	98,42	
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	68.966.000,00	67.879.300,00	98,42	
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	Persentase Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	68.834.000,00	68.830.573,00	100,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	68.834.000,00	68.830.573,00	100,00	
<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>		69.542.448.062,00	64.693.358.607,10	93,03	
	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga				



	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan				
<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi</b>	Persentase Pemenuhan Izin Usaha Angkutan Laut Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	92.462.500,00	92.106.760,00	99,62	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan	92.462.500,00	92.106.760,00	99,62	
<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional</b>	Persentase Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	7.720.351.000,00	7.567.426.713,00	98,02	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	7.720.351.000,00	7.567.426.713,00	98,02	
<b>Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</b>	Persentase Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	246.591.500,00	246.362.581,00	99,91	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	246.591.500,00	246.362.581,00	99,91	



<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</b>	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	92.441.500,00	92.373.998,00	99,93	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	92.441.500,00	92.373.998,00	99,93	
<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	Persentase Pelabuhan Komersial/Niaga Terbangun/Meningkat Kapasitasnya	60.573.655.938,00	55.878.142.931,10	92,25	
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1.694.292.300,00	1.689.661.531,00	99,73	
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Pelabuhan Pengumpan Regional terbangun	51.685.510.111,00	47.671.780.142,17	92,23	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (DINAS)	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	7.193.853.527,00	6.516.701.257,93	90,59	
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (UPT 1-BATAM)	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (UPT 2-KARIMUN)	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (UPT 3-TPI BINTAN)	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional (UPT 4-	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				



NATUNA ANAMBAS)					
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional(UPT 5-LINGGA)	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara				
<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri(TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional</b>	Tersedianya dokumen Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	816.945.624,00	816.945.624,00	100,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbayarnya Hutang Belanja	816.945.624,00	816.945.624,00	100,00	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>17.654.126.120,00</b>	<b>17.220.198.205,48</b>	<b>97,54</b>	
	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	407.797.755,00	398.329.620,00	97,68	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	46.652.664,00	43.580.077,00	93,41	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen RKA - SKPD	121.364.500,00	118.209.171,00	97,40	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan dokumen koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	84.494.000,00	82.464.189,00	97,60	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	155.286.591,00	154.076.183,00	99,22	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>11.449.236.869,00</b>	<b>11.318.124.745,00</b>	<b>98,85</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	10.522.889.478,00	10.398.229.833,00	98,82	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	832.292.147,00	831.796.000,00	99,94	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.842.500,00	44.194.400,00	94,35	



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semester anyang tersusun	47.212.744,00	43.904.512,00	92,99	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	92.000.000,00	90.396.000,00	98,26	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	92.000.000,00	90.396.000,00	98,26	
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	109.759.136,00	103.672.866,00	94,45	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	63.302.880,00	59.292.166,00	93,66	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	46.456.256,00	44.380.700,00	95,53	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Aparatur yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	434.689.000,00	420.750.530,00	96,79	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibuat	132.800.000,00	132.409.680,00	99,71	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kerja Pegawai yang Tersusun	135.889.000,00	135.720.850,00	99,88	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	24.000.000,00	13.120.000,00	54,67	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis	142.000.000,00	139.500.000,00	98,24	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.669.365.215,00	1.483.898.121,00	88,89	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.995.000,00	14.209.105,00	71,06	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	354.642.500,00	335.472.237,00	94,59	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan	162.013.700,00	111.188.700,00	68,63	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	38.880.000,00	38.840.000,00	99,90	



Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	135.300.000,00	93.319.500,00	68,97	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	958.534.015,00	890.868.579,00	92,94	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	166.484.350,00	166.121.000,00	99,78	
Pengadaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan mesin yang diadakan	91.484.350,00	91.121.000,00	99,60	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang disediakan	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.599.089.625,00	2.549.437.564,00	98,09	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.000.000,00	25.118.307,00	73,88	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	151.128.500,00	121.718.657,00	80,54	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Peralatan dan Perlengkapan	192.000.000,00	191.488.000,00	99,73	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	2.221.961.125,00	2.211.112.600,00	99,51	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	725.704.170,00	689.467.759,48	95,01	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	494.688.970,00	464.296.652,00	93,86	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang terpelihara	108.730.000,00	108.155.600,00	99,47	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya terpelihara/terehab	72.285.200,00	67.201.740,00	92,97	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terpelihara/terehab	50.000.000,00	49.813.767,48	99,63	

## 16. Komnuikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Alokasi anggaran untuk Urusan Komunikasi Dan Informatika pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 48.318.047.462,00 dengan penyerapan



anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 48.006.023.659,00 atau sebesar (99,35%), pada urusan Komunikasi Dan Informatika tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.16**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Komunikasi dan Informatika		48.318.047.462,00	48.006.023.659,00	99,35	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		28.940.694.975,00	28.834.142.995,00	99,63	
	Nilai keterbukaan informasi publik				
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi				
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	28.940.694.975,00	28.834.142.995,00	99,63	
	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan				
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan monitoring dan aspirasi publik	267.771.570,00	253.497.512,00	94,67	
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi	Jumlah dokumen konten media komunikasi publik	2.078.673.352,00	2.067.638.475,00	99,47	





Publik	yang diproduksi				
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang telah dikelola dengan baik	2.007.222.799,00	1.991.148.112,00	99,2	
Layanan hubungan media	Jumlah layanan hubungan media	17.571.965.329,00	17.549.991.471,00	99,87	
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah perangkat daerah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	210.143.200,00	199.506.704,00	94,94	
Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah mitra strategis Pemda termasuk media lokal yang melaksanakan	5.123.744.785,00	5.113.569.968,00	99,8	
	diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah				
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah laporan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	50.000.000,00	49.348.500,00	98,7	
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan tata kelola komisi informasi Daerah	895.173.940,00	873.442.253,00	97,57	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dukungan administratif, keuangan dan tata kelola KPID Provinsi Kepri	736.000.000,00	736.000.000,00	100	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>		<b>7.008.802.658,00</b>	<b>6.876.411.406,00</b>	<b>98,11</b>	
	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				
	Persentase Perangkat daerah yang terhubung				
	dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerinta	<b>Persentase kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintah provinsi yang diselenggarakan</b>	<b>4.563.825.354,00</b>	<b>4.552.081.844,00</b>	<b>99,74</b>	



daerah provinsi	secara daring dengan memanfaatkan domain instansi penyelenggaraan negara				
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar				
Penatalaksanaan dan Pengawasan	Jumlah laporan Penatalaksanaan dan pengawasan kegiatan, kelembagaan dan pelayanan publik pada pemerintah provinsi yang diselenggarakan	57.817.060,00	55.813.668,00	96,53	
Penyelenggaraan memanfaatkan Pemerintah Daerah domain instansi		4.506.008.294,00	4.496.268.176,00	99,78	
	penyelenggara Jumlah Perangkat Daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah				
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kegiatan Pengelolaan e - government di lingkup pemerintahan Provinsi		2.444.977.304,00	2.324.329.562,00	95,07	



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan ekosistem SPBE	128.052.200,00	117.743.770,00	91,95	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>	12.368.549.829,00	12.295.469.258,00	99,41	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.942.925.531,00	8.888.547.360,00	99,39	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.416.589.531,00	8.382.971.360,00	99,60	
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN yang menerima Administrasi Pelaksanaan tugas	526.336.000,00	505.576.000,00	96,06	
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat berdasarkan tugas dan fungsi	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	678.429.716,00	676.648.230,00	99,74	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.721.800,00	9.626.052,00	99,02	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	27.244.000,00	27.136.843,00	99,61	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kanto	78.775.100,00	78.694.963,00	99,90	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.660.600,00	38.546.862,00	97,19	
Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan kunjungan tamu	49.150.000,00	48.980.000,00	99,65	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	473.878.216,00	473.663.510,00	99,95	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.015.768,00	114.586.250,00	97,92	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	99.909.768,00	98.224.850,00	98,31	



Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Dinas Jabatan yang				
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	17.106.000,00	16.361.400,00	95,65	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Telsaksanakan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	180.000.000,00	177.649.647,00	98,69	
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	180.000.000,00	177.649.647,00	98,69	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.266.647.400,00	2.257.160.950,00	99,58	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	2.266.647.400,00	2.257.160.950,00	99,58	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan Perangkat Daerah	166.531.414,00	163.876.821,00	98,41	
	Persentase terlaksananya Penganggaran Perangkat Daerah				
	Persentase terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	78.591.014,00	77.893.100,00	99,11	
Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	87.940.400,00	85.983.721,00	97,77	

## 17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Alokasi anggaran untuk Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 21.468.333.653,00



dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 19.948.617.207,00 atau sebesar (92,92%), pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.17**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Koperasi**  
**Usaha Kecil dan menengah Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		21.468.333.653,00	19.948.617.207,00	92,92	
<b>PROGRAM PELAYANAN IZINUSAHA SIMPAN PINJAM</b>	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	104.000.000,00	98.143.287,00	94,37	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah KSP/USP Yang mendapatkan fasilitasi penerbitan izin usaha	104.000.000,00	98.143.287,00	94,37	
Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan KantorKas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah KSP/USP yang mendapatkan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	104.000.000,00	98.143.287,00	94,37	
	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	409.126.402,00	394.915.565,00	96,53	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	409.126.402,00	394.915.565,00	96,53	
Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	jumlah koperasi yang diberikan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan	409.126.402,00	394.915.565,00	96,53	



Restrukturisasi Usaha	Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan</b>	<b>409.126.402,00</b>	<b>394.915.565,00</b>	<b>96,53</b>	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	409.126.402,00	394.915.565,00	96,53	
Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	jumlah koperasi yang diberikan Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	409.126.402,00	394.915.565,00	96,53	
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	jumlah Koperasi yang mendapatkan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	-	#VALUE!	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Rasio Wirausaha Baru</b>	<b>1.174.442.375,00</b>	<b>1.050.993.790,00</b>	<b>89,49</b>	
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Wirausaha Baru	1.174.442.375,00	1.050.993.790,00	89,49	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Rasio Wirausaha Baru</b>	<b>1.174.442.375,00</b>	<b>1.050.993.790,00</b>	<b>89,49</b>	
Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan,	Jumlah Wirausaha Baru	1.174.442.375,00	1.050.993.790,00	89,49	



Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					
Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah wirausaha yang mendapatkan pemberdayaan usaha	1.174.442.375,00	1.050.993.790,00	89,49	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	Persentase UMKM yang dikembangkan	5.167.484.041,00	4.222.508.831,00	81,71	Target terlalu tinggi, Anggaran kurang memadai.
2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang dikembangkan	5.167.484.041,00	4.222.508.831,00	81,71	Target terlalu tinggi, Anggaran kurang memadai.
2.17.08.1.01.01 Produksi dan	jumlah UMKM yang mendapatkan	5.167.484.041,00	4.222.508.831,00	81,71	Anggaran yang kurang memadai
Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	dukungan dan fasilitasi peningkatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				
Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	dukungan dan fasilitasi peningkatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				
<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan</b>	<b>2.819.964.000,00</b>	<b>2.621.740.156,00</b>	<b>92,97</b>	
	<b>Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan</b>				
2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pelatihan	1.090.200.000,00	987.974.895,00	90,62	
2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	1.090.200.000,00	987.974.895,00	90,62	



Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				
2.17.05.1.02 Peningkatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	1.729.764.000,00	1.633.765.261,00	94,45	
2.17.05.1.02.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	1.729.764.000,00	1.633.765.261,00	94,45	
<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi yang diawasi</b>	<b>101.424.500,00</b>	<b>98.411.500,00</b>	<b>97,03</b>	
2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diawasi	101.424.500,00	98.411.500,00	97,03	
2.17.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	101.424.500,00	98.411.500,00	97,03	
<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>39.716.300,00</b>	<b>79,43</b>	
2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	jumlah koperasi yang mendapatkan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	50.000.000,00	39.716.300,00	79,43	
2.17.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi	50.000.000,00	39.716.300,00	79,43	





<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	11.641.892.335,00	11.422.187.778,00	98,11	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri</b>	<b>49.850.284,00</b>	<b>49.615.984,00</b>	<b>99,53</b>	
Penyusunan Perencanaan KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	49.850.284,00	49.615.984,00	99,53	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>83.705.000,00</b>	<b>79.973.000,00</b>	<b>95,54</b>	
Pengadaan PakaianDinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	58.705.000,00	55.200.000,00	94,03	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	25.000.000,00	24.773.000,00	99,09	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.790.339.155,00</b>	<b>7.683.548.350,00</b>	<b>98,63</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN	7.273.429.155,00	7.170.124.625,00	98,58	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honor Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas	436.910.000,00	434.290.000,00	99,40	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester	80.000.000,00	79.133.725,00	98,92	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>1.465.877.338,00</b>	<b>1.379.344.304,00</b>	<b>94,10</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan untuk kantor	10.000.000,00	9.986.226,00	99,86	
Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	647.690.816,00	618.624.710,00	95,51	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor	15.210.000,00	15.202.560,00	99,95	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.364.095,00	115.735.795,00	96,96	
Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan / penggandaan	38.000.000,00	37.770.525,00	99,40	
Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	561.612.427,00	508.647.088,00	90,57	



Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang dioperasikan	74.000.000,00	73.377.400,00	99,16	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang</b>	<b>221.139.800,00</b>	<b>217.589.460,00</b>	<b>98,39</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan jasa pemeliharaan dan biaya pemeliharaan	196.369.800,00	193.365.780,00	98,47	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	24.770.000,00	24.223.680,00	97,79	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang disewa	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air, listrik, peralatan, perlengkapan dan pelayanan umum kantor Dinas Koperasi UKM Prov. Kepri</b>	<b>1.877.734.518,00</b>	<b>1.862.737.980,00</b>	<b>99,20</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	322.300.000,00	319.020.000,00	98,98	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000,00	8.804.800,00	48,92	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.489.434.518,00	1.486.913.180,00	99,83	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>126.246.240,00</b>	<b>122.378.700,00</b>	<b>96,94</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	70.460.320,00	68.093.200,00	96,64	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP Dinas	55.785.920,00	54.285.500,00	97,31	



## 18. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Alokasi anggaran untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 15.581.297.692,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 15.478.726.814,00 atau sebesar (99,34%), pada urusan Penanaman Modal tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.18**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Penanaman Modal Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Penanaman Modal		15.581.297.692,00	15.478.726.814,00	99,34	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	236.103.575,00	234.076.261,00	99,14	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Regulasi Pemeberian insentif dan kemudahan berusaha	137.920.124,00	137.920.124,00	97,94	
Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Kajian dan Regulasi Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha	137.920.124,00	137.920.124,00	100,00	
	Jumlah Peserta Konsultasi Publik				
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi	98.183.451,00	96.156.137,00	97,94	
Penyediaan Peta Potensidan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Investasi Daerah	98.183.451,00	96.156.137,00	97,94	
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	336.645.130,00	328.240.254,00	97,50	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah Penambahan Investor Dalam Negeri dan Luar Negeri	336.645.130,00	328.240.254,00	97,50	



Provinsi					
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Media Publikasi	62.849.630,00	58.977.122,00	93,84	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Business Meeting yang Diikuti / Diselenggarakan	273.795.500,00	269.263.132,00	98,34	
	Jumlah Video Promosi Digital				
<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>		<b>864.840.114,00</b>	<b>856.200.597,00</b>	<b>99,00</b>	
	<b>Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP</b>				
	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas</b>				
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>				
<b>Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perizinan dan Non perizinan yang dilayani dengan SOP</b>	<b>141.579.406,00</b>	<b>140.253.068,00</b>	<b>99,06</b>	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	100.000.000,00	99.037.339,00	99,04	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Non Perizinan	41.579.406,00	41.215.729,00	99,13	
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase perizinan dan Non perizinan yang dilayani dengan SOP	723.260.708,00	715.947.529,00	98,99	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha	314.756.047,00	313.468.100,00	99,59	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Verifikasi Permohonan Perizinan	110.300.741,00	109.027.310,00	98,85	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan	Jumlah Penyelenggaraan Layanan Konsultasi	256.882.920,00	253.653.119,00	98,74	



Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	dan Informasi Layanan				
Perizinan dan non Perizinan					
	Jumlah Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PTSP Provinsi Kepulauan Riau				
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Dokumen Harmonisasi Regulasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	41.321.000,00	39.799.000,00	96,32	
<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	<b>796.567.200,00</b>	<b>748.070.892,00</b>	<b>93,91</b>	
<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM</b>	<b>796.567.200,00</b>	<b>748.070.892,00</b>	<b>93,91</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan Penanaman Modal	547.052.000,00	507.292.863,00	92,73	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	249.515.200,00	240.778.029,00	96,50	
	Jumlah Perusahaan yang Menyampaikan LKPM				
<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Persentase ketersediaan data/informasi perkempangan investasi di Kepulauan Riau	<b>124.527.260,00</b>	<b>119.857.879,00</b>	<b>96,25</b>	
<b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi</b>	<b>Data/Informasi Perizinan dan non perizinan Penanaman Modal dan Aplikasi sistem informasi terkelola dengan baik</b>	<b>124.527.260,00</b>	<b>119.857.879,00</b>	<b>96,25</b>	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Data / Informasi Terkait Penanaman Modal Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	124.527.260,00	119.857.879,00	96,25	
	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Data dan Informasi yang Dilaksanakan				



<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>	<b>13.222.614.413,00</b>	<b>13.192.280.931,00</b>	<b>99,77</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>72.051.840,00</b>	<b>71.403.556,00</b>	<b>99,10</b>	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>	<b>13.222.614.413,00</b>	<b>13.192.280.931,00</b>	<b>99,77</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah yang tersedia</b>	<b>72.051.840,00</b>	<b>71.403.556,00</b>	<b>99,10</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.396.032,00	12.915.800,00	96,42	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.613.216,00	14.509.900,00	99,29	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.042.592,00	43.977.856,00	99,85	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase Pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian Laporan Keuangan</b>	<b>686.482.400,00</b>	<b>10.093.953.368,00</b>	<b>99,77</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	9.609.137.438,00	9.587.085.368,00	99,77	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tersusun	508.368.000,00	506.868.000,00	99,70	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah teradministrasi dengan baik	29.220.000,00	29.220.000,00	100,00	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	29.220.000,00	29.220.000,00	100,00	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>persentase disiplin pegawai</b>	<b>59.837.200,00</b>	<b>59.747.000,00</b>	<b>99,85</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	53.277.200,00	53.187.000,00	99,83	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan Bagi Aparatur DPMP TSP Provinsi Kepri	6.560.000,00	6.560.000,00	100,00	



<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>553.289.454,00</b>	<b>552.870.427,00</b>	<b>99,92</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.167.691,00	6.165.400,00	99,96	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	50.901.600,00	50.638.300,00	99,48	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Barang Cetak dan Penggandaan	17.926.000,00	17.925.000,00	99,99	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.696.672,00	38.590.000,00	99,72	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.335.076,00	37.290.000,00	99,88	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah dan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	402.262.415,00	402.261.727,00	100,00	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>895.530.652,00</b>	<b>893.339.264,00</b>	<b>99,76</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	458.100.000,00	458.100.000,00	100,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	437.430.652,00	435.239.264,00	99,50	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.980.800,00	103.700.400,00	99,73	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang terpelihara	8.756.000,00	8.756.000,00	100,00	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	



## 19. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan Dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Alokasi anggaran untuk Urusan Kepemudaan Dan Olahraga pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 39.400.521.549,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 38.478.000.156,00 atau sebesar (112,53%), pada urusan Kepemudaan Dan Olahraga tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.19**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kepemudaan dan Olahraga		39.400.521.549,00	38.478.000.156,00	97,66	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		2.426.900.540,00	2.354.930.077,00	97,03	
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri				
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat				
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Tingkat partisipasi pemuda dalam Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan	2.426.900.540,00	2.354.930.077,00	97,03	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader	658.812.800,00	657.804.400,00	99,85	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Kapasitas Daya Saing Kewirausahaan	170.450.000,00	166.664.370,00	97,78	
Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah peserta Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi dan Pasukan Pengibar Bendera yang dikirim ke Tingkat Nasional	1.317.664.400,00	1.308.982.799,00	99,34	
Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan	Jumlah Tenaga Kepemudaan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang	271.124.740,00	212.629.908,00	78,43	





PelayananKepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Difasilitasi dalam Pembahasan Rumusan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan				
Peningkatan Kepemimpinan,Keelop orandan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang difasilitasi Dalam Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan	8.848.600,00	8.848.600,00	100,00	
<b>Program PengembanganDaya Saing Keolahragaan</b>		<b>22.828.156.682,00</b>	<b>22.544.364.791,00</b>	<b>98,76</b>	
	<b>Cakupan Pembinaan AtletMuda</b>				
	<b>Cakupan Pembinaan Olahraga</b>				
	<b>Cakupan Pelatih yang Bersertifikat</b>				
	<b>Peningkatan Prestasi Olahraga</b>				
<b>Pembinaan dan Pengembangan OlahragaPendidikan pada Jenjang Pendidikan yang MenjadiKewenangan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah atlet muda berprestasi dan jumlah prestasi olahraga pendidikan didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana o-lahraga.</b>	<b>4.734.841.466,00</b>	<b>4.588.330.388,00</b>	<b>96,91</b>	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pembinaan Atlet Provinsi Kepulauan Riau	2.164.696.056,00	2.057.100.283,00	95,03	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	Jumlah sarana dan prasaranaolahraga yang tersedia	2.570.145.410,00	2.531.230.105,00	98,49	
<b>Penyelenggaraan KejuaraanOlahraga</b>	<b>Jumlah Event yang di selenggarakan</b>	<b>3.247.361.970,00</b>	<b>3.136.139.501,00</b>	<b>96,57</b>	
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	Jumlah Event OlahragaTingkat Provinsi	3.247.361.970,00	3.136.139.501,00	96,57	
<b>Pembinaan Dan Pengembangan OlahragaPrestasi Tingkat Nasional</b>	<b>Jumlah penerima penghargaan keolahragaan</b>	<b>40.304.480,00</b>	<b>35.468.202,00</b>	<b>88,00</b>	
Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi	Jumlah Atlet dan Pelatih yangdiberikan Penghargaan	18.451.200,00	15.968.502,00	86,54	
Pemusatan Latihan Daerah,Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Ilmu Keolahragaan	21.853.280,00	19.499.700,00	89,23	



<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>	<b>Jumlah organisasi olahragayang aktif</b>	<b>14.805.648.766,00</b>	<b>14.784.426.700,00</b>	<b>99,86</b>	
Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Peserta Senam Sehatdan bersepeda Bersama	14.805.648.766,00	14.784.426.700,00	99,86	
<b>PROGRAM PENGEMBA NGAN KAPASITAS KEPRAMUK AAN</b>	<b>Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</b>	<b>927.170.000,00</b>	<b>924.095.900,00</b>	<b>99,67</b>	
<b>Pembinaan dan Pengemban gan Organisasi Kepramukaa n</b>	Jumlah kwartir yang mengikutkegiatan kepramukaan				
Penyelenggar aan Kegiatan Kepramukaa n Provinsi	Jumlah Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	927.170.000,00	924.095.900,00	99,67	
<b>PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>	<b>13.218.294.327,00</b>	<b>12.654.609.388,00</b>	<b>95,74</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>20.520.000,00</b>	<b>13.343.200,00</b>	<b>65,03</b>	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.009.000,00	7.146.400,00	59,51	
Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Tersusun	8.511.000,00	6.196.800,00	72,81	
<b>Administrasi KeuanganPrangkat Daerah</b>		<b>8.881.103.597,00</b>	<b>8.506.485.944,00</b>	<b>95,78</b>	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi pelaksanaantugas ASN yang Tersusun	717.778.000,00	544.652.000,00	75,88	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	8.155.321.597,00	7.956.074.344,00	97,56	
Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuanganyang Tersusun	8.004.000,00	5.759.600,00	71,96	
<b>Administrasi Barang MilikDaerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>255.057.000,00</b>	<b>229.400.000,00</b>	<b>89,94</b>	
Pengamanan Barang MilikDaerah SKPD	Jumlah Pembayaran Gaji Pengamanan Barang MilikDaerah	255.057.000,00	229.400.000,00	89,94	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>897.373.522,00</b>	<b>849.747.677,00</b>	<b>94,69</b>	



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah	249.604.042,00	209.379.100,00	83,88	
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan danperaturan perundang- undangan	24.000.000,00	23.730.000,00	98,88	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	141.349.187,00	140.219.187,00	99,20	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan logistik kantor	74.396.200,00	70.059.240,00	94,17	
Penyediaan Peralatan RumahTangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	28.209.893,00	28.153.000,00	99,80	
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa barang cetakan dan penggandaan	379.814.200,00	378.207.150,00	99,58	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>197.371.900,00</b>	<b>197.371.900,00</b>	<b>100,00</b>	
Pengadaan Mabel	Terpeliharanya barang milik daerah	197.371.900,00	197.371.900,00	100,00	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>2.111.278.000,00</b>	<b>2.012.382.306,00</b>	<b>95,32</b>	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	81.075.000,00	69.892.850,00	86,21	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	151.000.000,00	145.862.500,00	96,60	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya gaji PTT	1.662.741.000,00	1.634.501.125,00	98,30	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	216.462.000,00	162.125.831,00	74,90	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>855.590.308,00</b>	<b>845.878.361,00</b>	<b>98,86</b>	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset yang dipelihara	517.346.000,00	510.892.050,00	98,75	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan kebutuhan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor	93.334.308,00	93.334.308,00	100,00	



	Jumlah pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	244.910.000,00	241.652.003,00	98,67	

## 20. Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika. Alokasi anggaran untuk Urusan Statistik pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 132.658.334,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 132.360.772,00 atau sebesar (99,78%), pada urusan Statistik tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.120**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Statistik Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Statistik		132.658.334,00	132.360.772,00	99,78	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor		132.658.334,00	132.360.772,00	99,78	
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah				
Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS	132.658.334,00	132.360.772,00	99,78	Kesadaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan kompilasi statistik
	Persentase survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi dari BPS				
	Persentase kelengkapan metadata indikator				



	<b>statistik sektoral</b>				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah OPD yang dikompilasi datanya	132.658.334,00	132.360.772,00	99,78	

## 21. Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Alokasi anggaran untuk Urusan Persandian pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 187.922.353 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 181.402.024 atau sebesar (96,53 %), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 107,75%, pada urusan wajib Persandian tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.21**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Persandian Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Persandian		187.922.353,00	181.402.024,00	96,53	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>	187.922.353,00	181.402.024,00	96,53	
<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase titik yang diamankan berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi</b>	<b>126.342.753,00</b>	<b>121.053.187,00</b>	<b>95,81</b>	
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah titik teramankan berdasarkan jumlah titik pada pola hubungan komunikasi sandi (PHKS)	126.342.753,00	121.053.187,00	95,81	
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi</b>	<b>61.579.600,00</b>	<b>60.348.837,00</b>	<b>98,00</b>	
Pemerintah Daerah Provinsi	dan/atau aplikasi persandian				



	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanansinyal				
	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah				
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah aplikasi atauwebsite yang diaudit security assesment dan kontra penginderaan	61.579.600,00	60.348.837,00	98,00	

## 22. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan. Alokasi anggaran untuk Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 17.040.930.929,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 16.684.932.501,00 atau sebesar (97,91%), pada urusan wajib Kebudayaan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.22**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Kebudayaan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kebudayaan		17.040.930.929,00	16.684.932.501,00	97,91	
Program Pengembangan Kebudayaan		2.163.487.714,00	2.161.302.970,00	99,90	
	Persentase warisan budaya takbenda yangtelah ditetapkan terhadap total registrasi				
	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni				
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni				
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase warisan budaya takbenda yangtelah ditetapkan terhadap total registrasi	1.692.006.996,00	1.690.767.016,00	99,93	



Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	jumlah opk yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	563.994.748,00	562.841.774,00	99,80	
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	jumlah sdm yang di bina	1.128.012.248,00	1.127.925.242,00	99,99	
<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni</b>	<b>471.480.718,00</b>	<b>470.535.954,00</b>	<b>99,80</b>	
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni				
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	keterlibatan penduduk sebagai pelaku dan menonton pertunjukkan seni secara langsung	471.480.718,00	470.535.954,00	99,80	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan</b>	<b>1.506.034.870,00</b>	<b>1.305.722.740,00</b>	<b>86,70</b>	
	(terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)				
<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>terlaksana dan meningkatnya jumlah penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan</b>	<b>1.506.034.870,00</b>	<b>1.305.722.740,00</b>	<b>86,70</b>	
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sumber daya manusia bidang kesenian	83.549.796,00	83.023.394,00	99,37	
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.422.485.074,00	1.222.699.346,00	85,96	
<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi</b>	<b>1.585.773.614,00</b>	<b>1.534.216.768,00</b>	<b>96,75</b>	
<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>	<b>Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi</b>	<b>1.585.773.614,00</b>	<b>1.534.216.768,00</b>	<b>96,75</b>	



Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	114.248.968,00	113.742.055,00	99,56	
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	524.222.080,00	502.565.473,00	95,87	
Fasilitasi Peningkatan	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah	947.302.566,00	917.909.240,00	96,90	
Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal				
<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi</b>	<b>531.508.428,00</b>	<b>528.904.311,00</b>	<b>99,88</b>	
<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>	<b>Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi</b>	<b>410.413.300,00</b>	<b>409.924.114,00</b>	<b>99,88</b>	
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	310.195.200,00	310.106.600,00	99,97	
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	100.218.100,00	99.817.514,00	99,60	
<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>	<b>Jumlah Warisan Budaya Tangible yang lestari</b>	<b>121.095.128,00</b>	<b>118.980.197,00</b>	<b>98,25</b>	
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	121.095.128,00	118.980.197,00	98,25	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia</b>	<b>345.663.616,00</b>	<b>344.962.381,00</b>	<b>99,80</b>	
Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase museum yang dikelola	345.663.616,00	344.962.381,00	99,80	
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Meningkatnya pengelolaan Koleksi Museum Provinsi Kepulauan Riau	345.663.616,00	344.962.381,00	99,80	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>	<b>10.908.462.687,00</b>	<b>10.809.823.331,00</b>	<b>99,10</b>	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan,	151.573.032,00	142.561.924,00	94,05	





<b>Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas</b>				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.475.300,00	9.391.630,00	64,88	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	100.519.048,00	100.233.574,00	99,72	
Realisasi Kinerja OPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.578.684,00	32.936.720,00	90,04	
<b>administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu</b>	<b>7.979.877.075,00</b>	<b>7.918.151.290,00</b>	<b>99,23</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	7.458.855.575,00	7.400.149.790,00	99,21	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	521.021.500,00	518.001.500,00	99,42	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor</b>	<b>935.961.930,00</b>	<b>934.733.154,00</b>	<b>99,87</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.249.000,00	16.249.000,00	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	181.842.800,00	181.645.506,00	99,89	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	412.941.460,00	412.226.000,00	99,83	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.700.000,00	29.400.000,00	98,99	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Keluar dan Dalam Daerah	295.228.670,00	295.212.648,00	99,99	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</b>	<b>55.828.560,00</b>	<b>55.794.500,00</b>	<b>99,94</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket peralatan mesin yang Disediakan	55.828.560,00	55.794.500,00	99,94	



<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.580.013.898,00</b>	<b>1.556.474.521,00</b>	<b>98,51</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	105.660.144,00	97.226.487,00	92,02	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	446.631.508,00	437.666.438,00	97,99	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30.403.150,00	30.297.500,00	99,65	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	997.319.096,00	991.284.096,00	99,39	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>	<b>205.208.192,00</b>	<b>202.107.942,00</b>	<b>98,49</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42.350.000,00	39.696.370,00	93,73	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29.910.000,00	29.498.000,00	98,62	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	132.948.192,00	132.913.572,00	99,97	

### 23. Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Alokasi anggaran untuk Urusan Perpustakaan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 19.329.776.913 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 18.684.275.004 atau sebesar (96,66%), pada urusan wajib Perpustakaan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.2.23**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib**  
**Perpustakaan Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Perpustakaan		19.329.776.913,00	18.684.275.004,00	96,66	
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	2.356.489.180,00	2.088.815.236,00	88,64	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	2.085.379.946,00	1.845.263.936,00	88,49	
	2. Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat				
	3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk				
	4. Persentase Perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan				
	5. Keterlibatan masyarakat dalam KIE				
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service)	198.808.400,00	197.266.986,00	99,22	
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	88.800.000,00	88.657.000,00	99,84	
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	193.627.600,00	-	0,00	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	9.000.096,00	8.700.000,00	96,67	



	Tingkat Daerah Provinsi				
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	1.482.143.850,00	1.453.189.700,00	98,05	
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	113.000.000,00	97.450.250,00	86,24	
<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah masyarakat gemar membaca</b>	<b>271.109.234,00</b>	<b>243.551.300,00</b>	<b>89,84</b>	
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan	171.109.234,00	156.120.700,00	91,24	
pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kegemaran Membacadan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus				
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	100.000.000,00	87.430.600,00	87,43	
<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DANNASKAH KUNO</b>	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	676.665.814,00	591.855.893,00	87,47	
<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi</b>	<b>1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya</b>				
	<b>2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa</b>	<b>514.065.814,00</b>	<b>488.295.393,00</b>	<b>94,99</b>	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	327.620.994,00	313.024.150,00	95,54	
Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	186.444.820,00	175.271.243,00	94,01	



Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terklola dengan baik	162.600.000,00	103.560.500,00	63,69	
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	162.600.000,00	103.560.500,00	63,69	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	16.296.621.919,00	16.003.603.875,00	98,20	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Provinsi Kepulauan Riau	28.582.248,00	28.125.090,00	98,40	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.582.248,00	28.125.090,00	98,40	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai serata Administrasi melaksanakan Tugas	12.133.470.553,00	11.875.477.939,00	97,87	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.709.602.053,00	11.456.571.939,00	97,84	
Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	423.868.500,00	418.906.000,00	98,83	
Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>9.998.200,00</b>	<b>9.306.100,00</b>	<b>93,08</b>	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	9.998.200,00	9.306.100,00	93,08	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>719.530.219,00</b>	<b>703.017.658,00</b>	<b>97,71</b>	



	Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9.993.200,00	7.496.000,00	75,01	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (UPT)	2.788.000,00	2.620.000,00	93,97	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26.522.000,00	25.926.000,00	97,75	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT)	Jumlah Paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (UPT)	25.201.425,00	24.840.000,00	98,57	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	258.641.955,00	249.296.592,00	96,39	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (UPT)	18.883.710,00	18.745.960,00	99,27	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	21.291.000,00	20.900.000,00	98,16	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan (UPT)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan (UPT)	7.102.600,00	7.097.000,00	99,92	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9.879.800,00	9.850.000,00	99,70	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan (UPT)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (UPT)	3.756.000,00	3.437.000,00	91,15	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.060.600,00	239.391.151,00	99,31	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT)	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT)	94.410.000,00	93.417.955,00	98,95	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa surat menyurat, komunikasi, sumberdaya Air, Listrik,</b>	<b>3.155.969.175,00</b>	<b>3.143.576.360,00</b>	<b>99,61</b>	



	<b>Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor</b>				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.900.000,00	96,67	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT)	402.660,00	400.000,00	99,34	
Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	760.999.765,00	759.366.841,00	99,79	
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (UPT)	51.684.160,00	48.829.769,00	94,48	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.340.285.250,00	2.332.479.750,00	99,67	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terpelihara</b>	<b>249.071.453,00</b>	<b>244.100.728,00</b>	<b>98,00</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41.452.135,00	40.150.500,00	96,86	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	112.071.918,00	111.913.000,00	99,86	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (UPT)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (UPT)	7.644.000,00	7.610.000,00	99,56	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	86.283.000,00	82.837.228,00	96,01	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan	1.620.400,00	1.590.000,00	98,12	
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				



Bangunan Lainnya (UPT)	yang Dipelihara/Direhabilitasi (UPT)				
------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

## 24. Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Alokasi anggaran untuk Urusan Kearsipan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 657.143.850,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 604.131.445,00 atau sebesar (91,93%), pada urusan wajib Kearsipan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.24**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Wajib Kearsipan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kearsipan		657.143.850,00	604.131.445,00	91,93	
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	555.842.050,00	508.399.907,00	91,46	
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	168.205.600,00	163.074.605,00	96,95	
	2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip				
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	9.866.500,00	9.331.350,00	94,58	
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	158.339.100,00	153.743.255,00	97,10	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	123.277.150,00	110.957.209,00	90,01	
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	123.277.150,00	110.957.209,00	90,01	
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	264.359.300,00	234.368.093,00	88,66	
Nasional Tingkat Provinsi					





Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	9.771.800,00	5.802.450,00	59,38	
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	254.587.500,00	228.565.643,00	89,78	
<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	<b>Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip</b>	<b>101.301.800,00</b>	<b>95.731.538,00</b>	<b>94,50</b>	
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabungkan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	101.301.800,00	95.731.538,00	94,50	
Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	101.301.800,00	95.731.538,00	94,50	

## 25. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Alokasi anggaran untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 68.621.133.733 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 66.879.259.486,36 atau sebesar (97,46%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 168,89%. Jumlah indikator program pada urusan kelautan dan perikanan sebanyak 8 indikator, dengan pencapaian sebanyak 7 Indikator program kategori sangat tinggi dan sebanyak 1 indikator program kategori sangat rendah yaitu Kawasan Konservasi yang Dikelola, Selengkapanya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.25**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kelautan dan Perikanan		68.621.133.733,00	66.879.259.486,36	97,46	
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Konservasi yang Dikelola	193.182.800,00	179.373.598,00	92,85	



<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>		<b>147.097.100,00</b>	<b>138.609.120,00</b>	<b>94,23</b>	
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Dokumen Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Relokasi Sarang Penyudu di Natuna	147.097.100,00	138.609.120,00	94,23	
	Relokasi Sarang Penyudu di Natuna				
Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		46.085.700,00	40.764.478,00	88,45	
Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	46.085.700,00	40.764.478,00	88,45	
<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>		<b>20.669.630.942,00</b>	<b>20.121.596.778,19</b>		
	<b>Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap</b>				
	<b>Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)</b>				
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>		20.162.679.506,00	19.677.322.523,19	97,59	
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tangkap	123.567.792,00	115.528.200,00	93,49	
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan; Jumlah Sarana peningkatan usaha perikanan tangkap skala kecil (bot pancung, mesin tempel, mesin ketinting, sampian bahan fibre glass, sampian dayung kayu dan peralatan pendukung lainnya Jumlah unit kapal / perahu Penangkap ikan	20.039.111.714,00	19.561.794.323,19	97,62	
<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>		221.129.346,00	193.838.225,00	87,66	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas	Jumlah Petugas Cek Fisik Kapal yang dilatih Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap	221.129.346,00	193.838.225,00	87,66	



10 GT sampai dengan 30 GT					
<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>		99.162.500,00	82.951.226,00	83,65	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Pembangunan Check Point Pelabuhan Tambatan Perahu Baran Pembangunan Tambatan Kapal/Perahu di karimun Pengembangan Pelabuhan Antang Tarempa Pengembangan Pelabuhan Batu Duyung Pengembangan Pelabuhan Pering Natuna Pusat Logistik dan Natuna	72.196.400,00	56.175.564,00	77,81	
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Pelabuhan Perikanan yang terbina dan terlayani	26.966.100,00	26.775.662,00	99,29	
<b>Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air</b>		<b>186.659.590,00</b>	<b>167.484.804,00</b>	<b>89,73</b>	
<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi</b>		125.669.050,00	101.673.625,00	80,91	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pergub SOP/Juknis Prosedur Penetapan Izin Usaha Bidang Perikanan Budidaya	125.669.050,00	101.673.625,00	80,91	
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>		8.481.154.714,00	8.198.896.547,17	96,67	
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang berisi data dan informasi tentang keragaan perikanan budidaya (luas pemanfaatan lahan dan sarana prasarana perikanan budidaya, produksi, dll)	5.687.000,00			
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah unit prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha komoditas baru perikanan budidaya yang tersedia	2.717.150.454,00	2.640.367.100,20	97,17	
	Jumlah unit prasarana perbenihan, pembesaran dan unit usaha				



Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah paket sarana perikanan budidaya guna menjamin pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya	3.077.102.054,00	2.976.966.157,65	96,75	
	Bibit Ikan kerapu Cantang				
	Bibit Rumput Laut				
	Jumlah paket sarana perikanan budidaya guna menjamin pelaksanaan pengembangan perikanan budidaya				
	Pakan Ikan Air Laut (Pallet)				
	Pakan Udang dan Bandeng				
	Pembangunan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana BBI di Air Putih, Kec.Siantan Timur				
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan/ lahan yang sesuai untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan (2) Jumlah	22.709.000,00	17.613.300,00	77,56	
	unit usaha budidaya perikanan yang terkendali hama penyakit ikan dan obat-obatan Jumlah kelompok yang terbina melalui peningkatan kualitas teknis dan manajemen usaha (kelompok)				
	Jumlah kelompok yang terbina melalui peningkatan kualitas teknis dan manajemen usaha				
Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kelompok yang terbina melalui peningkatan kualitas teknis dan manajemen usaha kelompok Jumlah klaster perikanan budidaya yg terbentuk Jenis/ kawasan Jumlah klaster perikanan budidaya yg terbentuk Jenis/ kawasan	2.658.506.206,00	2.563.949.989,32	96,44	
	Jumlah klaster perikanan budidaya yg terbentuk Jenis/ kawasan				
	Jumlah klaster perikanan budidaya yg terbentuk Jenis/ kawasan				
<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautandan</b>	<b>Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan</b>	1.447.000.233,00	1.378.262.669,00	95,25	



Perikanan	perikanan yang diselesaikan				
<b>Pengawasan Sumber Day Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>		1.447.000.233,00	1.378.262.669,00	95,25	
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Cakupan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut 12 Mil	1.447.000.233,00	1.378.262.669,00	95,25	
<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan</b>	2.848.703.435,00	2.753.529.763,00	96,66	
<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi</b>		527.893.200,00	486.475.386,00	92,15	
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi	Pergub, Juknis, Juklak dan SOP	220.770.000,00	220.770.000,00	100,00	
Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Perikanan (Rekomendasi SIPPHP) yang diterbitkan Rekomendasi GMP"	165.530.600,00	146.281.892,00	88,37	
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan tersedia	141.592.600,00	119.423.494,00	84,34	
<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>		368.321.450,00	350.175.727,00	95,07	
Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	368.321.450,00	350.175.727,00	95,07	
<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah</b>		1.952.488.785,00	1.916.878.650,00	98,18	



<b>Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah Provinsi</b>					
Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan yang terlaksana	1.952.488.785,00	1.916.878.650,00	98,18	
	Terlaksananya Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan				
	Terlaksananya Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan				
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		<b>34.855.792.559,00</b>	<b>34.145.926.506,00</b>	<b>97,96</b>	
	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		358.175.166,00	301.556.245,00	84,19	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA SKPD	162.689.600,00	141.729.500,00	87,12	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	134.532.766,00	112.469.085,00	83,60	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	60.952.800,00	47.357.660,00	77,70	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		21.592.795.311,00	21.423.444.990,00	99,22	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	20.445.199.311,00	20.280.168.990,00	99,19	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pemenuhan Adm. Pelaksanaan Tugas ASN	1.147.596.000,00	1.143.276.000,00	99,62	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>169.000.000,00</b>	<b>168.847.750,00</b>	<b>99,91</b>	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan pengamanan barang milik daerah SKPD	169.000.000,00	168.847.750,00	99,91	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>70.000.000,00</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersosialisasinya Peraturan terkait	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>2.763.483.925,00</b>	<b>2.531.000.165,00</b>	<b>91,59</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	876.584.410,00	866.525.960,00	98,85	



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan peralatan Rumah Tangga dan perlengkapan kantor	72.712.700,00	65.149.900,00	89,60	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	207.716.715,00	187.476.665,00	90,26	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	34.237.100,00	31.881.924,00	93,12	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	314.760.000,00	306.838.000,00	97,48	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	22.996.000,00	20.180.000,00	87,75	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	1.209.543.000,00	1.034.919.472,00	85,56	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penataan arsip OPD	24.934.000,00	18.028.244,00	72,30	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>185.500.000,00</b>	<b>172.181.000,00</b>	<b>92,82</b>	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	185.500.000,00	172.181.000,00	92,82	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>8.903.055.607,00</b>	<b>8.720.369.198,00</b>	<b>97,95</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	21.367.150,00	21.366.000,00	99,99	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	969.282.095,00	810.579.684,00	83,63	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	253.618.500,00	253.618.500,00	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.658.787.862,00	7.634.805.014,00	99,69	
<b>Pemeliharaan Barang Mili Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>813.782.550,00</b>	<b>758.527.158,00</b>	<b>93,21</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor	623.800.550,00	576.845.929,00	92,47	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional Kantor	81.592.000,00	79.434.729,00	97,36	



Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin	33.790.000,00	27.706.000,00	81,99	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	74.600.000,00	74.540.500,00	99,92	

## 26. Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Alokasi anggaran untuk Urusan Pariwisata pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 25.762.662.217,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 25.022.244.987,00 atau sebesar (97,13%), pada urusan Pariwisata tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.26**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Pariwisata Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pariwisata		25.762.662.217,00	25.022.244.987,00	97,13	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					
	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	1.698.721.000,00	1.626.685.235,00	95,76	
	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara				
	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau.				
3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	168.280.000,00	154.768.705,00	91,97	
3.26.02.1.01.01 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi yang ditetapkan	168.280.000,00	154.768.705,00	91,97	
3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	1.218.860.000,00	1.184.005.830,00	97,14	
3.26.02.1.02.01 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang ditetapkan	171.176.000,00	163.876.680,00	95,74	
3.26.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan	Jumlah orang yang diberdayakan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis	1.047.684.000,00	1.020.129.150,00	97,37	





Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Pariwisata Provinsi				
3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	171.590.000,00	160.483.250,00	93,53	
3 26 02 1.03 01 Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang ditetapkan	171.590.000,00	160.483.250,00	93,53	
3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata	139.991.000,00	127.427.450,00	91,03	
3 26 02 1.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina dan diawasi	49.892.000,00	49.333.100,00	98,88	
3 26 02 1.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Industri dan Usaha Pariwisata yang difasilitasi Standarisasi	90.099.000,00	78.094.350,00	86,68	
Program Pemasaran Pariwisata					
	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	10.801.556.710,00	10.693.590.044,00	99,00	
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara				
	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau				
3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dilaksanakan	10.801.556.710,00	10.693.590.044,00	99,00	
3 26 03 1.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	8.495.301.518,00	8.447.380.679,00	99,44	
3 26 03 1.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah stakeholder pariwisata yang diberi insentif	1.887.142.000,00	1.855.617.105,00	98,33	
26 03 1.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi	Jumlah Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri yang disediakan	419.113.192,00	390.592.260,00	93,19	
Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri					
<b>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</b>					



	<b>Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan</b>	<b>394.899.500,00</b>	<b>352.571.600,00</b>	<b>89,28</b>	
3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	196.202.000,00	172.396.400,00	87,87	
Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Lanjutan yang ditingkatkan kapasitasnya				
3 26 05 1.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang dikembangkan Kompetensinya	1.700.000,00	1.360.000,00	80,00	
3 26 05 1.01 04 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang difasilitasi sertifikasi kompetensi	194.502.000,00	171.036.400,00	87,94	
3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Kapasitasnya	198.697.500,00	180.175.200,00	90,68	
3 26 05 1.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mengikuti pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan	98.697.500,00	82.594.300,00	83,68	
3 26 05 1.02 03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Usaha Bidang Ekonomi Kreatif yang distandarisasi dan Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang disertifikasi Profesi	100.000.000,00	97.580.900,00	97,58	
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					
	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	329.513.200,00	324.887.102,00	98,60	
3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Usaha Kreatif yang dikembangkan dan disediakan sarana dan prasarannya	176.413.200,00	174.218.150,00	98,76	
3 26 04 1.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Ke Pasar	176.413.200,00	174.218.150,00	98,76	
3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	153.100.000,00	150.668.952,00	98,41	
3 26 04 1.02 05 Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah media yang digunakan dalam pemasaran produk ekraf	106.160.000,00	105.324.052,00	99,21	



3 26 04 1.02 10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem EkonomiKreatif yang dimonitoring dan dievaluasi	46.940.000,00	45.344.900,00	96,60	
Program PenunjangUrusan					
Pemerintahan Daerah Provinsi					
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	12.537.971.807,00	12.024.511.006,00	95,90	
3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah	266.585.675,00	250.625.250,00	94,01	
3.26.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah yang disusun	87.758.900,00	81.026.950,00	92,33	
3.26.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yangdisusun	50.730.375,00	46.111.000,00	90,89	
3.26.01.1.01.06 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.096.400,00	123.487.300,00	96,40	
3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	9.540.742.763,00	9.373.613.448,00	98,25	
3.26.01.1.02.01 Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gajidan tunjangan ASN	9.063.440.763,00	8.900.570.568,00	98,20	
3.26.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi PelaksanaanTugas ASN	Jumlah pembayaran Administrasi PelaksanaanTugas ASN	452.302.000,00	451.752.000,00	99,88	
3.26.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	25.000.000,00	21.290.880,00	85,16	
Pelaporan Keuangan AkhirTahun SKPD					
3.26.01.1.06 Administrasi Umum PerangkatDaerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.057.956.600,00	804.887.718,00	76,08	
3 26 01 1.06 04 Penyediaan Bahan LogistikKantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik Kantor	164.898.400,00	131.555.235,00	79,78	
3 26 01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakan dan Penggandaan	156.402.000,00	116.146.800,00	74,26	
3 26 01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	736.656.200,00	557.185.683,00	75,64	



3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya PeralatanMesin Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	122.509.300,00	113.783.000,00	92,88	
3 26 01 1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang diadakan	122.509.300,00	113.783.000,00	92,88	
3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	1.298.401.469,00	1.291.621.230,00	99,48	
3 26 01 1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
3 26 01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	89.200.000,00	85.520.000,00	95,87	
3 26 01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	1.201.701.469,00	1.198.601.230,00	99,74	
3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yangterpelihara sesuai rencana kebutuhan	251.776.000,00	189.980.360,00	75,46	
3 26 01 1.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan	41.780.000,00	35.402.300,00	84,74	
3 26 01 1.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	154.576.000,00	112.218.060,00	72,60	
3 26 01 1.09 06 PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan peralatan danmesin lainnya	55.420.000,00	42.360.000,00	76,43	

## 27. Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan. Alokasi anggaran untuk Urusan Pertanian pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 9.009.404.895 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 8.083.914.595 atau sebesar (89,73%), urusan Pilihan Pertanian tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.2.27**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan**  
**Pertanian Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pertanian		9.009.404.895,00	8.083.914.595,00	89,73	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		6.159.755.595,00	5.755.560.902,00	93,44	
	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak				
	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian				
<b>Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Sarana Prasarana Pertanian Yang di adakan</b>	<b>5.257.732.415,00</b>	<b>4.885.805.155,00</b>	<b>92,93</b>	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Alat Mesin Pertanian dan sarana pendukung pertanian yang diadakan	5.257.732.415,00	4.885.805.155,00	92,93	
	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang diadakan				
	Jumlah Pupuk dan Pestisida cair yang diadakan				
	Jumlah laporan pengawasan peredaran alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida				
<b>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	<b>Jumlah produksi bibit/Benih tanaman perkebunan dan hortikultura yang bersertifikasi</b>	<b>722.474.000,00</b>	<b>703.673.645,00</b>	<b>97,40</b>	



Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih / Bibit Tanaman Pertanian yang diterbitkan	38.320.000,00	37.709.500,00	98,41	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Jumlah Produksi Bibit / Benih Tanaman Hortikultura	527.072.000,00	509.318.585,00	96,63	
Benih/Bibit Hortikultura					
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Produksi Bibit / Benih Tanaman Perkebunan	157.082.000,00	156.645.560,00	99,72	
	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran benih perkebunan				
<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Akseptor yang di IB (Inseminasi Buatan)</b>	<b>179.549.180,00</b>	<b>166.082.102,00</b>	<b>92,50</b>	
Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Bibit Ternak yang dihasilkan	179.549.180,00	166.082.102,00	92,50	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>		<b>2.290.363.500,00</b>	<b>1.818.464.005,00</b>	<b>79,40</b>	
	<b>Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan</b>				



	<b>Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura</b>				
	<b>Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan</b>				
<b>Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Penataan Prasarana Pertanian</b>	<b>2.290.363.500,00</b>	<b>1.818.464.005,00</b>	<b>79,40</b>	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan	Luas Lahan tanaman pangan dan hortikultura yang di Optimalisasi	1.790.363.500,00	1.342.089.593,00	74,96	
	Luas Lahan Perkebunan yang di remajakan/di perluas				
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah pengadaan pembangunan gedung UPTD Pertanian	500.000.000,00	476.374.412,00	95,27	
Komoditas Pertanian					
<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewandan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>		<b>242.785.800,00</b>	<b>217.389.688,00</b>	<b>89,54</b>	
	<b>Persentase Angka Kesembuhan Penyakit</b>				
	<b>Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat</b>				
<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah</b>	<b>Jumlah wilayah yang terkendali dari penyakit hewan dan zoonosis</b>	<b>203.255.800,00</b>	<b>184.142.455,00</b>	<b>90,60</b>	



<b>Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>					
Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah wilayah yang dilakukan pengendalian	203.255.800,00	184.142.455,00	90,60	
	Jumlah Hewan Satwayang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan				
	Jumlah Sampel hewanyang diperiksa				
<b>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</b>	<b>Jumlah Sampel Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji</b>	<b>39.530.000,00</b>	<b>33.247.233,00</b>	<b>84,11</b>	
Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewandan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Sampel Hewandan Produk Pangan Asal Hewan yang Diuji	39.530.000,00	33.247.233,00	84,11	
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		<b>316.500.000,00</b>	<b>292.500.000,00</b>	<b>92,42</b>	
	<b>Nilai Tukar Petani(NTP)</b>				
	<b>Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya</b>				
<b>Pengembangan Penerapan Penyuluh Pertanian</b>	<b>Persentase Penyuluh Pertanian yang menerapkan teknologi pertanian</b>	<b>316.500.000,00</b>	<b>292.500.000,00</b>	<b>92,42</b>	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Penyuluh yang melakukan penyuluhan pertanian	9.009.404.895,00	8.083.914.595,00	89,73	





	Jumlah Petani/Orang yang telah mendapatkan pemberdayaan	6.159.755.595,00	5.755.560.902,00	93,44	
--	---	------------------	------------------	-------	--

## 28. Kehutanan

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alokasi anggaran untuk Urusan Kehutanan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 783.229.900,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 463.745.683,00 atau sebesar (59,21%), pada urusan wajib Kehutanan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.28**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan kehutanan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kehutanan		783.229.900,00	463.745.683,00	59,20	
Program Pengelolaan Hutan		683.229.900,00	386.757.600,00	56,60	
	<b>Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan</b>				
	<b>Rehabilitasi Lahan Kritis</b>				
3.28.03.1.07 Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	
3.28.03.1.07.02 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pembinaan terhadap Pemegang Izin Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	



3.28.03.1.01 Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terkelolanya RencanaTata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau	<b>367.661.900,00</b>	<b>273.799.600,00</b>	<b>74,46</b>	
3.28.03.1.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP UNIT I KARIMUN)	Terpenuhinya kebutuhan operasionalKPH	48.117.800,00	24.736.886,00	51,41	
3.28.03.1.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHL UNIT II BATAM)	Terpenuhinya kebutuhan operasionalKPH	80.313.200,00	64.513.093,00	80,33	
3.28.03.1.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP UNIT III LINGGA)	Terpenuhinya kebutuhan operasionalKPH	48.922.000,00	25.312.080,00	51,67	
3.28.03.1.01.03 .Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP UNIT IV BINTAN- TPI)	Terpenuhinya kebutuhan operasionalKPH	56.251.900,00	43.169.649,00	76,74	
3.28.03.1.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP UNIT V NATUNA)	Terpenuhinya kebutuhan operasionalKPH	53.494.000,00	42.080.392,00	78,66	
3.28.03.1.01.03 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan	Terpenuhinya kebutuhan operasionalKPH	80.563.000,00	73.987.500,00	91,84	



Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP UNIT VI ANAMBAS)					
3.28.03.1.05 Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutandi Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHL UNIT II BATAM)	Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	<b>50.000.000,00</b>	<b>49.958.000,00</b>	<b>99,92</b>	
3.28.03.1.05.01 Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHL UNIT II BATAM)	Terlaksananya Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan	50.000.000,00	49.958.000,00	99,92	
3.28.03.1.04 Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar kawasan Hutan Negara	202.568.000,00			
3.28.03.1.04.08 Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	202.568.000,00			
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		<b>100.000.000,00</b>	<b>76.988.083,00</b>	<b>76,99</b>	
	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat				
3.28.05.1.01 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi	Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan	<b>100.000.000,00</b>	<b>76.988.083,00</b>	<b>76,99</b>	



dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Masyarakat di Bidang Kehutanan				
3.28.05.1.01.02	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	50.000.000,00	37.908.632,00	75,82	
3.28.05.1.01.03	Terlaksananya Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	50.000.000,00	39.079.451,00	78,16	

## 29. Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Alokasi anggaran untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 24.284.599.147,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 23.746.405.669,92 atau sebesar (97,78%), pada urusan pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.29**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Energi dan Sumber Daya Mineral		24.284.599.147,00	23.746.405.669,92	97,78	
PROGRAM PENGELOLA ANASPEK KEGEOLOGISAN					
	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam Daerah Provinsi	210.612.400,00	135.626.500,00	64,40	
Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air	Persentase Jumlah Data Wilayah Cekungan Air tanah dalam	85.145.800,00	49.453.100,00	58,08	



Tanah dalam Daerah Provinsi	Daerah Provinsi				
Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Dokumen inventarisasi Daerah Rawan Kekeringan dan Sulit Air di Provinsi Kepulauan Riau	85.145.800,00	49.453.100,00	58,08	
<b>Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Data(dokumen) Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuan dan Peraturan yang berlaku</b>	<b>125.466.600,00</b>	<b>86.173.400,00</b>	<b>68,68</b>	
Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Penetapan Pajak Air Tanah sesuai Ketentuandan Peraturan yang berlaku	60.373.800,00	33.084.550,00	54,80	
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Tertib pemanfaatan airtanah	65.092.800,00	53.088.850,00	81,56	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN</b>					
	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	3.050.329.680,00	3.014.180.640,63	98,81	
<b>Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi</b>	<b>Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)</b>	<b>3.050.329.680,00</b>	<b>3.014.180.640,63</b>	<b>98,81</b>	
Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersedianya data, peraturan, kebijakan daerah terkait konservasi energi di Provinsi Kepulauan Riau	72.070.050,00	71.238.650,00	98,85	
Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terpeliharanya aset EBT di Provinsi Kepulauan Riau	2.754.313.630,00	2.742.121.590,63	99,56	
	Tersedianya sistem data energi				
Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta yang mengikuti bimbingan teknis konservasi energi	155.324.000,00	132.950.800,00	85,60	
Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi di Provinsi Kepulauan Riau	68.622.000,00	67.869.600,00	98,90	



<b>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>		<b>8.268.692.888,00</b>	<b>8.051.613.329,29</b>	<b>97,37</b>	
	<b>Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan</b>				
	<b>Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik</b>				
	<b>Rasio Elektrifikasi</b>				
<b>Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia</b>	<b>Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan</b>	<b>16.940.000,00</b>	<b>14.981.200,00</b>	<b>88,44</b>	
<b>Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</b>					
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Persentase Jumlah Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	16.940.000,00	14.981.200,00	88,44	
<b>Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Operasi Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan</b>	<b>104.845.000,00</b>	<b>82.443.000,00</b>	<b>78,63</b>	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi	50.000.000,00	38.361.000,00	76,72	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pemegang Perizinan Operasi Yang telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	54.845.000,00	44.082.000,00	80,38	



<b>Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</b>	<b>Persentase Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan</b>	65.715.000,00	47.734.866,00	72,64	
Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas	37.500.000,00	22.647.700,00	60,39	
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Pemegang Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Usaha Sesuai Ketentuan	28.215.000,00	25.087.166,00	88,91	
<b>Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu,</b>	<b>Persentase Penyediaan Listrik bagi Masyarakat di</b>	<b>8.081.192.888,00</b>	<b>7.906.454.263,29</b>	<b>97,84</b>	
<b>Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</b>	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>				
Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Penyediaan Listrik bagi Rumah Penduduk Miskin	1.705.405.863,00	1.631.220.943,00	95,65	
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Data desa-desa berlistrik dan belum berlistrik di Provinsi Kepulauan Riau	47.438.000,00	33.039.400,00	69,65	



Pembangunan SaranaPenyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Genset yang tersedia di daerah terpencil dan perdesaan Provinsi Kepulauan Riau	6.170.672.025,00	6.091.280.836,29	98,71	
	Jumlah Pembangunan Penerangan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau				
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				
Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan SaranaPenyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Pemeliharaan Pembangkit Listrik Desa	157.677.000,00	150.913.084,00	95,71	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>					
	<b>Persentase terlaksananya kegiatanpenunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>	<b>12.754.964.179,00</b>	<b>12.544.985.200,00</b>	<b>98,35</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran danEvaluasi PerangkatDaerah</b>	<b>149.040.600,00</b>	<b>144.449.500,00</b>	<b>96,92</b>	
Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	149.040.600,00	144.449.500,00	96,92	
Administrasi Keuangan PerangkatDaerah	Persentase terlaksananya kegiatanpenunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	9.758.605.350,00	9.657.186.877,00	98,96	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	9.312.799.850,00	9.218.902.677,00	98,99	
Penyediaan Administrasi	Terpenuhinya Penyediaan AdministrasiASN	291.548.000,00	289.409.200,00	99,27	
Pelaksanaan TugasASN					





Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	154.257.500,00	148.875.000,00	96,51	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	94.800.000,00	77.400.000,00	81,65	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.800.000,00	36.800.000,00	100,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.000.000,00	40.600.000,00	70,00	
		<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Anggaran</b>	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1.112.771.479,00	1.056.278.253,00	94,92	
Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Peralatandan Perlengkapan Kantor	230.714.236,00	226.435.335,00	98,15	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan Bahan logistik kantor	112.594.432,00	104.646.638,00	92,94	
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetakandan Penggandaan	76.709.200,00	73.983.150,00	96,45	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	692.753.611,00	651.213.130,00	94,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	1.302.694.750,00	1.292.198.807,00	99,19	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa Pelayanan Umum Kantor	1.302.694.750,00	1.292.198.807,00	99,19	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	337.052.000,00	317.471.763,00	94,19	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah pemenuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya	247.220.000,00	228.078.563,00	92,26	



Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan peralatandan mesin lainnya	39.754.000,00	39.443.200,00	99,22	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor ataubangunan lainnya	16.650.000,00	16.650.000,00	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah pemenuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	33.428.000,00	33.300.000,00	99,62	

### 30. Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Alokasi anggaran untuk Urusan Perdagangan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 5.338.051.329,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 5.016.035.690,00 atau sebesar (93,97%), pada urusan Pilihan Perdagangan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.30**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Perdagangan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Perdagangan		5.338.051.329,00	5.016.035.690,00	93,97	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	1.448.270.642,00	1.398.987.970,00	96,60	
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang	1.448.270.642,00	1.398.987.970,00	96,60	



	Komoditas				
Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang dibina	1.448.270.642,00	1.398.987.970,00	96,60	
Jumlah Pengelola Sarana Perdaganganyang dibina					
Data Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan tingkat Provinsi Kepri					
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Nilai Inflasi</b>	<b>2.817.882.697,00</b>	<b>2.622.806.873,00</b>	<b>93,08</b>	
<b>Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</b>	<b>Koefisien harga barang Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>	<b>2.817.882.697,00</b>	<b>2.622.806.873,00</b>	<b>93,08</b>	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Koefesien harga barang Pokok danBarang Penting antar waktu	117.535.200,00	115.776.549,00	98,50	
Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Operasi Pasar yang dilaksanakan	2.700.347.497,00	2.507.030.324,00	92,84	
<b>Program Pengembangan Ekspor</b>	<b>Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri</b>	<b>118.952.940,00</b>	<b>110.797.647,00</b>	<b>93,14</b>	
<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi</b>	<b>Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang difasilitasi promosi</b>	<b>118.952.940,00</b>	<b>110.797.647,00</b>	<b>93,14</b>	



	<b>Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina</b>				
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Promosi	46.395.800,00	44.213.049,00	95,30	
	Koordinasi dan Sosialisasi Bidang Perdagangan Luar Negeri				
	Dukungan dan Fasilitas Perdagangan LuarNegeri				
	Identifikasi Keterangan Perdagangan LuarNegeri				
	Fasilitas BusinessTrade Centre				
	Pendataan EksporImpor Provinsi Kepri				
<b>Peningkatan Citra Produk Ekspor</b>	<b>Jumlah Merk / Brand lokal yangdicitrakan didalam dan luarnegeri</b>	<b>26.711.000,00</b>	<b>23.055.246,00</b>	<b>86,31</b>	
	<b>Laporan Pemetaan Produk Unggulan Ekspor</b>				
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah UKM Ekspor yangdibina	45.846.140,00	43.529.352,00	94,95	
	Jumlah UKM Potensial Ekspor yang dibina				
	Jumlah ASN yang dilatih				
<b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuaiStandar pada saat dilakukan Pengawasan</b>	<b>952.945.050,00</b>	<b>883.443.200,00</b>	<b>92,71</b>	
<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Informasi Perlindungan Konsumen yang disebarluaskan</b>	<b>919.580.000,00</b>	<b>850.580.000,00</b>	<b>92,50</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	919.580.000,00	850.580.000,00	92,50	
<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredardan/atau Jasa diSeluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Jumlah Produk yang diawasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>	<b>33.365.050,00</b>	<b>32.863.200,00</b>	<b>98,50</b>	
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai	Jumlah Produk yang diawasi sesuai denganperaturan perundang-undangan	33.365.050,00	32.863.200,00	98,50	



Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen					
--	--	--	--	--	--

### 31. Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Alokasi anggaran untuk Urusan Perindustrian pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 18.580.568.131,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 18.193.379.238,00 atau sebesar (97,92%), pada urusan pilihan Perindustrian tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.31**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Perindustrian		18.580.568.131,00	18.193.379.238,00	97,92	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	13.825.908.392,00	13.590.153.515,00	98,29	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tersusun	169.464.350,00	168.807.384,00	99,61	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	29.863.000,00	99,54	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	139.464.350,00	138.944.384,00	99,63	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	9.023.969.259,00	8.851.850.896,00	98,09	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran	8.602.761.259,00	8.443.132.896,00	98,14	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran	421.208.000,00	408.718.000,00	97,03	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	882.958.912,00	860.042.561,00	97,40	



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik	84.851.900,00	84.791.230,00	99,93	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	46.040.000,00	46.038.000,00	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	743.067.012,00	720.213.331,00	96,92	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD yang dioperasikan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	3.008.405.000,00	2.990.294.625,00	99,40	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.200.000,00	60,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.800.000,00	286.400.000,00	95,53	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.706.605.000,00	2.702.694.625,00	99,86	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihar sesuai rencana kebutuhan</b>	741.110.871,00	719.158.049,00	97,04	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	9.188.671,00	1.490.400,00	16,22	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	256.432.500,00	252.265.000,00	98,37	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	475.489.700,00	465.402.649,00	97,88	
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN</b>	<b>Kontribusi Industri Pengolahan</b>	<b>4.698.868.139,00</b>	<b>4.550.486.053,00</b>	<b>96,84</b>	



<b>PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Terhadap PDRB</b>				
<b>Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>	<b>Nilai Produktivitas Industri Pengolahan</b>	<b>4.698.868.139,00</b>	<b>4.550.486.053,00</b>	<b>96,84</b>	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Industri	302.692.600,00	301.607.371,00	99,64	
	Jumlah Dokumen Manajemen Mutu				
	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Industri				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Pelaku Industri yang dibina	350.000.000,00	344.134.187,00	98,32	
Pembangunan Sumber Daya Industri					
	Jumlah Pelaku Industri yang difasilitasi				
	Jumlah Peralatan				
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi	2.891.382.734,00	2.761.077.115,00	95,49	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Calon Wirausaha Baru yang dilatih	1.154.792.805,00	1.143.667.380,00	99,04	
	Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi				
	Jumlah Bulan Pendataan				
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Persentase Izin Usaha Industri</b>	<b>55.821.600,00</b>	<b>52.739.670,00</b>	<b>94,48</b>	
<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah Rekomendasi dan Pengawasan Industri</b>	<b>55.821.600,00</b>	<b>52.739.670,00</b>	<b>94,48</b>	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan	Jumlah Industri yang terfasilitasi	29.563.200,00	29.418.120,00	99,51	



provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					
yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Perizinan Industri yang Menjadi Kewenangan Provinsi	26.258.400,00	23.321.550,00	88,82	

### 32. Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Alokasi anggaran untuk Urusan Transmigrasi pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 30.000.000,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 15.692.472,00 atau sebesar (52,31%), pada urusan Transmigrasi tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.32**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pilihan Perindustrian Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Urusan Transmigrasi		30.000.000,00	15.692.472,00	52,31	
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		10.000.000,00	7.769.872,00	77,70	
	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan				
Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah wilayah pencadangan yang memenuhi syarat	10.000.000,00	7.769.872,00	77,70	
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan yang dilaksanakan	10.000.000,00	7.769.872,00	77,70	





Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		10.000.000,00	7.922.600,00	79,23	
	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi				
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase persebaran penduduk yang mendapat penataan	10.000.000,00	7.922.600,00	79,23	
		Anggaran	Realisasi	% Anggaran	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi AntarPemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi AntarPemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	10.000.000,00	7.922.600,00	79,23	
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi		10.000.000,00	-	-	
	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan				
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Persentase kawasan transmigrasi yang berkembang	10.000.000,00	-	-	
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Jumlah fasilitasi Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman yang dilaksanakan	10.000.000,00	-	-	

### 33. Sekretariat Daerah

Unsur penunjang Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Alokasi anggaran untuk Urusan Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 320.044.976.012,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 310.859.797.743,32 atau sebesar (97,13%), pada unsur penunjang Sekretariat Daerah tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:



**Tabel 3.2.33**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang**  
**Sekretariat Daerah Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
<b>Sekretariat Daerah</b>		<b>320.044.976.012,00</b>	<b>310.859.797.743,32</b>	<b>97,13</b>	
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>					
	<b>Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)</b>	<b>1.222.749.851,00</b>	<b>1.092.788.435,00</b>	<b>89,37</b>	
<b>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</b>	<b>337.226.808,00</b>	<b>280.519.898,00</b>	<b>83,18</b>	
Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	230.951.810,00	209.921.351,00	<b>90,89</b>	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	79.015.450,00	53.690.110,00	<b>67,95</b>	
Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan	27.259.548,00	16.908.437,00	<b>62,03</b>	
<b>Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>490.595.600,00</b>	<b>449.158.041,00</b>	<b>91,55</b>	
Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	38.593.800,00	34.032.480,00	<b>88,18</b>	
Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	70.838.000,00	65.293.325,00	<b>92,17</b>	
Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	381.163.800,00	349.832.236,00	<b>91,78</b>	
<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>394.927.443,00</b>	<b>363.110.496,00</b>	<b>91,94</b>	
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang difasilitasi	248.353.220,00	238.368.360,00	95,98	
Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang difasilitasi	69.766.225,00	62.700.363,00	<b>89,87</b>	



Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah Kerja Samayang dievaluasi	76.807.998,00	62.041.773,00	<b>80,78</b>	
<b>PROGRAM KESEJAHTER AANRAKYAT</b>	<b>Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan</b>	100.997.808.069,00	<b>97.974.995.353,00</b>	<b>97,01</b>	
<b>Fasilitasi Pembinaan MentalSpiritual</b>	<b>Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembinaan MentalSpiritual yang Dihasilkan</b>	<b>94.326.073.589,00</b>	<b>91.761.602.273,00</b>	<b>97,28</b>	
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Frekuensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	77.831.453.340,00	76.243.255.400,00	97,96	
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Frekuensi Fasilitasi Kelembagaan BinaSpiritual	16.494.620.249,00	15.518.346.873,00	94,08	
<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</b>	<b>Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat PelayananDasar yang Dihasilkan</b>	<b>6.503.073.480,00</b>	<b>6.082.216.977,00</b>	<b>93,53</b>	
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan yang dihasilkan	6.250.120.480,00	5.923.562.677,00	94,78	
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan yang dihasilkan	206.523.000,00	122.745.000,00	59,43	
Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial yang dihasilkan	46.430.000,00	35.909.300,00	77,34	
Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial					
<b>Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</b>	<b>Persentase Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang Dihasilkan</b>	<b>168.661.000,00</b>	<b>131.176.103,00</b>	<b>77,78</b>	



Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang dihasilkan	46.429.000,00	32.721.729,00	70,48	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang dihasilkan	75.802.000,00	64.683.500,00	85,33	
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi,	46.430.000,00	33.770.874,00	72,74	
Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan yang dihasilkan				
<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan</b>	<b>2.277.047.781,00</b>	<b>2.194.950.162,00</b>	<b>96%</b>	
<b>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</b>	<b>Persentase Produk Hukum daerah yang difasilitasi penyusunannya</b>	<b>1.579.739.581,00</b>	<b>1.536.144.246,00</b>	<b>97%</b>	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Persentase produk hukum pengaturan yang difasilitasi	903.188.000,00	896.503.814,00	99%	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Persentase Produk Hukum Penetapan yang difasilitasi	172.605.481,00	171.103.062,00	99%	
Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Persentase Produk Hukum yang didokumentasikan	197.266.000,00	179.781.932,00	91%	
Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi	306.680.100,00	288.755.438,00	94%	



4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase bantuan hukum yang difasilitasi	697.308.200,00	658.805.916,00	94%	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Penyelesaian masalah hukum yang difasilitasi	298.146.000,00	296.761.600,00	99%	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah sengketa yang	399.162.200,00	362.044.316,00	91%	
<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual</b>	<b>1.053.063.650,00</b>	<b>947.762.343,00</b>	<b>90%</b>	
<b>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>710.126.350,00</b>	<b>633.742.578,00</b>	<b>89.24%</b>	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	289.148.700,00	274.034.194,00	94.77%	
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi	140.000.000,00	117.743.410,00	84.10%	
	Pelaksanaan Pembangunan APBN				
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	280.977.650,00	241.964.974,00	86.12%	
<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>342.937.300,00</b>	<b>314.019.765,00</b>	<b>91.57%</b>	
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	90.000.000,00	86.207.400,00	95.79%	
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	141.032.000,00	124.992.865,00	88.63%	
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	111.905.300,00	102.819.500,00	91.88%	



<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti</b>	<b>717.435.542,00</b>	<b>526.924.552,00</b>	<b>73,45%</b>	
<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</b>	<b>Jumlah Rekomendasi dan kebijakan dibidang perekonomian yang disusun</b>	<b>351.287.940,00</b>	<b>293.703.798,00</b>	<b>83.61%</b>	
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pengelolaan	81.299.340,00	60.690.180,00	74.65%	
	Kebijakan Ekonomi Makro Yang Disusun				
Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro Yang Disusun	269.988.600,00	233.013.618,00	86.30%	
<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah rekomendasi dan kebijakan bidang sumberdaya alam yang disusun</b>	<b>171.455.230,00</b>	<b>117.485.692,00</b>	<b>68.52%</b>	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Energi dan Air yang disusun	82.145.790,00	51.976.992,00	63.27%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup yang disusun	33.212.440,00	31.389.100,00	94.51%	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Rekomendasi dan Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang disusun	56.097.000,00	34.119.600,00	60.82%	
<b>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</b>	<b>Jumlah Dokumen Kebijakan BUMD dan BLUD yang disusun</b>	<b>194.692.372,00</b>	<b>115.735.062,00</b>	<b>59.45%</b>	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang disusun	1.666.000,00	1.638.000,00	98.32%	
Koordinasi, Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Kebijakan	122.324.372,00	53.409.681,00	43.66%	



Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BadanUsaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Pengelolaan BadanUsaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi yang disusun				
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BadanUsaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan BadanUsaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha yang disusun	70.702.000,00	60.687.381,00	85,84%	
<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif</b>	<b>851.241.993,00</b>	<b>813.337.418,00</b>	<b>95,55</b>	
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Rasio Nilai Belanjayang Dilakukan Melalui Pengadaan</b>	<b>561.177.293,00</b>	<b>538.929.457,00</b>	<b>96,04</b>	
Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen yang Disusun	48.400.000,00	39.506.042,00	81,62	
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa yang Proses Pemilihannya Diselesaikan Sesuai Perencanaan	478.915.086,00	468.280.915,00	97,78	
Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen yang Disusun	33.862.207,00	31.142.500,00	91,97	
<b>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	<b>Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif</b>	<b>234.064.700,00</b>	<b>227.799.155,00</b>	<b>97,32</b>	
Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan Secara Elektronik	48.400.000,00	46.080.681,00	95,21	
Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Sistem Informasi Berbasis Web yang Dikembangkan dan/atau Dikelola oleh Biro PBJ	143.742.200,00	142.787.007,00	99,34	
Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen yang Disusun	41.922.500,00	38.931.467,00	92,87	
<b>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Jumlah UKPBJ Kab/Kota yang Mengikuti Pembinaan</b>	<b>56.000.000,00</b>	<b>46.608.806,00</b>	<b>83,23</b>	



<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	745.961.500,00	692.491.646,00	92,83%	
<b>Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	Jumlah Dokumen Kelembagaan dan Analisa Jabatan yang Disusun	213.196.980,00	186.571.459,00	87,51%	
Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang ditata kelebagaanya	118.843.600,00	102.020.296,00	85,84%	
Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang ditata kelebagaanya	21.653.300,00	21.469.500,00	99,15%	
Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen analisa jabatan	72.700.080,00	63.081.663,00	86,77%	
<b>Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</b>	Jumlah dokumen pembinaan pelaksanaan RB dan Akuntabilitas Kinerja	532.764.520,00	505.920.187,00	94,96%	
Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	147.014.640,00	144.744.050,00	98,46%	
Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Tersusunnya dokumen laporan akuntabilitas kinerja	61.946.880,00	53.293.983,00	86,03%	
Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang dibina dan dievaluasi pelaksanaan Budaya Kerjanya	22.419.000,00	21.420.000,00	95,54%	
Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Tatalaksana pemerintah yang dikelola	108.728.000,00	103.966.935,00	95,62%	
Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil pembinaan pelayanan publik	192.656.000,00	182.495.219,00	94,73%	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>212.179.667.626,00</b>	<b>206.616.547.834,32</b>	<b>97,38</b>	
	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor (Biro Umum)</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tersusun (Biro Umum)</b>	619.237.640,00	580.170.105,00	93,69	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan (Biro	139.700.300,00	138.208.664,00	98,93	





	Adpim)				
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	22.808.500,00	17.729.400,00	77,73	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	85.000.000,00	77.093.447,00	90,70	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah dikoordinasikan dan disusun (Biro Umum)	344.677.040,00	322.164.594,00	93,47	
	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang dihasilkan (Biro Adpim)				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Biro Adpim)	27.051.800,00	24.974.000,00	92,32	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu (Biro Umum)</b>	66.660.478.542,00	65.504.682.270,00	98,27	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN (Biro Umum)	62.448.061.792,00	61.345.476.684,00	98,23	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pemenuhan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Biro Umum)	3.359.351.250,00	3.314.413.500,00	98,66	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Frekuensi Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Biro Umum)	434.033.500,00	429.962.200,00	99,06	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Frekuensi Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Biro Umum)	170.065.000,00	169.891.386,00	99,90	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang telah dikoordinasikan dan disusun (Biro Umum)	45.000.000,00	41.402.000,00	92,00	
Pengelolaan dan Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan dan	45.000.000,00	44.741.000,00	99,42	



Tanggapan Pemeriksaan	Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun (Biro Umum)				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran yang telah dikordinasikan dan tersusun (Biro Umum)	158.967.000,00	158.795.500,00	99,89	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah teradministrasi dengan baik (Biro Umum)</b>	1.218.153.500,00	1.187.976.788,00	97,52	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun (Biro Umum)	52.887.000,00	52.780.000,00	99,80	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Frekuensi Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Biro Umum)	605.178.000,00	588.898.709,00	97,31	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Peserta Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Biro Umum)	212.648.500,00	211.481.100,00	99,45	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang telah direkonsiliasi dan disusun (Biro Umum)	44.277.000,00	42.552.000,00	96,10	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Frekuensi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Biro Umum)	303.163.000,00	292.264.979,00	96,41	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu (Biro Umum)	1.914.847.100,00	1.811.637.480,00	94,61	
	<b>Persentase terlaksananya kegiatan penunjangurusan pemerintahan daerah provinsi (Biro Adpim)</b>				
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan (Biro	91.808.800,00	91.568.200,00	99,74	



	Umum)				
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan (Biro Umum)	952.802.600,00	930.713.870,00	97,68	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Frekuensi Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Biro Umum)	36.479.300,00	36.332.100,00	99,60	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Biro Umum)	284.322.000,00	246.203.859,00	86,59	
	Jumlah peserta pendidikan / pelatihan Terlaksananya pendidikan/ pelatihan (Biro Adpim)				
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Biro Umum)	443.499.800,00	418.807.851,00	94,43	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Biro Umum)	105.934.600,00	88.011.600,00	83,08	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Biro Umum)</b>	35.017.102.032,00	34.197.429.161,00	97,66	
	<b>Persentase terlaksananya kegiatan penunjangurusan pemerintahan daerah provinsi (Biro Adpim)</b>				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.999.400,00	17.067.600,00	85,34	
Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Biro Umum)	5.241.830.971,00	5.211.648.489,00	99,42	
Penyediaan Peralatan RumahTangga	Frekuensi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Biro Umum)	808.332.650,00	802.027.800,00	99,22	
	Frekuensi peralatan rumah tangga (BiroAdpim)				
Penyediaan BahanLogistik Kantor	Frekuensi PenyediaanBahan Logistik Kantor (Biro Umum)	10.722.519.213,00	10.628.407.756,00	99,12	



	Frekuensi pemenuhan kebutuhan Bahan Logistik Kantor (Biro Adpim)				
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Biro Umum)	578.759.085,00	535.393.400,00	92,51	
	Frekuensi pemenuhan kebutuhan jasa Barang Cetak dan Penggandaan (Biro Adpim)				
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Biro Umum)	152.818.100,00	150.707.900,00	98,62	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Fasilitasi Kunjungan Tamu (Biro Umum)	10.785.188.003,00	10.714.605.191,00	99,35	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Biro Umum)	6.276.519.710,00	5.718.039.279,00	91,10	
	Frekuensi pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah (Biro Adpim)				
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Frekuensi Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Biro Umum)	313.674.500,00	305.024.318,00	97,24	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Frekuensi Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Biro Umum)	117.460.400,00	114.507.428,00	97,49	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Biro Umum)</b>	25.241.985.730,00	23.932.959.132,00	94,81	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan (Biro Umum)	1.436.030.000,00	1.357.945.869,00	94,56	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (Biro Umum)	19.736.069.727,00	18.677.020.585,00	94,63	



Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang diadakan (Biro Umum)	3.663.438.559,00	3.503.199.568,00	95,63	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		406.447.444,00	394.793.110,00	97,13	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Biro Umum)</b>	41.586.269.218,00	40.432.502.408,25	97,23	
	<b>Persentase terlaksananya kegiatan penunjangurusan pemerintahan daerah provinsi (Biro Adpim)</b>				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Biro Umum)	974.221.400,00	944.891.250,00	96,99	
	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Biro Adpim)				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Biro Umum)	8.414.677.299,00	7.636.330.173,00	90,75	
	Frekuensi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Biro Adpim)				
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor(Biro Umum)	8.592.988.000,00	8.536.961.801,00	99,35	
	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan				
	Perlengkapan Kantor(Biro Adpim)				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Biro Umum)	23.604.382.519,00	23.314.319.184,25	98,77	
	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Biro Adpim)				
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara (Biro Umum)</b>	<b>22.534.620.271,00</b>	<b>22.004.642.039,07</b>	<b>97,65</b>	



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Biro Umum)	1.364.511.788,00	1.351.871.763,00	99,07	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Biro Umum)	7.876.635.767,00	7.479.706.712,00	94,96	
Pemeliharaan Mebel	Frekuensi Pemeliharaan Mebel (Biro Umum)	194.935.000,00	193.090.000,00	99,05	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Biro Umum)	6.213.115.525,00	6.140.989.450,00	98,84	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (Biro Umum)	1.001.531.325,00	998.967.264,00	99,74	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Biro Umum)	5.776.196.466,00	5.733.597.173,38	99,26	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Biro Umum)	107.694.400,00	106.419.676,69	98,82	
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tepat waktu (Biro Umum)</b>	2.682.789.568,00	2.528.498.686,00	94,25	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Biro Umum)	226.238.124,00	224.616.862,00	99,28	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Biro Umum)	276.249.850,00	275.941.000,00	99,89	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	Frekuensi Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil	140.705.000,00	5.200.400,00	3,70	



Kepala Daerah					
Kepala Daerah (Biro Umum)					
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Biro Umum)	2.039.596.594,00	2.022.740.424,00	99,17	
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah (Biro Umum)	7.366.214.690,00	7.169.057.113,00	97,32	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (Biro Umum)	3.292.632.235,00	3.185.407.943,00	96,74	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (Biro Umum)	2.433.991.940,00	2.360.389.265,00	96,98	
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Frekuensi Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Biro Umum)	1.639.590.515,00	1.623.259.905,00	99,00	
<b>Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan (Biro Umum)</b>	<b>2.643.674.106,00</b>	<b>2.612.727.022,00</b>	<b>98,83</b>	
	<b>Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>				
	<b>Biro Adpimi</b>				
Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah dokumen penyiapan materi pimpinan yang dibuat (Biro Adpim)	245.600.000,00	244.513.050,00	99,56	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Frekuensi Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Biro Umum)	2.092.609.106,00	2.063.291.001,00	98,60	
	Frekuensi penayangan dan pemberitaan kegiatan KDh/WKDh pada media massa dan media informasi lainnya (Biro Adpim)				
Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Frekuensi pemenuhan Dukungan Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi	305.465.000,00	304.922.971,00	99,82	



	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Biro Adpim)				
<b>Fasilitasi Keprotokolan</b>	<b>Persentase terlaksananya kegiatan penunjangurusan pemerintahan daerah provinsi (Biro adpim)</b>	4.694.295.229,00	4.654.265.630,00	99,15	
Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Frekuensi Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara (Biro Adpim)	2.189.912.833,00	2.175.023.963,00	99,32	
Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Frekuensi Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Biro Adpim)	1.729.876.590,00	1.706.395.460,00	98,64	
Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Frekuensi Pengelolaan Hubungan Keprotokolan (Biro Adpim)	774.505.806,00	772.846.207,00	99,79	

### 34. Sekretariat DPRD

Unsur penunjang Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Alokasi anggaran untuk Urusan Sekretariat DPRD padatahun anggaran 2022 sebesar Rp 155.746.039.370,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 151.056.302.981,25 atau sebesar (96,99%), pada unsur penunjang Sekretariat DPRD tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.34**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Sekretariat DPRD Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Sekretariat DPRD		155.746.039.370,00	151.056.302.981,25	96,99	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		65.866.982.808,00	63.715.676.623,00	96,73	
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD				
	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				





<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi</b>	1.266.765.161,00	1.167.050.500,00	92,13	
Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	346.165.161,00	280.800.000,00	81,12	
Pembentukan Peraturan Daerah	Pembentukan Peraturan Daerah				
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	600.000.000,00	568.877.750,00	94,81	
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	220.600.000,00	217.437.250,00	98,57	
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	100.000.000,00	99.935.500,00	99,94	
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Jumlah dokumen penganggaran daerah</b>	322.439.900,00	282.979.607,00	87,76	
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	322.439.900,00	282.979.607,00	87,76	
<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan</b>	11.352.440.000,00	10.677.273.225,00	94,05	
Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1.355.933.000,00	775.201.087,00	57,17	
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4.541.507.000,00	4.536.232.920,00	99,88	
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	2.286.000.000,00	2.259.125.000,00	98,82	
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.169.000.000,00	3.106.714.218,00	98,03	
	Hubungan Masyarakat				
<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi</b>	26.125.385.000,00	25.361.242.035,00	97,08	
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	356.400.000,00	333.897.000,00	93,69	
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	200.000.000,00	199.666.700,00	99,83	
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	25.568.985.000,00	24.827.678.335,00	97,10	
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Tertindaknya tugas dan fungsi DPRD secara</b>	26.799.952.747,00	26.227.131.256,00	97,86	



	<b>optimal</b>				
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	26.125.267.347,00	25.585.920.006,00	97,94	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	234.400.000,00	231.173.000,00	98,62	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	282.000.000,00	262.622.000,00	93,13	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	158.285.400,00	147.416.250,00	93,13	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		89.879.056.562,00	87.340.626.358,25	97,18	
	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	1.180.734.000,00	1.162.091.200,00	98,42	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	295.666.000,00	294.598.500,00	99,64	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239.187.500,00	233.594.600,00	97,66	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	274.246.000,00	270.586.400,00	98,67	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	75.000.000,00	74.790.000,00	99,72	
	Realisasi Kinerja SKPD				
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	296.634.500,00	288.521.700,00	97,27	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya</b>	42.652.936.817,00	41.559.426.713,00	97,44	



Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41.210.200.817,00	40.187.005.613,00	97,52	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	867.736.000,00	809.472.000,00	93,29	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	203.000.000,00	197.627.600,00	97,35	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	174.000.000,00	172.384.700,00	99,07	
4.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	198.000.000,00	192.936.800,00	97,44	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</b>	204.793.100,00	126.795.456,25	61,91	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	94.547.100,00	83.495.456,25	88,31	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33.250.000,00	27.700.000,00	83,31	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	76.996.000,00	15.600.000,00	20,26	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	25.007.888.137,00	24.969.089.321,00	99,84	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.824.489.137,00	1.800.803.200,00	98,70	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14.783.399.000,00	14.769.649.206,00	99,91	



Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8.400.000.000,00	8.398.636.915,00	99,98	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah aset yang diadakan</b>	4.336.534.800,00	4.203.441.300,00	96,93	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	959.210.400,00	946.716.000,00	98,70	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	2.850.100.000,00	2.748.300.000,00	96,43	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	335.460.200,00	322.389.900,00	96,10	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	191.764.200,00	186.035.400,00	97,01	
<b>4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan</b>	7.609.573.500,00	6.809.414.765,00	89,48	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.870.273.500,00	1.792.628.390,00	95,85	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.739.300.000,00	5.016.786.375,00	87,41	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase sarana prasaran kondisi baik</b>	7.228.130.975,00	7.143.563.630,00	98,83	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.295.052.000,00	3.271.550.845,00	99,29	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	502.970.000,00	498.675.550,00	99,15	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	346.116.175,00	332.740.900,00	96,14	
Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	3.083.992.800,00	3.040.596.335,00	98,59	



Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				
<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Pemenuhan kebutuhan administrasi dprd</b>	472.760.000,00	376.942.373,00	79,73	
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	472.760.000,00	376.942.373,00	79,73	
<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraannya</b>	1.185.705.233,00	989.861.600,00	83,48	
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	102.705.233,00	97.724.100,00	95,15	
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	650.000.000,00	573.077.500,00	88,17	
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	433.000.000,00	319.060.000,00	73,69	

### 35. Perencanaan

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Alokasi anggaran untuk Urusan Perencanaan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 33.614.122.893,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 31.653.336.382,00 atau sebesar (94,17%), pada urusan Perencanaan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.35**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Perencanaan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
<b>Perencanaan</b>		33.614.122.893,00	31.653.336.382,00	94,17	
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota	2.554.132.030,00	2.398.046.160,00	93,89	
<b>5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun</b>	<b>1.310.281.700,00</b>	<b>1.263.317.766,00</b>	<b>96,42</b>	



Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Analisis Kondisi Daerah Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	7.715.800,00	3.302.000,00	42,80	
	Jumlah laporan Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau				
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah laporan Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota	129.747.600,00	128.346.200,00	98,92	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan konsultasi publik RKPD Provinsi Kepulauan Riau	45.300.400,00	43.202.000,00	95,37	
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau	726.332.000,00	725.880.466,00	99,94	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2022	401.185.900,00	362.587.100,00	90,38	
	Jumlah dokumen RKPD Provinsi Kepri Tahun 2023				
<b>5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana</b>	<b>602.533.300,00</b>	<b>564.570.400,00</b>	<b>93,70</b>	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	282.293.900,00	268.942.200,00	95,27	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	148.836.900,00	138.451.300,00	93,02	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Tersusunnya Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau	171.402.500,00	157.176.900,00	91,70	



<b>5.01.02.1.03</b> <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana</b>	<b>641.317.030,00</b>	<b>570.157.994,00</b>	<b>88,90</b>	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau	203.763.000,00	178.489.000,00	87,60	
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	212.535.900,00	184.125.600,00	86,63	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	98.476.030,00	94.791.800,00	96,26	
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota	126.542.100,00	112.751.594,00	89,10	
Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	4.965.759.020,00	3.859.584.373,00	77,72	
	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD				
<b>5.01.03.1.01</b> <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>1.810.623.100,00</b>	<b>933.688.795,00</b>	<b>51,57</b>	
	<b>Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>				
	<b>Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota</b>				



	<b>Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	122.323.600,00	117.255.934,00	95,86	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	90.359.000,00	75.709.915,00	83,79	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota Bidang Pemerintahan	377.618.300,00	356.439.718,00	94,39	
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Pemerintahan				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	124.173.000,00	112.617.873,00	90,69	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	89.343.800,00	77.468.000,00	86,71	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	98.339.000,00	91.972.459,00	93,53	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota Bidang Pembangunan Manusia	908.466.400,00	102.224.896,00	11,25	





	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Pembangunan Manusia				
5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomiandan SDA (Sumber Daya Alam)	<b>Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	1.125.157.500,00	1.046.046.678,00	92,97	
	<b>Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>				
	<b>Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	390.546.500,00	352.124.100,00	90,16	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	64.091.500,00	61.707.700,00	96,28	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	89.516.900,00	87.297.200,00	97,52	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota	299.879.200,00	284.394.600,00	94,84	



Daerah Bidang Perekonomian	Bidang Perekonomian				
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Perekonomian				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	116.504.300,00	109.752.300,00	94,20	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	67.096.900,00	55.043.800,00	82,04	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	9.946.600,00	9.470.100,00	95,21	
	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang SDA				
<b>5.01.03.1.03</b> Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<b>Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>2.029.978.420,00</b>	<b>1.879.848.900,00</b>	<b>92,60</b>	
	<b>Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>				
	<b>Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>				
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	444.664.000,00	406.405.500,00	91,40	



Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	408.903.700,00	391.576.400,00	95,76	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	616.407.720,00	554.098.100,00	89,89	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Perencanaan Kabupaten Kota Bidang Infrastruktur	560.003.000,00	527.768.900,00	94,24	
Laporan Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Dokumen Prioritas Nasional Bidang Infrastruktur					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	26.094.231.843,00	25.395.705.849,00	97,32	
<b>4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD</b>	<b>194.371.236,00</b>	<b>174.014.853,00</b>	<b>89,53</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.830.610,00	99.163.953,00	90,29	
	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan				
	Dokumen Renjana Renja Perubahan Barenlitbang				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan realisasi fisik dan keuangan barenlitbang yang tersusun	41.562.176,00	35.933.200,00	86,46	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen LKJIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang tersusun	42.978.450,00	38.917.700,00	90,55	



<b>4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>18.016.377.919,00</b>	<b>17.641.782.806,00</b>	<b>97,92</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.145.229.919,00	16.785.096.628,00	97,90	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Administrasi Keuangan	695.114.000,00	692.312.000,00	99,60	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan Barenlitbang yang disusun	32.976.200,00	31.134.110,00	94,41	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi pelaksanaan Akuntansi SKPD	62.058.200,00	54.189.208,00	87,32	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun Barenlitbang yang disusun	33.568.200,00	32.078.260,00	95,56	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terpenuhinya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	15.276.200,00	15.145.000,00	99,14	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Barenlitbang yang disusun	32.155.200,00	31.827.600,00	98,98	
<b>5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>88.040.284,00</b>	<b>81.540.610,00</b>	<b>92,62</b>	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	37.072.899,00	32.295.110,00	87,11	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan inventarisasi BMD	50.967.385,00	49.245.500,00	96,62	
	Terlaksananya Pemusnahan Aset Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan				
<b>4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>900.104.000,00</b>	<b>889.455.000,00</b>	<b>98,82</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang mengikuti Sertifikasi Pelatihan	4.580.000,00	4.515.000,00	98,58	



	Kompetensi				
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur perencana di seluruh Perangkat Daerah yang mengikuti Pelatihan/bimtek perencanaan	395.524.000,00	392.725.000,00	99,29	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi	500.000.000,00	492.215.000,00	98,44	
<b>4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.544.653.550,00</b>	<b>2.371.694.338,00</b>	<b>93,20</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	58.740.100,00	57.375.100,00	97,68	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	154.378.000,00	138.609.000,00	89,79	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan alat tulis kantor dan Benda Pos	407.892.000,00	406.507.000,00	99,66	
	Pemenuhan BBM Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional				
Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	223.367.000,00	222.875.000,00	99,78	
Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	349.120.000,00	346.360.000,00	99,21	
Penyediaan Bahan/Material	Terpenuhinya Penyediaan Bahan/Material	62.026.300,00	61.276.300,00	98,79	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	100.761.000,00	90.082.150,00	89,40	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	860.968.150,00	761.760.908,00	88,48	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Updating Datad an Informasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	327.401.000,00	286.848.880,00	87,61	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pemenuhan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	75.572.000,00	68.160.400,00	90,19	



Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	239.650.289,00	232.898.800,00	97,18	
<b>4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.934.736.458,00</b>	<b>2.857.058.654,00</b>	<b>97,35</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.040.000,00	100.450.113,00	58,05	
Penyediaan Jasa Peralat dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan jasa Peralat dan Perlengkapan Kantor	242.000.000,00	241.760.000,00	99,90	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pelayanan umum Kantor	2.504.696.458,00	2.499.848.541,00	99,81	
<b>4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>861.973.707,00</b>	<b>841.653.288,00</b>	<b>97,64</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.560.000,00	76.486.300,00	99,90	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemenuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	533.600.000,00	533.534.350,00	99,99	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.813.707,00	22.960.500,00	92,53	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	227.000.000,00	208.672.138,00	91,93	



### 36. Keuangan

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah:

#### a. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi anggaran untuk Unsur Penunjang Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 858.452.764.141,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 843.842.695.483,56 atau sebesar (98,30%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 100%. Jumlah indikator program pada Unsur Penunjang Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 4 indikator, dengan pencapaian semua Indikator program memiliki kategori sangat tinggi, Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada unsur Penunjang Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.36.1**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Sekretariat Daerah Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Badan Keuangan dan Aset Daerah		741.245.629.569,00	729.647.779.803,00	98,44	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	692.038.274.858,00	683.402.034.161,00	98,75	
	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD				
5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan	Persentase dokumen RANPERDA APBD Provinsi yang	4.836.466.466,00	4.715.607.136,00	97,50	



	<b>disusun</b>				
<b>Rencana Anggaran Daerah</b>					
5.02.02.1.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Penyusunan KUA dan PPAS	475.000.000,00	465.912.362,00	98.09	
5.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	425.000.000,00	410.867.170,00	96,67	
5.02.02.1.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	520.679.950,00	510.686.800,00	98.08	
5.02.02.1.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	450.000.000,00	421.064.923,00	93.57	
5.02.02.1.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	475.000.000,00	463.595.991,00	97.60	
5.02.02.1.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	425.000.000,00	415.887.479,00	97.86	
5.02.02.1.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	630.000.000,00	612.076.520,00	97.16	
5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran Belanja Daerah	677.429.996,00	661.925.996,00	97.71	
5.02.02.1.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pembiayaan	150.000.000,00	149.643.700,00	99.76	
5.02.02.1.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Provinsi	608.356.520,00	603.946.195,00	99.28	
<b>5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan</b>	<b>Perentase tersedianya Keputusan</b>	<b>667.858.792,00</b>	<b>608.067.571,00</b>	<b>91.05</b>	





<b>Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Gubernur tentang hasil evaluasi RAPBD Kab kota</b>				
5.02.02.1.02.02 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Tentang APBD Kab/Kota dan Perda Penjabaran APBD Kab/Kota	223.246.000,00	198.881.154,00	89.09	
5.02.02.1.02.03 Evaluasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Tentang	246.126.000,00	215.183.224,00	87.43	
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Perubahan APBD Kab/Kota dan Perda Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota				
5.02.02.1.02.12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Frekuensi penyusunan laporan keuangan pemerintahan daerah konsolidasian propinsi dan Kab/kota dan statistik keuangan pemerintahan daerah	198.486.792,00	194.003.193,00	97.74	
<b>5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase pembinaan penatausahaan Keuangan Daerah</b>	<b>1.460.037.796,00</b>	<b>1.385.298.206,00</b>	<b>94.88</b>	
5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Frekuensi Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	274.064.096,00	263.276.678,00	96.06	
5.02.02.1.03.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Frekuensi Penatausahaan pembiayaan daerah	95.086.000,00	94.255.115,00	99.13	
5.02.02.1.03.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	Frekuensi Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan	193.632.000,00	184.451.283,00	95.26	
Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				
5.02.02.1.03.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan	Frekuensi Koordinasi, pelaksanaan kerjasamadan	244.560.000,00	226.311.293,00	92.54	



Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Ban				
5.02.02.1.03.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban SubKegiatan	459.319.700,00	440.271.677,00	95.85	
5.02.02.1.03.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Frekuensi pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	193.376.000,00	176.732.160,00	91.39	
<b>5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan laporan keuangan daerah yang tepat waktu</b>	<b>2.878.221.167,00</b>	<b>2.478.749.884,00</b>	<b>86.12</b>	
5.02.02.1.04.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Frekuensi Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	279.748.392,00	270.146.163,00	96.57	
5.02.02.1.04.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	200.000.000,00	177.117.400,00	88.56	
5.02.02.1.04.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Frekuensi Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	640.039.000,00	632.942.430,00	98.89	
5.02.02.1.04.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Perdatentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Perda tentang penjabaran pelaksanaan APBD Provinsi	442.680.000,00	372.680.188,00	84.19	
5.02.02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak	150.000.000,00	144.256.800,00	96.17	



BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Lanjut terhadap LHP BPKatas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				
5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaran AkutansiPemerintah Daerah	350.000.000,00	291.255.980,00	83.22	
5.02.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	147.067.500,00	134.179.994,00	91.24	yang realisasi lakmaksimal.
5.02.02.1.04.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Frekuensi Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	668.686.275,00	456.170.929,00	68.22	
<b>5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan ketersediaan dokumen Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>681.312.678.183,00</b>	<b>673.526.781.301,00</b>	<b>98.86</b>	
5.02.02.1.05.04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen analisisPerencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah	4.130.000.000,00	2.173.194.455,00	52.62	
5.02.02.1.05.06 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (UPT Dana Bergulir)	Frekuensi Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	482.870.200	468.621.994,00	97.05	
5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Frekuensi Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	21.790.800.000,00	18.252.778.838,00	83.76	
5.02.02.1.05.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Frekuensi Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	709.200.000,00	-	0,00	
5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Frekuensi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	654.199.807.983	652.632.186.014,00	99.76	
<b>5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup</b>	<b>Persentase Sistem informasi Pemerintah Daerah yang dikelola</b>	<b>883.012.454,00</b>	<b>687.530.063,00</b>	<b>77.86</b>	



<b>Keuangan Daerah</b>					
5.02.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Frekuensi Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	500.000.000,00	362.458.189,00	72,49	Kegiatan terlaksana namun dikarenakan adanya perubahan Narasumber yang semula direncanakan narasumber
5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Frekuensi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	654.199.807.983	652.632.186.014,00	99,76	
<b>5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Sistem informasi Pemerintah Daerah yang dikelola</b>	<b>883.012.454,00</b>	<b>687.530.063,00</b>	<b>77,86</b>	
5.02.02.1.06.02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Frekuensi Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	500.000.000,00	362.458.189,00	72,49	Kegiatan terlaksana namun dikarenakan adanya perubahan Narasumber yang semula direncanakan narasumber
5.02.02.1.06.03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi	Frekuensi Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Provinsi	383.012.454,00	325.071.874,00	84,87	
<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					
	<b>Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan</b>	<b>3.207.348.604,00</b>	<b>2.864.577.481,00</b>	<b>89,31</b>	
<b>5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase OPD tertib pelaporan BMD</b>	<b>3.207.348.604,00</b>	<b>2.864.577.481,00</b>	<b>89,31</b>	
5.02.03.1.01.01 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Keputusan Gubernur Tentang Standar Harga Satuan	508.568.500,00	481.249.300,00	71,71	
5.02.03.1.01.02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah	Jumlah Pergub Tentang Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	150.930.250,00	144.468.900,00	95,72	
5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan Inventarisasi BMD	419.838.000,00	338.802.460,00	80,70	
5.02.03.1.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang disertifikat	1.172.403.204,00	1.084.645.121,00	92,51	
5.02.03.1.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang dilakukan Penilaian	342.933.300,00	327.139.700,00	95,39	
5.02.03.1.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Frekuensi Pengawasan dan Pengendalian OPD	350.000.000,00	268.822.300,00	76,81	Pelaksanaan Kegiatan ini sudah tercapai namun dikarenakan terdapat selisih antara



					harga SSH dan harga pasar pada penginapan sehingga rincian belanja penginapan pada perjalanan dinas tidak terserap secara maksimal.
5.02.03.1.01.12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Tahunan BMD	262.675.350,00	219.449.700,00	83,54	
<b>5.02.01.1.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>					
	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>	<b>46.000.006.107,00</b>	<b>43.381.168.161,00</b>	<b>94,31</b>	
<b>5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi</b>	<b>616.484.400,00</b>	<b>518.689.657,00</b>	<b>84,14</b>	
5.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	293.309.000,00	239.740.691,00	81,74	
5.02.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	166.459.900,00	144.685.426,00	86,92	
5.02.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72.813.000,00	54.182.390,00	74,41	Pelaksanaan Kegiatan ini sudah tercapai namun dikarenakan terdapat selisih antar harga SSH dan harga pasar pada penginapan sehingga
					rincian belanja penginapan pada perjalanan dinas tidak terserap secara maksimal.
5.02.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah per triwulan	83.902.500,00	80.081.150,00	95,45	
<b>5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>27.936.958.025,00</b>	<b>27.341.745.727,00</b>	<b>97,87</b>	
5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.326.215.525,00	18.826.793.027,00	97,42	
5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.343.424.000,00	8.302.438.000,00	99,51	
5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000,00	60.390.800,00	80,52	Pelaksanaan Kegiatan ini sudah tercapai namun dikarenakan terdapat selisih



SKPD					antaraharga SSH dan harga pasar pada penginapan sehingga rincian belanja penginapan pada perjalanan dinas tidak
<b>5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>27.936.958.025,00</b>	<b>27.341.745.727,00</b>	<b>97,87</b>	
5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.326.215.525,00	18.826.793.027,00	97,42	
5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.343.424.000,00	8.302.438.000,00	99,51	
5.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000,00	60.390.800,00	80,52	Pelaksanaan Kegiatan ini sudah tercapai namun dikarenakan terdapat selisih antaraharga SSH dan harga pasar pada penginapan sehingga rincian belanja penginapan pada perjalanan dinas tidak
					waktu yang tidak mendukung
<b>5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5.711.363.607,00</b>	<b>4.343.212.871,00</b>	<b>76,05</b>	
5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	24.391.500,00	81,31	
5.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000,00	69.123.200,00	98,75	
5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.783.000,00	35.937.000,00	84,00	
5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.769.000,00	6.882.000,00	88,58	



5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Frekuensi penyediaan dan perlengkapan kantor	4.256.000,00	4.162.500,00	97,80	
Perengkapan Kantor(UPT PEMBERDAYAANDAN PEMANFAATANAN ET)					
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Bahan Logistik	197.699.100,00	193.272.846,00	97,76	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Bahan Logistik Kantor	40.788.800,00	40.627.600,00	99,60	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Bahan Logistik Kantor	93.908.000,00	93.614.600,00	99,69	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	124.333.000,00	122.230.000,00	98,31	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	58.270.000,00	97,12	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	4.070.000,00	88,48	
Perengkapan Kantor(UPT PEMBERDAYAANDAN PEMANFAATANAN ET)					
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Bahan Logistik	197.699.100,00	193.272.846,00	97,76	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Bahan Logistik Kantor	40.788.800,00	40.627.600,00	99,60	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Bahan Logistik Kantor	93.908.000,00	93.614.600,00	99,69	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	124.333.000,00	122.230.000,00	98,31	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	58.270.000,00	97,12	



DAN PEMANFAATAN ASET)					
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	4.070.000,00	88,48	
Perengkapan Kantor(UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)					
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Bahan Logistik	197.699.100,00	193.272.846,00	97,76	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Bahan Logistik Kantor	40.788.800,00	40.627.600,00	99,60	
5.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Bahan Logistik Kantor	93.908.000,00	93.614.600,00	99,69	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	124.333.000,00	122.230.000,00	98,31	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	58.270.000,00	97,12	
5.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Barang Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	4.070.000,00	88,48	
Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)					dikarenakan terdapat selisih antara harga SSH dan harga pasar pada penginapan sehingga rincian belanja penginapan pada perjalanan dinas tidak terserap secara maksimal.
5.02.01.1.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Frekuensi Arsip Dinamis pada SKPD	537.554.032,00	515.173.517,00	95,84	
<b>5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	<b>1.532.507.334,00</b>	<b>1.453.169.159,00</b>	<b>94,82</b>	





5.02.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	346.275.150,00	326.513.600,00	94,29	
5.02.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	753.103.170,00	722.636.451,00	95,95	
5.02.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Sistem Aset Tak Berwujud	200.000.000,00	176.895.756,00	88,45	
5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.129.014,00	227.123.352,00	97,42	
<b>5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.935.199.072,00</b>	<b>7.806.597.367,00</b>	<b>98,38</b>	
5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Jasa Surat Menyurat	71.474.096,00	71.467.171,00	99,99	
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.994.144,00	248.877.861,00	90,50	
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.074.096,00	225.059.442,00	98,68	
5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.273.680,00	206.111.200,00	94,86	
5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.412.168.000,00	6.330.852.675,00	98,73	
5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.129.014,00	227.123.352,00	97,42	
<b>5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.935.199.072,00</b>	<b>7.806.597.367,00</b>	<b>98,38</b>	
5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Jasa Surat Menyurat	71.474.096,00	71.467.171,00	99,99	
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.994.144,00	248.877.861,00	90,50	



(UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)					
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.074.096,00	225.059.442,00	98,68	
5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.273.680,00	206.111.200,00	94,86	
5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.412.168.000,00	6.330.852.675,00	98,73	
5.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	233.129.014,00	227.123.352,00	97,42	
<b>5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7.935.199.072,00</b>	<b>7.806.597.367,00</b>	<b>98,38</b>	
5.02.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (UPT DANA BERGULIR)	Frekuensi Jasa Surat Menyurat	71.474.096,00	71.467.171,00	99,99	
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	274.994.144,00	248.877.861,00	90,50	
5.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.074.096,00	225.059.442,00	98,68	
5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	217.273.680,00	206.111.200,00	94,86	
5.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.412.168.000,00	6.330.852.675,00	98,73	
5.02.01.1.09.11 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET)	Frekuensi pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.000.000,00	168.670.600,00	96,94	

## b. Badan Pendapatan Daerah



Alokasi anggaran untuk Unsur Penunjang Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp 117.207.134.572,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 114.194.915.680,56 atau sebesar (97,43 %). pada Unsur Penunjang Keuangan Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.36.2**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang**  
**Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah		766.201.800	692.044.565	90,32	
	Persentase realisasi penerimaan dana transfer	766.201.800	692.044.565	90,32	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dibandingkan target tahun berjalan Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	354.113.400	304.064.110	85,87	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran Belanja Daerah	354.113.400	304.064.110	85,87	
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	281.932.600	272.979.026	96,82	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	281.932.600	272.979.026	96,82	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	130.155.800	115.001.429	88,36	
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen pengelolaan bahan tanggapan bahan pemeriksaan	130.155.800	115.001.429	88,36	



<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>11.928.277.899</b>	<b>11.180.441.359</b>	<b>93,73</b>	
	<b>Persentase Peningkatan</b>				
	<b>Realisasi Pajak Daerah</b>				
	<b>Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan</b>				
	<b>Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan</b>				
	<b>Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih</b>				
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	1. Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	<b>7.133.976.499</b>	<b>6.632.206.036</b>	<b>92,97</b>	
	2. Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih				
	3. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak				
	4. Lama Gangguan Operasional Pelayanan Di Seluruh Kepri				
	5. Pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan				
	6. Survey Mutu Pelayanan				
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Perhitungan Target Pajak dan Optimalisasi Pajak Daerah	1.141.747.900	1.096.399.213	96,03	
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen analisa pengembangan pajak dan kebijakan pajak daerah	763.151.000	724.636.266	94,95	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Frekuensi penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	1.445.081.100	1.430.346.098	98,98	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1.061.483.130	968.254.196	91,22	
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Frekuensi pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	665.110.669	609.661.956	91,66	
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	266.852.500	238.985.692	89,56	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	997.272.000	913.294.177	91,58	
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen/ target penyelesaian	101.691.000	75.561.048	74,30	



	keberatan pajak daerah				
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	457.930.000	355.102.590	77,55	
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi UPT PPD Bapenda, survey IKM dan Terwujudnya kerjasama Pembinaan Forum Kesamsatan	233.657.200	219.964.800	94,14	
<b>UPTD PPD Batam Centre</b>					
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>2.118.062.300</b>	<b>2.068.131.908</b>	<b>97,64</b>	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1.319.128.300	1.272.256.808	96,45	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	474.550.000	472.876.100	99,65	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	324.384.000	322.999.000	99,57	
<b>UPTD PPD Tanjungpinang</b>					
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>857.002.800</b>	<b>844.720.611</b>	<b>98,57</b>	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	155.060.000	148.669.111	95,88	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	510.250.300	506.571.400	99,28	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	191.692.500	189.480.100	98,85	
<b>UPTD PPD Bintan</b>					
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>338.507.600</b>	<b>317.184.032</b>	<b>93,70</b>	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	128.732.900	111.828.732	86,87	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	91.372.400	89.495.300	97,95	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	118.402.300	115.860.000	97,85	
<b>UPTD PPD KARIMUN</b>					



<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>381.972.400</b>	<b>357.538.217</b>	<b>93,60</b>	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	117.465.000	112.432.989	95,72	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	126.337.900	110.291.228	87,30	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	138.169.500	134.814.000	97,57	
<b>UPTD PPD Lingga</b>					
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>253.765.000</b>	<b>217.132.510</b>	<b>85,56</b>	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	26.681.000	24.410.010	91,49	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	54.464.000	45.455.600	83,46	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	172.620.000	147.266.900	85,31	
<b>UPTD PPD Natuna</b>					
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>368.312.500</b>	<b>315.359.195</b>	<b>85,62</b>	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	131.236.000	107.805.501	82,15	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	103.536.600	83.562.574	80,71	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	133.539.900	123.991.120	92,85	
<b>UPTD PPD Anambas</b>					
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>95.800.000</b>	<b>92.388.250</b>	<b>96,44</b>	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	40.300.000	40.092.000	99,48	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	55.500.000	52.296.250	94,23	
<b>UPTD PPD Batu Aji</b>					
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>211.306.700</b>	<b>171.971.900</b>	<b>81,38</b>	



Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	17.400.000	17.400.000	100,00	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	157.989.700	147.864.900	93,59	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	35.917.000	6.707.000	18,67	
<b>UPTD PPD Kijang</b>					
<b>Kegiatan Pengeloaan Pendapatan Daerah</b>		<b>95.171.200</b>	<b>90.286.200</b>	<b>94,87</b>	
Penyediaan Sarana dan Prasarana PengelolaanPajak Daerah	Frekuensi penye diaansarana dan prasarana penge lolaan pajak daerah	31.875.000	26.990.000	84,67	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	40.141.800	40.141.800	100,00	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	23.154.400	23.154.400	100,00	
<b>UPTD PPD TanjungBatu</b>					
<b>Kegiatan Penge lolaan Pendapatan Daerah</b>		<b>74.400.900</b>	<b>73.522.500</b>	<b>98,82</b>	
Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penagihan pajak daerah	27.395.900	27.252.500	99,48	
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan pengawasan pajak daerah	47.005.000	46.270.000	98,44	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		104.512.654.873	102.322.429.757	97,90	
	Persentase Peningkatan Realisasi				
	Retribusi Daerah dan PAD lainnya				
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				
<b>Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>287.746.669</b>	<b>246.116.982</b>	<b>85,53</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	87.544.669	84.140.594	96,11	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	45.689.000	37.493.888	82,06	



Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.513.000	124.482.500	80,56	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1. Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>71.170.708.358</b>	<b>70.404.507.985</b>	<b>98,92</b>	
	<b>2. Jumlah Laporan Keuangan</b>				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi gaji dan tunjangan ASN	35.127.272.001	34.622.830.493	98,56	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Frekuensi Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	36.003.246.357	35.744.278.897	99,28	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	40.190.000	37.398.595	93,05	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>49.959.400</b>	<b>35.351.200</b>	<b>70,76</b>	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen dan rekonsiliasi dan penyusunan barang Barang milik daerah	49.959.400	35.351.200	70,76	Terdapat realisasi yang rendah karena adanya efisiensi pada rekening Belanja Perjalanan Dinas dan makan minum rapat
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pengeluaran Retribusi, Analisa Strategi dan Pengembangan Kebijakan Retribusi Daerah</b>	<b>368.104.600</b>	<b>334.290.616</b>	<b>90,81</b>	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Optimalisasi	233.002.600	218.539.299	93,79	
	Pengelolaan Potensi Retribusi Daerah				
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Analisa Strategi dan Pengembangan kebijakan Retribusi daerah	135.102.000	115.751.317	85,68	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>356.178.100</b>	<b>335.575.444</b>	<b>94,22</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Kebutuhan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	49.750.000	49.750.000	100,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	175.692.000	155.385.444	88,44	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	130.736.100	130.440.000	99,77	





<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6.983.805.809</b>	<b>6.575.942.242</b>	<b>94,16</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45.801.700	44.276.000	96,67	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.469.453.280	3.442.027.000	99,21	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	112.358.184	112.243.184	99,90	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	399.096.585	382.127.000	95,75	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	1.517.010.060	1.481.713.020	97,67	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.984.000	33.416.000	98,33	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi	195.970.000	156.423.500	79,82	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	1.210.132.000	923.716.538	76,33	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>823.417.050</b>	<b>810.381.000</b>	<b>98,42</b>	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	45.890.000	45.886.000	99,99	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan gedung kantor upt	777.527.050	764.495.000	98,32	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>11.495.344.000</b>	<b>11.291.267.107</b>	<b>98,22</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	10.500.000	10.500.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.659.544.000	2.536.770.732	95,38	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	frekuensi penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	90.000.000	90.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi pemenuhan penyediaan jasa layanan umum kantor	8.735.300.000	8.653.996.375	99,07	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.777.297.535</b>	<b>6.673.602.987</b>	<b>98,47</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau	1.004.451.574	971.411.500	96,71	



an Dinas Operasi onal atau Lapangan	lapangan				
Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	453.870.000	395.607.580	87,16	
Pemeliharaan/Rehabi litas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehab ilitasi sarana dan prasanran gedung kantor	5.318.975.961	5.306.583.907	99,77	
<b>UPTD PPD Batam Centre</b>					
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>575.703.800</b>	<b>538.002.400</b>	<b>93,45</b>	
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.078.800	7.115.000	88,07	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan danPerlengkapan Kantor	54.000.000	54.000.000	100,00	
Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	38.895.000	33.913.300	87,19	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	186.145.000	176.033.000	94,57	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	269.895.000	250.014.100	92,63	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Frekuensi pemehuan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.000.000	5.064.000	84,40	
Fasilitas Kunjungan Tamud	Frekuensi kunjungan tamud yang di fasilitas	1.000.000	1.000.000	100,00	
Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	11.690.000	10.863.000	92,93	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>57.776.000</b>	<b>52.657.496</b>	<b>91,14</b>	
Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55.776.000	50.657.496	90,82	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>175.987.400</b>	<b>171.303.400</b>	<b>97,34</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	152.451.400	149.381.400	97,99	



Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	23.536.000	21.922.000	93,14	
<b>UPTD PPD Tanjungpinang</b>					
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	185.854.600	179.092.673	96,36	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.341.400	4.200.000	96,74	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	31.652.000	27.818.000	87,89	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	54.635.200	53.286.673	97,53	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	21.436.000	21.007.000	98,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi	4.500.000	4.500.000	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	66.290.000	65.281.000	98,48	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>236.395.472</b>	<b>222.125.735</b>	<b>93,96</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	1.750.000	1.750.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	234.645.472	220.375.735	93,92	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>368.933.000</b>	<b>368.381.250</b>	<b>99,85</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	225.090.000	225.090.000	100,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	11.843.000	11.415.000	96,39	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan	132.000.000	131.876.250	99,91	
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasanaan gedung kantor				
<b>UPTD PPD Bintan</b>					



<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	144.061.146	138.084.220	95,85	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.721.500	2.721.500	100,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	10.212.546	10.212.546	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	41.212.600	38.498.974	93,42	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	6.135.000	6.083.000	99,15	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.368.000	3.672.000	84,07	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi	7.822.000	7.424.000	94,91	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	71.589.500	69.472.200	97,04	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>132.417.750</b>	<b>102.002.930</b>	<b>77,03</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sum ber daya air dan listrik	130.417.750	100.002.930	76,68	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>334.460.000</b>	<b>332.030.930</b>	<b>99,27</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	124.280.000	123.420.850	99,31	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	31.880.000	31.610.000	99,15	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	178.300.000	177.000.080	99,27	
<b>UPTD PPD Karimun</b>					
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>245.493.400</b>	<b>240.845.055</b>	<b>98,11</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	9.907.400	9.822.000	99,14	



Bangunan Kantor	Bangunan Kantor				
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000	24.287.000	97,15	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	57.855.500	57.661.055	99,66	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	20.037.500	19.780.000	98,71	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.918.000	7.250.000	91,56	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi	3.075.000	2.450.000	79,67	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	121.700.000	119.595.000	98,27	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>318.277.085</b>	<b>223.275.245</b>	<b>70,15</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	2.260.000	2.260.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	316.017.085	221.015.245	69,94	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>229.271.144</b>	<b>227.061.000</b>	<b>99,04</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	74.220.000	73.020.000	98,38	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	26.060.000	26.016.000	99,83	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	128.991.144	128.025.000	99,25	
<b>UPTD PPD Lingga</b>					
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>367.150.800</b>	<b>348.149.747</b>	<b>94,82</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.895.500	6.456.000	93,63	



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	5.121.500	4.856.215	94,82	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	46.560.000	45.064.500	96,79	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Cetak dan Penggandaan	110.869.800	97.003.200	87,49	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi	2.900.000	2.900.000	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	194.804.000	191.869.832	98,49	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>86.172.000</b>	<b>56.185.673</b>	<b>65,20</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.172.000	55.185.673	64,79	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>174.625.915</b>	<b>149.371.623</b>	<b>85,54</b>	
<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	51.200.000	42.289.000	82,60	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	32.204.000	15.890.000	49,34	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	91.221.915	91.192.623	99,97	
<b>UPTD PPD Natuna</b>					
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>343.995.000</b>	<b>256.005.132</b>	<b>74,42</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.196.300	3.196.300	100,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	13.524.800	12.718.400	94,04	



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	22.876.900	21.114.800	92,30	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	67.375.000	41.226.500	61,19	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	237.022.000	177.749.132	74,99	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>81.560.000</b>	<b>56.229.857</b>	<b>68,94</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	79.560.000	54.229.857	68,16	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>213.690.000</b>	<b>176.518.000</b>	<b>82,60</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	72.340.000	72.318.000	99,97	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	14.350.000	13.800.000	96,17	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	127.000.000	90.400.000	71,18	
<b>UPTD PPD Anambas</b>					
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>196.232.000</b>	<b>196.102.641</b>	<b>99,93</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.659.400	8.643.300	99,81	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	10.398.400	10.391.800	99,94	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	21.650.200	21.608.141	99,81	



Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi penga daan barang Cetak dan Penggandaan	20.808.000	20.751.900	99,73	
Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Frekuensi peme huan Bahan Bacaan dan Pera turan Perundang undangan	1.200.000	1.200.000	100,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitasi	3.840.000	3.840.000	100,00	
Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	129.676.000	129.667.500	99,99	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.036.000</b>	<b>72.344.505</b>	<b>93,91</b>	
Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	1.500.000	1.500.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	75.536.000	70.844.505	93,79	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>108.690.000</b>	<b>97.591.000</b>	<b>89,79</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	10.710.000	10.706.000	99,96	
Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	3.980.000	3.950.000	99,25	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasaranan gedung kantor	94.000.000	82.935.000	88,23	
<b>UPTD PPD Batu Aji</b>					
<b>Administrasi UmumPerangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenu han Administra si Umum Perang kat Daerah</b>	<b>517.288.400</b>	<b>466.289.905</b>	<b>90,14</b>	
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi peme nuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.438.000	3.438.000	100,00	
Penyediaan PeralatanRumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	56.843.000	54.611.000	96,07	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100.931.000	97.136.905	96,24	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	268.626.400	232.482.000	86,54	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemehuan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.632.000	1.560.000	95,59	





Fasilitas Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang di fasilitas	1.610.000	1.610.000	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	84.208.000	75.452.000	89,60	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>186.310.000</b>	<b>140.089.818</b>	<b>75,19</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	1.750.000	1.750.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	184.560.000	138.339.818	74,96	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>151.610.000</b>	<b>151.403.250</b>	<b>99,86</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	47.630.000	47.423.250	99,57	
Dinas Operasional atau Lapangan					
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	4.980.000	4.980.000	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	99.000.000	99.000.000	100,00	
<b>UPTD PPD Kijang</b>					
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>132.200.500</b>	<b>126.643.700</b>	<b>95,80</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.495.200	4.494.200	99,98	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	58.121.300	52.824.500	90,89	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Barang Cetak dan Penggandaan	8.375.000	8.375.000	100,00	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	2.800.000	93,33	



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	53.209.000	53.150.000	99,89	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>74.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>81,08</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.000.000	58.000.000	80,56	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>160.614.000</b>	<b>160.530.000</b>	<b>99,95</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	77.410.000	77.326.000	99,89	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	17.204.000	17.204.000	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	66.000.000	66.000.000	100,00	
<b>UPTD PPD Tanjung Batu</b>					
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>177.077.540</b>	<b>162.043.467</b>	<b>91,51</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Frekuensi pemenuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.955.800	2.949.400	99,78	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Pemenuhan Peralatan Rumah Tangga	4.565.700	3.748.400	82,10	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	25.566.640	24.388.623	95,39	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi pengadaan barang Cetak dan Penggandaan	22.947.400	22.750.000	99,14	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000	2.197.500	97,67	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi kunjungan tamu yang difasilitasi	1.704.000	1.560.000	91,55	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi penyelenggaraan rapat koordinasi	117.088.000	104.449.544	89,21	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>34.315.400</b>	<b>33.540.942</b>	<b>97,74</b>	



Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi pemenuhan surat menyurat	1.583.400	1.580.000	99,79	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.732.000	31.960.942	97,64	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>112.895.000</b>	<b>112.752.600</b>	<b>99,87</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Frekuensi jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional atau lapangan	38.990.000	38.982.600	99,98	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Frekuensi pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	5.005.000	4.870.000	97,30	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Frekuensi pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor	68.900.000	68.900.000	100,00	

### 37. Kepegawaian

Unsur Penunjang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri. Alokasi anggaran untuk Urusan Kepegawaian pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 17.298.026.280,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 16.496.155.641,00 atau sebesar (95,36%), pada Unsur Penunjang Kepegawaian tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.37**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Kepegawaian Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Kepegawaian		17.298.026.280,00	16.496.155.641,00	95,36	
Program Kepegawaian Daerah		2.251.425.310,00	1.969.306.624,00	87,47	
	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan				
	Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi				
	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik				



5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Pengadaan ASN	351.709.260,00	316.815.733,00	90,08	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Tersedianya Jumlah Dokumen Koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	184.228.460,00	163.882.985,00	88,96	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Tersedianya Jumlah SK Pemberhentian ASN	42.449.000,00	38.334.816,00	90,31	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Tersedianya Jumlah Dokumen Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	50.000.000,00	46.484.498,00	92,97	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	46.803.500,00	42.045.120,00	89,83	
Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian (Pelayanan Administrasi Kepegawaian bagi ASN, Pembuatan Karis, Karsu, Karpeg, Taspen, dan kenaikan Gaji Berkala)	28.228.300,00	26.068.314,00	92,35	
5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang di mutasikan di promosikan sesuai kualifikasi	919.137.000,00	740.192.355,00	80,53	
Pengelolaan Mutasi ASN	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi ASN	478.760.500,00	341.420.502,00	71,31	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Tersedianya Pegawai difasilitasi Kenaikan Pangkatnya	126.667.200,00	114.503.366,00	90,40	
	Tersedianya ASN yang Mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah				
Pengelolaan Promosi ASN	Tersedianya ASN yang difasilitasi Promosinya	313.709.300,00	284.268.487,00	90,62	
5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Pegawai yang dinilai kompetensinya	674.185.100,00	634.748.364,00	94,15	
Pengelolaan Assessment Center	Tersedianya Dokumen Profil Pemetaan Kompetensi Pegawai	399.705.000,00	369.053.991,00	92,33	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Tersedianya Jumlah ASN yang difasilitasi Mengikuti Lanjutan Pendidikan	199.992.100,00	198.067.656,00	99,04	
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Tersedianya Jumlah Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional	74.488.000,00	67.626.717,00	90,79	
5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai yang dievaluasi kinerjanya	306.393.950,00	277.550.172,00	90,59	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	98.063.750,00	90.167.643,00	91,95	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Tersedianya Jumlah Pegawai yang diberikan penghargaan	133.807.000,00	126.009.325,00	94,17	



Pembinaan Disiplin ASN	Tersedianya Jumlah Dokumen Pembinaan Disiplin ASN	74.523.200,00 15.046.600.970,00	61.373.204,00 14.526.849.017,00	82,35 96,55	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					
	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				
5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi	151.152.800,00	121.831.987,00	80,60	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	151.152.800,00	121.831.987,00	80,60	
5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai serata Administrasi melaksanakan Tugas	12.401.550.463,00	12.086.383.105,00	97,46	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11.951.488.463,00	11.646.649.555,00	97,45	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Jasa Administrasi Pelaksanaan tugas	450.062.000,00	439.733.550,00	97,71	
5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian	35.000.000,00	15.900.000,00	45,43	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Melaksanakan Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi	35.000.000,00	15.900.000,00	45,43	
5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga, Perlengkapan Kantor dan Logistik	1.084.417.207,00	1.039.335.712,00	95,84	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.781.600,00	12.295.000,00	83,18	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Pemenuhan Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.396.869,00	191.918.655,00	97,72	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor	27.735.100,00	26.788.000,00	96,59	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	88.212.638,00	75.219.884,00	85,27	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.835.000,00	20.360.000,00	81,98	



Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	122.536.000,00	105.890.800,00	86,42	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	594.879.000,00	591.922.373,00	99,50	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis	15.041.000,00	14.941.000,00	99,34	
5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	932.252.500,00	909.517.063,00	97,56	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.460.000,00	24.260.000,00	91,69	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.780.000,00	30.043.438,00	88,94	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000,00	46.812.000,00	97,53	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	824.012.500,00	808.401.625,00	98,11	
5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	442.228.000,00	353.881.150,00	80,02	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	418.678.000,00	332.761.150,00	79,48	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi	23.550.000,00	21.120.000,00	89,68	

### 38. Pendidikan dan Pelatihan

Unsur Penunjang Pendidikan Dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Alokasi anggaran untuk Urusan Pendidikan Dan pelatihan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 10.958.529.203,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 10.741.898.804,00 atau sebesar (98,02%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 94,38%. Jumlah indikator program pada Unsur Penunjang Pendidikan Dan pelatihan sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian semua Indikator program memiliki



kategori sangat tinggi, Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut rekomendasi DPRD pada Unsur Penunjang Pendidikan Dan pelatihan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.01.38**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pendidikan dan Pelatihan		10.958.529.203,00	10.741.898.804,00	98,02	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi</b>	<b>500.778.684,00</b>	<b>443.804.437,00</b>	<b>88,62</b>	<b>semula</b>
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Teknisnya	164.043.000,00	152.794.324,00	93,14	
Penyelenggaraan Pengembangan	Jumlah ASN yang Mengikuti	164.043.000,00	152.794.324,00	93,14	
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	<b>Pengembangan Kompetensi (Banyaknya ASN yang Mengikuti Pelatihan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum)</b>				
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang dikembangkan Kompetensi Manajerial dan Fungsionalnya	336.735.684,00	291.010.113,00	86,42	
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Jumlah Tenaga Pengembang yang Mengikuti Kompetensi)	66.796.684,00	52.490.260,00	78,58	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	269.939.000,00	238.519.853,00	88,36	



Kepemimpinan, dan Prajabatan	<b>Fungsional, Kepemimpinan,</b>				
	<b>dan Prajabatan</b> (Banyaknya ASN yang mengikuti Peningkatan Kompetensi)				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>	10.457.750.519,00	10.298.094.367,00	98,47	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja BPSDM	5.218.000	4.518.000	86,58	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b> (Jumlah Dokumen Renja dan Renja Perubahan BPSDM yang disusun)	5.218.000,00	4.518.000,00	86,58	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	#####	#####	99,35	
Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	8.680.919.827,00	8.623.326.701,00	99,34	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Menerima Honorarium PA, KPA, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang dan Pejabat Pengadaan	164.994.000	164.928.000	99,96	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan Kantor dan Logistik</b>	680.565.257,00	600.105.141,00	88,18	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.110.000	5.110.000	100,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	181.589.300,00	166.819.900,00	91,87	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.297.000	3.297.000	100,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60.807.957,00	58.139.332,00	95,61	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	52.670.000	51.000.000	96,83	





Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	28.500.000,00	28.051.500,00	98,43	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348.591.000	287.687.409	82,53	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	252.484.935,00	243.205.300,00	96,32	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	252.484.935	243.205.300	96,32	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Peralatan, Perlengkapan dan Pelayanan Umum Kantor	593.080.000,00	581.635.325,00	98,07	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT dan THL yang Menerima Honorarium Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	593.080.000	581.635.325	98,07	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah BPSDM	80.488.500,00	80.375.900,00	99,86	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	59.180.000	59.067.400	99,81	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21.308.500,00	21.308.500,00	100,00	

### 39. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian Dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Alokasi anggaran untuk Urusan Penelitian Dan Pengembangan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.718.898.693,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 1.403.397.562,00 atau sebesar (81,65%), dengan rata-rata persentase capaian target indikator program pada tahun 2022 sebesar 119,69%. Jumlah indikator program pada urusan Penelitian Dan Pengembangan sebanyak 2 indikator, dengan pencapaian semua Indikator program memiliki kategori sangat tinggi, Selengkapnya pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan beserta permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan dan tindak lanjut



rekomendasi DPRD pada urusan Penelitian Dan Pengembangan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.01.39**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Penelitian dan Pengembangan		1.718.898.693,00	1.403.397.562,00	81,65	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelibangan	1.718.898.693,00	1.403.397.562,00	81,65	
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah				
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	343.525.000,00	280.056.800,00	81,52	
Fasilitasi,	Jumlah Fasilitasi Tim	1.350.000,00	1.350.000,00	100,00	Kebijakan
Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Pengorganisasian Kelibangan				
Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah Fasilitasi Agenda Kelibangan	312.341.000,00	257.751.800,00	82,52	
	Terdokumentasinya hasil-hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh Instansi Kelibangan di Provinsi Kepri				
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Kajian Isu Strategis di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	29.834.000,00	20.955.000,00	70,24	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan	Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan	1.021.252.900,00	850.263.750,00	83,26	



<b>Pembangunan</b>	<b>Bidang Ekonomi dan Pembangunan an berkualitas</b>				
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Kajian Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	395.000.000,00	326.415.280,00	82,64	
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Kajian Pemetaan Pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) Provinsi Kepulauan Riau	325.752.900,00	284.327.550,00	87,28	
Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Eksemplar	300.500.000,00	239.520.920,00	79,71	
Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Buku Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Kepri				
	Jumlah terbitan Eksemplar Buletin				
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Persentase fasilitasi penerapan penerapan inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah yang terlaksana</b>	<b>354.120.793,00</b>	<b>273.077.012,00</b>	<b>77,11</b>	
Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Bidang Teknologi dan Inovasi	Tersedianya Dokumen Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Kepri	140.430.449,00	116.985.317,00	83,30	
	Tersedianya Dokumen Jejaring Kelitbangandan Inovasi Provinsi Kepulauan Riau				
	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Usaha (TJSLDU) Provinsi Kepulauan Riau				
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	137.650.700,00	92.211.053,00	66,99	



	ditin daklanjutise-Provinsi KepulauanRiau				
	Terlaksananya Coaching DiseminasiJenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahyang Bersifat Inovatifyang ditindaklanj uti se-Provinsi KepulauanRiau				
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Data dan Informasi HAKI yang ditindak lanjuti se- Provinsi Kepulauan Riau  (7 Kabupaten/Kota)	76.039.644,00	63.880.642,00	84,01	

#### 40. Pengelolaan Perbatasan

Unsur Penunjang Pengelolaan Perbatasan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Alokasi anggaran untuk Urusan Pengelolaan Perbatasan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 7.170.895.320,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 6.929.890.136,00 atau sebesar (96,64%), pada urusan penunjang Pengelolaan Perbatasan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.40**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang  
Pengelolaan Perbatasan Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Pengelolaan Perbatasan		7.170.895.320,00	6.929.890.136,00	96,64	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Presentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.593.639.031,00	6.401.319.978,00	97,08	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.186.827.344,00	5.031.102.687,00	97,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	4.952.236.844,00	4.801.784.687,00	96,96	



Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	234.590.500,00	229.318.000,00	97,75	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>625.818.897,00</b>	<b>619.949.321,00</b>	<b>99,06</b>	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Frekuensi Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.027.500,00	23.924.500,00	99,57	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Frekuensi Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.549.100,00	44.608.775,00	93,82	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Frekuensi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.917.200,00	49.762.000,00	99,69	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Frekuensi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.500.000,00	19.360.000,00	99,28	
Fasilitas Kunjungan Tamu	Frekuensi Fasilitas Kunjungan Tamu	24.007.567,00	23.354.000,00	97,28	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.817.530,00	458.940.046,00	99,59	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>512.342.790,00</b>	<b>481.703.470,00</b>	<b>94,02</b>	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	67.986.200,00	66.895.500,00	98,40	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	444.356.590,00	414.807.970,00	93,35	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>220.650.000,00</b>	<b>220.564.500,00</b>	<b>99,96</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Frekuensi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00	35.997.000,00	99,99	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Frekuensi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.650.000,00	180.567.500,00	99,95	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Frekuensi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	



Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Frekuensi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	
<b>Program Pengelolaan Perbatasan</b>	<b>Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi</b>	<b>577.256.289,00</b>	<b>528.570.158,00</b>	<b>91,57</b>	
<b>Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelesaian Kerjasama, Renduk dan Renaksi Kawasan Perbatasan</b>	<b>194.516.489,00</b>	<b>170.632.292,00</b>	<b>87,72</b>	
5.06.02.1.01.01 Koordinasi Integrasi	Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi,	60.786.789,00	53.919.313,00	88,70	
dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				intergrasi dan sinkronisasi kebijakan otonomi daerah
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Penyusunan Renduk dan Renaksi Kawasan Perbatasan	133.729.700,00	116.712.979,00	87,28	Belum terintegrasinya usulan program/kegiatan pembangunan kawasan perbatasan
<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>210.310.600,00</b>	<b>193.238.493,00</b>	<b>91,88</b>	
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pembangunan Kawasan Perbatasan	138.310.600,00	126.704.018,00	91,61	Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur dan sumberdaya di perbatasan LOKPRI di Provinsi Kepri
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	24.000.000,00	21.826.133,00	90,94	Belum adanya data yang komprehensif pemanfaatan kawasan perbatasan
Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Pulau Terluar yang Terfasilitasi Serta Penyusunan Kajian	24.000.000,00	22.538.210,00	93,91	Belum terpeliharanya batas wilayah negara secara komprehensif
Pembangunan Kawasan Perbatasan					
Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya,	Jumlah Dokumen Kajian Lokpri dan Pulau Kecil Terluar	24.000.000,00	22.170.132,00	92,38	



Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan					
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>Persentase Lokasi Prioritas dan PKS N yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan Kawasan Perbatasan</b>	<b>172.429.200,00</b>	<b>164.699.373,00</b>	<b>95,52</b>	
Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	112.500.200,00	110.455.242,00	98,18	
dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah				intergrasi dan sinkronisasi kebijakan otonomi daerah
Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Penyusunan Renduk dan Renaksi Kawasan Perbatasan	133.729.700,00	116.712.979,00	87,28	Belum terintegrasinya usulan program/kegiatan pembangunan kawasan perbatasan
<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>210.310.600,00</b>	<b>193.238.493,00</b>	<b>91,88</b>	
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pembangunan Kawasan Perbatasan	138.310.600,00	126.704.018,00	91,61	Belum maksimalnya pembangunan infrastruktur dan sumberdaya di perbatasan LOKPRI di Provinsi Kepri
Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	24.000.000,00	21.826.133,00	90,94	Belum adanya data yang komprehensif pemanfaatan kawasan perbatasan
Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Pulau Terluar yang Terfasilitasi Serta Penyusunan Kajian	24.000.000,00	22.538.210,00	93,91	Belum terpeliharanya batas wilayah negara secara komprehensif
Pembangunan Kawasan Perbatasan					
Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Kajian Lokpri dan Pulau Kecil Terluar	24.000.000,00	22.170.132,00	92,38	



Monitoring dan Evaluasi	Persentase Lokasi Prioritas dan PKSN yang didata/dikaji/dieduksi dalam pengembangan Kawasan Perbatasan	172.429.200,00	164.699.373,00	95,52	
Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	112.500.200,00	110.455.242,00	98,18	

#### 41. Badan Penghubung

Unsur Penunjang Pengelolaan Penghubung Penghubung dilaksanakan oleh Badan Penghubung Daerah. Alokasi anggaran untuk Unsur Penunjang Penghubung pada tahun anggaran 2022 sebesar 5.469.035.519,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 5.296.945.145,00 atau sebesar (96,85%), pada Unsur Penunjang Penghubung tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.41**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Badan Penghubung Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Penghubung		5.469.035.519,00	5.296.945.145,00	96,85	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	3.572.530.032,00	3.504.717.561,00	98,10	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.325.900,00	16.891.634,00	97,49	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.325.900,00	16.891.634,00	97,49	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dantunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan	2.505.729.517,00	2.469.230.531,00	98,53	





	<b>tepat waktu</b>				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.359.009.517,00	2.324.550.531,00	98,53	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	146.720.000,00	144.680.000,00	98,60	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Frekuensi pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	130.425.213,00	118.278.713,00	90,69	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	130.425.213,00	118.278.713,00	90,69	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Frekuensi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	842.884.000,00	825.982.883,00	97,99	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	74.000.000,00	58.299.883,00	78,78	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	26.464.000,00	26.233.500,00	99,12	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	742.420.000,00	741.449.500,00	99,86	
<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi</b>	<b>1.896.505.487,00</b>	<b>1.792.227.584,00</b>	<b>94,50</b>	
<b>Pelaksanaan Pelayanan Penghubung</b>	<b>Frekuensi Pelaksanaa nPelayanan Penghubun g</b>	1.896.505.487,00	1.792.227.584,00	94,50	
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan HasilPelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	1.024.199.067,00	1.022.470.086,00	99,83	
Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan HasilPromosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	262.545.471,00	262.271.600,00	99,89	



Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	609.760.949,00	507.485.898,00	83,22	
--	---	----------------	----------------	-------	--

## 42. Pengawasan

Unsur Penunjang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Alokasi anggaran untuk Unsur Penunjang Pengawasan pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 35.570.262.514,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 34.338.307.888,56 atau sebesar (96,54%), pada urusan Pengawasan tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.42**  
**Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Pengawasan Tahun 2022**

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Unsur Pengawasan					
Inspektorat Daerah		35.570.262.514,00	34.338.307.888,56	96,54	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi		2.040.188.414,00	1.960.025.291,00	96,07	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %				
	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%				belum adanya penetapan sanksi bagi wajib lapor yang tidak melakukan pelaporan
	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau				pelaksanaan MCP KPK tidak terdapat penunjukan penanggungjawab yang jelas yang
	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas				
	Jumlah Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang ditetapkan		943.431.216,00	917.882.099,00	97,29



Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Jumlah Kebijakan teknis bidang pengawasan yang ditetapkan	359.986.016,00	357.209.949,00	99,23	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang ditetapkan	583.445.200,00	560.672.150,00	96,10	
<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah laporan dan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan</b>	1.096.757.198,00	1.042.143.192,00	95,02	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang dilaksanakan	509.902.548,00	505.073.698,00	99,05	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan	112.959.500,00	100.979.233,00	89,39	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	258.777.050,00	229.779.700,00	88,79	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	215.118.100,00	206.310.561,00	95,91	
<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>		5.482.688.964,00	4.970.520.193,00	90,66	
	<b>Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>				
	<b>Hasil Pemeriksaan Inspektorat</b>				
	<b>Persentase Tindakan lanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK</b>				
	<b>Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan</b>				
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas				
	Rata-Rata Nilai Peer Review Antar Irbn				
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah laporan hasil pengawasan internal yang diterbitkan sesuai standar audit</b>	3.652.166.048,00	3.503.704.861,00	95,93	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja yang diterbitkan	764.474.948,00	677.604.046,00	88,64	



Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang diterbitkan	706.685.000,00	667.320.128,00	94,43	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan	16.874.200,00	16.779.540,00	99,44	
	Kinerja yang diterbitkan				
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Keuangan yang diterbitkan	127.135.000,00	126.200.928,00	99,27	
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten / Kota	Jumlah Kab/ Kota yang di awasi	235.050.600,00	235.027.080,00	99,99	
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Kerjasama pengawasan internal yang diselenggarakan	1.250.000.000,00	1.229.113.184,00	98,33	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monev TLHP BPK dan APIP	551.946.300,00	551.659.955,00	99,95	
<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan</b>	1.830.522.916,00	1.466.815.332,00	80,13	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Daerah	51.339.000,00	42.692.430,00	83,16	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan	1.779.183.916,00	1.424.122.902,00	80,04	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>		28.047.385.136,00	27.407.762.404,56	97,72	
	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD</b>				
	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi				
	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersedianya dokumen perencanaan (sesuai urusan SKPD)	160.795.700,00	160.476.900,00	99,80	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	67.297.200,00	67.006.600,00	99,57	



Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	93.498.500,00	93.470.300,00	99,97	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan hak keuangan ASN</b>	20.388.574.996,00	20.129.146.177,00	98,73	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19.954.474.996,00	19.720.728.177,00	98,83	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	434.100.000,00	408.418.000,00	94,08	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	975.939.500,00	885.798.554,00	90,76	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	122.652.500,00	100.251.220,00	81,74	
Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan Non ASN Yang mengikuti Diklat	853.287.000,00	785.547.334,00	92,06	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	4.836.700.396,00	4.560.930.738,20	94,30	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100.986.000,00	99.642.500,00	98,67	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan	1.378.504.176,00	1.360.870.199,20	98,72	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	60.800.000,00	48.000.000,00	78,95	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	635.657.480,00	624.585.500,00	98,26	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	337.232.600,00	331.557.503,00	98,32	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantoryang dibutuhkan	14.007.900,00	14.007.900,00	100,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2.309.512.240,00	2.082.267.136,00	90,16	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>tersedianya jasa penunjang pemerintahan daerah</b>	724.494.100,00	723.450.000,00	99,86	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	724.494.100,00	723.450.000,00	99,86	



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya barangmilik daerah	960.880.444,00	947.960.035,36	98,66	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan	706.912.100,00	698.870.650,00	98,86	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	100.834.600,00	97.157.000,00	96,35	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan/rehabilitasi	153.133.744,00	151.932.385,36	99,22	

### 43. Kesatuan Bangsa dan Politik

Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Alokasi anggaran untuk Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 35.248.085.092,00 dengan penyerapan anggaran pada akhir tahun 2022 sebesar Rp 34.678.892.795,00 atau sebesar (98,39%), pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2.43**  
Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Unsur Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022

Bidang Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Anggaran	Keterangan
Unsur Pemerintahan Umum		35.248.085.092,00	34.678.892.795,00	98,39	
Kesatuan Bangsa dan Politik		35.248.085.092,00	34.678.892.795,00	98,39	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	468.348.000,00	432.037.327,00	92,25	
8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila	Jumlah dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila	468.348.000,00	432.037.327,00	92,25	



dan Karakter Kebangsaan	dan Karakter Kebangsaan				
8.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	329.319.000,00	300.946.200,00	91,38	
	Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
	Jumlah Peserta Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan				
8.01.02.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	139.029.000,00	131.091.127,00	94,29	
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>Persentase Konflik antar Agama</b>	308.985.100,00	307.042.737,00	99,37	
<b>8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	308.985.100,00	307.042.737,00	99,37	
8.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersedianya Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	93.987.400,00	93.986.400,00	100,00	
<b>8.01.05.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang</b>	<b>Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama dan aliran</b>	90.934.000,00	90.817.681,00	99,87	
<b>Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</b>	<b>kepercayaan di Provinsi Kepri</b>				



8.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Ekonomi, sosial budaya, penyalahgunaan narkotika dan fasilitasi kerukunan umat beragama	124.063.700,00	122.238.656,00	98,53	
<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase Konflik Sosial yang Tertangani</b>	15.740.898.980,00	15.710.226.114,00	99,81	
<b>8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	15.740.898.980,00	15.710.226.114,00	99,81	
8.01.06.1.01. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama	Tersusunnya Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan Kewaspadaan Dini	172.333.900,00	159.179.845,00	92,37	
8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Deseminasi pencegahan Kewaspadaan Dini serta penanganan Konflik Sosial di Daerah	96.881.000,00	91.511.800,00	94,46	
8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Persentase Hibah FKPD Provinsi Kepulauan Riau	13.761.522.880,00	13.760.889.600,00	100,00	
		155.516.000,00	145.252.669,00	93,40	
8.01.06.1.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Rapat Koordinasi Forkopimda	1.554.645.200,00	1.553.392.200,00	99,92	





Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	<b>Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat</b>	2.918.771.240,00	2.917.066.314,00	99,94	
<b>8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Politik dan Lembaga Politik</b>	2.918.771.240,00	2.917.066.314,00	99,94	
8.01.03.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	Tersusunnya Dokumen Bahan Perumusan Kebijakan Kewaspadaan Dini serta penanganan Konflik di Daerah	123.159.000,00	121.766.400,00	98,87	
8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan	Bimbingan Teknis Pengajuan Bantuan Keuangan Partai	70.000.000,00	69.968.225,00	99,95	
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Politik yang terlaksana				
8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rapat Kerja Pokja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	2.725.612.240,00	2.725.331.689,00	99,99	



Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<b>Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan</b>	5.686.063.996,00	5.466.202.296,00	96,13	
<b>8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Jumlah dokumen kebijakan Teknis dan Pemantapan bidang ormas</b>	<b>5.686.063.996,00</b>	<b>5.466.202.296,00</b>	<b>96,13</b>	
8.01.04.1.01.01 Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	Terlaksananya pembinaan Ormas/LSM yang sesuai dengan kebijakan/regulasi	129.832.257,00	128.581.857,00	99,04	
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
8.01.04.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Verifikasi Data Ormas dan LSM Penerima bantuan	121.031.739,00	121.031.739,00	100,00	
8.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Hibah Ormas yang Terealisasi	5.435.200.000,00	5.216.588.700,00	95,98	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	<b>Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor</b>	10.125.017.776,00	9.846.318.007,00	97,25	
<b>8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase capaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>311.921.409,00</b>	<b>304.744.922,00</b>	<b>97,70</b>	
8.01.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Badan Kesbangpol	181.021.359,00	175.448.334,00	96,92	
8.01.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LAKIP dan SAKIP yang akuntabel	130.900.050,00	129.296.588,00	98,78	
<b>8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN</b>	<b>6.877.293.270,00</b>	<b>6.629.283.494,00</b>	<b>96,39</b>	



8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.395.287.270,00	6.155.169.494,00	96,25	
8.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Jasa Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	482.006.000,00	474.114.000,00	98,36	
<b>8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>1.053.983.481,00</b>	<b>1.045.837.732,00</b>	<b>99,23</b>	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	frekuensi Bahan Logistik Kantor	73.038.134,00	71.017.967,00	97,23	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	53.372.908,00	53.113.600,00	99,51	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitasi makan dan minum kunjungan tamu	15.870.000,00	15.802.000,00	99,57	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	911.702.439,00	905.904.165,00	99,36	
<b>8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor</b>	<b>111.818.000,00</b>	<b>111.704.200,00</b>	<b>99,90</b>	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	111.818.000,00	111.704.200,00	99,90	
<b>8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor</b>	<b>1.589.463.616,00</b>	<b>1.574.704.859,00</b>	<b>99,07</b>	
8.01.01.1.08.02 Penyediaan Jasa	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	53.261.660,00	53.160.000,00	99,81	
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
8.01.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.850.000,00	74.850.000,00	100,00	
8.01.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.461.351.956,00	1.446.694.859,00	99,00	
<b>8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Kantor</b>	<b>180.538.000,00</b>	<b>180.042.800,00</b>	<b>99,73</b>	
8.01.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	180.538.000,00	180.042.800,00	99,73	



Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	mendapatkan Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan				
---	--	--	--	--	--

## 1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Perumusan masalah sebagai isu strategis tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik yang bersumber dari tiga (3) aspek penting, yaitu: (1) Hasil Evaluasi capaian indikator RPJMD tahun 2020, (2) rumusan isu strategis berdasarkan rancangan teknokratik RPJMD tahun 2021-2026, isu global dan nasional. Sehingga dapat dirumuskan isu strategis dalam pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022, sebagai berikut ini :

#### 1. Kualitas Pembangunan Manusia

Kualitas pembangunan manusia masih menjadi permasalahan yang dihadapi sampai dengan tahun 2020. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan manusia tahun 2020 baru mencapai sebesar 75,59, sedikit meningkat dari tahun 2019 sebesar 74,55. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 10,34%, meningkat dari tahun 2019 sebesar 6,74%. Tentunya diperlukan peningkatan kesempatan kerja agar dapat menyerap tenaga kerja. Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari sebesar 5,80% pada tahun 2019 menjadi 5,92% pada tahun 2020. Indeks gini menunjukkan peningkatan dari sebesar 0,337 pada tahun 2019 menjadi 0,34 pada tahun 2020. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penduduk miskin dan indeks gini pada tahun 2020 dipengaruhi oleh dampak Pandemic Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2020.

#### 2. Penurunan Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar dipengaruhi oleh dampak Pandemic Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kepri



mencapai sebesar -3,80%. Sementara itu inflasi mengalami penurunan dari sebesar 2,03% menjadi 1,18%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi pada hampir semua sektor PDRB.

### **3. Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup**

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2020 tergambarkan dari persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sebesar 46,5%; persentase jalan provinsi berkondisi baik sebesar 74,51%; persentase jembatan Provinsi berkondisi baik sebesar 87,35%; dan Jumlah. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda belum terealisasi pada tahun 2020. Terkait perumahan dan kawasan permukiman, luasan kawasan kumuh di Provinsi Kepulauan Riau tersisa 399,8 Ha yang belum tertangani. Untuk Persentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman baru mencapai sebesar 92,68%. Cakupan pelayanan Sanitasi yang mencakup air limbah, persampahan dan drainase pada tahun 2020 masih belum mencapai target. Cakupan persampahan baru mencapai 83,84%, cakupan air limbah baru mencapai 59,99%; dan cakupan drainase baru mencapai 45,10%.

Kondisi sarana dan prasarana perhubungan perlu ada peningkatan, dapat dilihat dari Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (roro) sebesar 71,43%, Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 96,16%, Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas 9,67%, Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis 85,71%, Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara 75%, Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut 97,06%, dan Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut 77,78%.

### **4. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

Pencapaian tata kelola pemerintahan ditunjukkan dengan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri baru mencapai 65,83 pada tahun 2019. Pencapaian reformasi birokrasi didukung beberapa indikator seperti Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik dengan realisasi sebesar 82,89%, Opini BPK terhadap



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP, dan Nilai Keterbukaan informasi publik sebesar 114,12 pada tahun 2020.

## **b. Visi dan Misi Kepala Daerah**

### **Visi**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah ” ***Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya.***”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- a. Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
- b. Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- c. Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

### **Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi guna mewujudkan visi diatas, 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat;
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan;



3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa;
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

**c. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan**

Program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 32 urusan dan unsur penunjang, dimulai dari urusan Pendidikan, Kesehatan, hingga urusan Program Rutin untuk setiap Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

**1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

**a. Program Pengembangan Kurikulum**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah;
- 2) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus.

**b. Program Pengelolaan Pendidikan**

Kegiatan pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
- 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 3) Pengelolaan Pendidikan Khusus.

**c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

**d. Program Pengendalian Perizinan Pendidika**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;



- 2) Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

## **2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

### **a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
- 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
- 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.

### **b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi;
- 2) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.

### **c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)<sup>2</sup>.

### **d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan RSUD Provinsi di Tanjungpinang meliputi sebagai berikut:

- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi;





- 2) Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi.

### **3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

#### **a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

#### **b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota.

#### **c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

#### **d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional.

#### **e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:



- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi.

**f. Program Penataan Bangunan Gedung**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

**g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

**h. Program Penyelenggaraan Jalan**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

**i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
- 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi;
- 3) Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

**j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi;
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang;
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi;
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi.



#### **4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

##### **a. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum**

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi.

#### **5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

##### **a. Program Pengembangan Perumahan**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
- 2) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

##### **b. Program Kawasan Permukiman**

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
- 2) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.

##### **c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu)**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman.

#### **6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

##### **a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:



- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

**b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran;
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

**c. Program Penanggulangan Bencana**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi;
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
- 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

**7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. Program Pemberdayaan Sosial**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.

**c. Program Rehabilitasi Sosial**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti;
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
- 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.

**d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi.

**e. Program Penanganan Bencana**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi.

**f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.

**8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA****a. Program Perencanaan Tenaga Kerja**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

**b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**



Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
- 2) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi.

**c. Program Penempatan Tenaga Kerja**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
- 2) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi.

**d. Program Hubungan Industrial**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 2) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

**e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.

**9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**

**a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.

**b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.



**c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan.

**10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**a. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
- 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

**b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
- 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

**c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

**d. Program Perlindungan Khusus Anak**

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota



- 2) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

**e. Program Perlindungan Perempuan**

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

**f. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

**g. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 2) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

**11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**a. Program Pengendalian Penduduk**

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk



**b. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera**

- 1) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 2) Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

**12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN****a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan;
- 2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi;
- 3) Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi.

**b. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi

**c. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

**13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN****a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian;



- 2) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi.

**b. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

**c. Program Penyuluhan Pertanian**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.

**14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi



2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

**c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

**d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

**e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan LIMBAH Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

**g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

**h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**



Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

**i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

**j. Program Pengelolaan Persampahan**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

**15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**

**a. Program Pengelolaan Hutan**

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
- 2) Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
- 3) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- 4) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
- 5) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- 6) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- 7) Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m<sup>3</sup>/Tahun

**b. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan**

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:



1) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

**c. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**

Kegiatan prioritas pada program ini yang akan dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**a. Program Pendaftaran Penduduk**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan.

**b. Program Pencatatan Sipil**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

1) Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

**c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi.

**17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**a. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

**b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**



Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

## **18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**

### **a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi;
- 2) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;
- 3) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi;
- 4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

### **b. Program Pengelolaan Pelayaran**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi;
- 2) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional;
- 3) Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan;



- 4) Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas;
- 5) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
- 6) Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional.

## **19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi.

### **b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi.

## **20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**

### **a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi.

## **21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**

### **a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
- 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi.



## **22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**

### **a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

### **b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

### **c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 2) Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

### **d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

### **e. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.

### **f. Program Pengembangan Umkm**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah.





## **23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

### **a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

### **b. Program Promosi Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

### **c. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 3) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- 4) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 5) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

### **d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

**e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

**24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA****a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi.

**b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi;
- 2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
- 3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional;
- 4) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.

**c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

**25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN****a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan program ini meliputi:

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**b. Program Pengembangan Kebudayaan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.

**c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

**d. Program Pembinaan Sejarah**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi.

**e. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
- 2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi.

**f. Program Pengelolaan Permuseuman**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Museum Provinsi.

**26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN****a. Program Pembinaan Perpustakaan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi;
- 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi.

**b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi.

**27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN****a. Program Pengelolaan Arsip**

Kegiatan pada program ini meliputi :



- 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi;
- 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi;
- 3) Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.

**b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota.

**28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi;
- 2) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.

**b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil;
- 2) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT;
- 3) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi;
- 4) Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

**c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;



2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.

**d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil.

**e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar;
- 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

**29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**

**a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi;
- 2) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
- 3) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi;
- 4) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

**b. Program Pemasaran Pariwisata**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

**c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
- 2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.



**d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan;
- 2) Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

**30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;
- 2) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi.

**b. Program Pengelolaan Energi Terbarukan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi

**c. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi;
- 2) Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi;
- 3) Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri;
- 4) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan.

**31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**

**a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**



Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.

**b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

**c. Program Pengembangan Ekspor**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

**d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

**32. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**

**a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

**b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.



### **33. PERENCANAAN**

#### **a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

#### **b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

### **34. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
- 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 3) Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

### **35. KEUANGAN**

#### **a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- 2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;





- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- 5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah.

**b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

### **36. KEPEGAWAIAN**

**a. Program Kepegawaian Daerah**

Kegiatan pada program ini meliputi ::

- 1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
- 2) Mutasi dan Promosi ASN;
- 3) Pengembangan Kompetensi ASN;
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

### **37. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Kegiatan pada program ini meliputi ::

- 1) Pengembangan Kompetensi Teknis;
- 2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

### **38. SEKRETARIAT DPRD**

**a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD;
- 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran;
- 3) Peningkatan Kapasitas DPRD;



- 4) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat;
- 5) Fasilitasi Tugas DPRD.

### **39. PENGELOLAAN PERBATASAN**

#### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### **b. Program Pengelolaan Perbatasan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
- 2) Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan;
- 3) Monitoring dan Evaluasi.

### **40. INSPEKTORAT DAERAH**

#### **a. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

#### **b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Pendampingan dan Asistensi.

### **41. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

#### **a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.



**b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

**c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

**d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

**e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

**42. PENGELOLAAN PENGHUBUNG**

**a. Program Pelayanan Penghubung**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

**43. SEKRETARIAT DAERAH**

**a. Program Penataan Organisasi**



Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
- 2) Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

**b. Program Pengelolaan Perbatasan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;
- 2) Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan;
- 3) Monitoring dan Evaluasi .

**c. Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pelaksanaan Tugas Pemerintahan;
- 2) Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 3) Fasilitasi Kerjasama Daerah.

**d. Program Kesejahteraan Rakyat**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual;
- 2) Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
- 3) Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.

**e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan;
- 2) Fasilitasi Bantuan Hukum.

**f. Program Perekonomian dan Pembangunan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian;
- 2) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam;
- 3) Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD.

**g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- 3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.



#### **h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 2) Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

#### **44. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

Selain program-program pembangunan, setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan beberapa kegiatan penunjang sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peningkatan Pelayanan BLUD;
- 11) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 12) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah;
- 13) Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan;
- 14) Fasilitasi Keprotokolan;
- 15) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD;
- 16) Layanan Administrasi DPRD.

#### **1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimum**

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi



daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditekankan untuk melaksanakan SPM sebagai urusan wajib pemerintahan dengan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan, ketentuan lebih lanjut SPM bidang urusan pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
2. Kesehatan, ketentuan lebih lanjut SPM urusan kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ketentuan lebih lanjut SPM Pekerjaan Umum adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, ketentuan lebih lanjut SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sama dengan SPM PU di atas.



5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ketentuan teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 pada SubBidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Sosial, ketentuan lebih lanjut SPM Bidang Urusan Sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Selain diatur kementerian terkait, penerapan SPM juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 khususnya bagi pemerintah daerah terkait dengan struktur, mekanisme, jenis, dan mutu pelayanan yang menjadi hak warga negara.

Setiap SPM memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Peraturan Pemerintah ini maksudkan agar terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu tertentu, menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi:

- a. Dasar menentukan kebutuhan pembiayaan daerah, menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan, menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja.
- b. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur.
- c. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat.



Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintahan daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik, memperjelas tugas pokok pemerintahan daerah dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan hingga tahun 2021. Untuk menjamin pelaksanaan SPM dapat dikawal dan berjalan dengan baik maka indikator SPM dituangkan dalam indikator program RPJMD 2016-2021, yang kemudian indikator-indikator tersebut dibagikan ke Organisasi Perangkat Daerah Pengampu sesuai kewenangannya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada peraturan/keputusan menteri yang membidangi masing-masing urusan. Rencana pencapaian SPM kemudian dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.